

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



### PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2023 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

#### 7.1. PENDAHULUAN

##### 7.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan Umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 189 sampai dengan Pasal 93. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah.

### **7.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Buku Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia Edisi 2019;
- dd. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;

- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- ll. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- mm. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- nn. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Kepulauan Anambas;
- oo. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kabupaten Kepulauan Anambas;
- pp. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Anambas;
- qq. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Kepulauan Anambas;
- rr. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ss. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Anambas;
- tt. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- uu. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- vv. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- ww. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- xx. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- yy. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- zz. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- aaa. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;

- bbb. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- ccc. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- ddd. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- eee. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- fff. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- ggg. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
- hhh. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;

#### **7.1.4. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sebanyak 34 SKPD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

16. Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah;
18. Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
25. Kecamatan Siantan;
26. Kecamatan Jemaja;
27. Kecamatan Palmatak;
28. Kecamatan Siantan Timur;
29. Kecamatan Siantan Selatan;
30. Kecamatan Jemaja Timur;
31. Kecamatan Siantan Tengah;
32. Kecamatan Siantan Utara;
33. Kecamatan Jemaja Barat; dan
34. Kecamatan Kute Siantan.

#### **7.1.4.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **7.1.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

#### **7.1.4.3. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah; dan
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

#### **7.1.4.4. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Daerah bersangkutan.

#### **7.1.4.5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

#### **7.1.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **7.1.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

### **7.1.5. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi**

#### **a. Letak Geografi**

Secara geografis, Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten kepulauan yang terdiri dari gugusan-gugusan pulau yang eksotis dan indah yang berjumlah 255 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664,14 Km<sup>2</sup>, dimana luas lautan lebih besar dari pada luas daratan yaitu 46.029,77 Km<sup>2</sup> (98,65 persen) dan luas daratan 634,37 Km<sup>2</sup> (1,35 persen). Menjadi Kabupaten di wilayah perbatasan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, membuat Anambas mempunyai pulau-pulau terluar. Dari 255 pulau yang ada di Anambas, lima diantaranya adalah lima pulau terluar dari Republik Indonesia

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur. Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38.70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37.37 mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak (± 208.41 mil) dan Siantan Tengah (± 205.16 mil). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut, untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi

laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah  $\pm 202.29$  mil, ke Johor (Malaysia)  $\pm 205.97$  mil dan Kuching (Malaysia)  $\pm 318.91$  mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta  $\pm 640.72$  mil

#### b. Demografi

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2023 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 50.140 (lima puluh ribu seratus empat puluh) jiwa yang terdiri dari 25.707 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh) jiwa (51,27%) penduduk laki-laki dan 24.433 (dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga) jiwa (48,73%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Siantan yang merupakan Pusat Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 13.524 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh empat) jiwa.

Tabel 1  
Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahunn 2023

(Dalam Angka)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Siantan	6.913	6.611	13.524
2	Palatak	4.070	3.900	7.970
3	Siantan Timur	2.374	2.268	4.642
4	Siantan Selatan	2.073	1.953	4.026
5	Jemaja Timur	1.544	1.392	2.936
6	Jemaja Barat	598	574	1.172
7	Jemaja	3.206	3.132	6.338
8	Siantan Tengah	1.820	1.730	3.550
9	Siantan Utara	1.107	1.023	2.130
10	Kute Siantan	2.002	1.850	3.852
<b>Total</b>		<b>25.707</b>	<b>24.433</b>	<b>50.140</b>

## **7.2. KEBIJAKAN KEUANGAN, EKONOMI MAKRO DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode Tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu Tahun dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran), yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer). Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaan, APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 mengalami beberapa kali pergeseran sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.

#### 7.2.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a) Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - b) Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan *horizontal* (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja
  - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, diupayakan secara mandiri dalam jangka panjang melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat ditempuh antara lain melalui:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
- b. Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
- c. Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- d. Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. Penerapan law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- g. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
- h. Peningkatan kualitas. kemudahan. ketepatan. dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;
- i. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
- j. Mengupayakan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Bidang Jasa Pelayanan Pertambangan. dan lain-lain; dan
- k. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### 7.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpolo. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk

dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

- a. Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan yang masih tertuang dalam KUA dan PPAS. Prioritas pembangunan dilaksanakan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya;
- b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja;
- e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;
- g. Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- h. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (2) belanja modal;
- j. Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- k. Klasifikasi beban menurut kelompok beban terdiri dari: (1) beban operasi, beban transfer, defisit non anggaran dan beban luar biasa;
- l. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:

- 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
  - 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
- m. Untuk mendukung Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah, perlu juga melakukan dukungan pendanaan terhadap:
- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah (APBD) untuk menjaga tingkat konsumsi serta investasi untuk meningkatkan *demand* guna menstimulus perekonomian khususnya disektor riil, Percepatan belanja modal dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong investasi tetapi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya;
  - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor industri pengolahan dengan mengutamakan tender-tender proyek Pemerintah kepada industri domestik seperti proyek tol laut pemerintah bagi komoditas perdagangan;
  - 3) Mempercepat proses perizinan khususnya terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  - 4) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani dengan memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi. serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban. termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
  - 5) Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah. antara provinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya; dan
  - 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi pemerintahan desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.
- n. Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

### 7.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (*defisit*) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan

dengan belanja terjadi keseimbangan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu. Kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan (*good governance*) yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran pegawai negeri sipil daerah khususnya dan seluruh masyarakat daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahunan, yang merupakan penjabaran RPJMD Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Kebijakan Keuangan pada Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan keuangan pada belanja daerah lebih menitikberatkan pada anggaran yang bersifat efektif, efisien dan ekonomi yang lebih memprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pada pembiayaan daerah di penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber pada sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dengan memberikan pinjaman daerah yang bersifat dana bergulir untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

- 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 4) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- 6) Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

- 1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 2) Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 7.2.3. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Produk Domestik Bruto pada Tingkat Nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tingkat Regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha

merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 16.697.526,00.

Perekonomian Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 19.241,5 miliar dengan migas, Rp 3.520,8 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 11.187,5 miliar dengan migas, Rp 2.225,6 miliar tanpa migas. Ekonomi Kepulauan Anambas tahun 2023 tumbuh sebesar 0,62 persen, artinya mengalami percepatan laju pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 yang memiliki pertumbuhan sebesar 0,09 persen. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Anambas tumbuh sebesar 4,12 persen (tanpa migas). Terlepas dari kontribusi migas, dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi disokong oleh kategori Konstruksi dengan andil sebesar 0,34 persen (Tabel.3). Dari sisi pengeluaran, komponen yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 1,30 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sebesar 19.241,5 miliar rupiah. Nilai ini menurun jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 19.909,1 miliar rupiah. Apabila mengeluarkan sektor migas, PDRB ADHB Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 3.520,8 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3.272,5 miliar rupiah. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro terhadap perkembangan suatu daerah. Struktur Ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 81,79 persen; Konstruksi sebesar 5,69 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,52 persen; Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,91 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,95 persen.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sebesar 11.187,5 miliar rupiah, nilai ini meningkat 0,62 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11.118,2 miliar rupiah. Apabila mengeluarkan sektor migas, PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2.225,6 miliar rupiah pada tahun 2023 meningkat 4,12 persen dari tahun 2022 yang sebesar 2.137,6 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 sebesar 0,62 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023 sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah semakin bertumbuh dibanding tahun sebelumnya yang berada dalam kondisi pulih dari pandemi covid-19. Wilayah Kepulauan menyebabkan Kepulauan Anambas mengalami ketergantungan stok barang dan persediaan pada barang-barang yang didatangkan dari luar kabupaten (impor). Kategori dengan pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 9,43 persen.

Di sisi lain, lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar -6,83 persen dan -0,21 persen. Dengan mengeluarkan sektor migas, perekonomian Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 3,62 persen. Andil pertumbuhan PDRB dengan migas terbesar disumbangkan oleh kategori Konstruksi sebesar 0,34 persen; kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,16 persen; kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,16

persen; kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 0,06 persen. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian memiliki andil negatif sebesar -0,17 persen.

**Tabel 2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 s.d. 2022**

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	640,58	643,70	629,89	634,70	645,37
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	10.095,12	9.981,00	9.106,80	9.056,28	8.991,52
Industri Pengolahan/ Manufacturing	14,64	15,36	15,73	16,08	16,58
Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	6,40	6,37	6,51	6,70	6,89
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,00	0,32	0,33	0,32	0,34
Konstruksi/Construction	613,09	664,18	626,54	667,75	686,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	255,99	273,00	256,05	262,87	289,56
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	20,49	20,88	13,37	14,27	15,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	12,21	13,38	10,74	11,64	12,91
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	53,27	59,37	62,69	66,70	68,81
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	15,43	15,98	16,42	16,65	16,86
Real Estat/Real Estate Activities	69,04	73,31	70,85	73,99	76,35
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	213,57	224,27	232,44	223,73	230,61
Jasa Pendidikan/Education	22,05	22,95	23,73	23,29	24,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	23,80	25,52	25,42	26,41	27,85
Jasa Lainnya/Other Services Activities	7,34	7,73	6,92	7,09	7,70
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	<b>12.063,35</b>	<b>12.047,35</b>	<b>11.104,45</b>	<b>11.108,49</b>	<b>11.118,23</b>

Catatan/Note: \* Angka Sementara/ Preliminary figures

\*\* Angka Sangat Sementara/Very preliminary figures

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

**Tabel 3**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 s.d. 2022**

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	5,23	5,07	6,10	5,53	4,98
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	83,54	82,96	80,07	81,88	83,64
Industri Pengolahan/ Manufacturing	0,12	0,12	0,16	0,14	0,13
Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,06	0,05	0,07	0,06	0,05
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi/Construction	5,10	5,51	6,10	5,75	5,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,32	2,46	2,87	2,65	2,55
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,19	0,19	0,14	0,14	0,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,37	0,41	0,52	0,48	0,41
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,12	0,12	0,15	0,13	0,11
Real Estat/Real Estate Activities	0,56	0,58	0,67	0,62	0,55
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,86	1,94	2,43	2,02	1,75
Jasa Pendidikan/Education	0,18	0,19	0,25	0,21	0,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,20	0,21	0,25	0,23	0,21
Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan/Note: \* Angka Sementara/ Preliminary figures

\*\* Angka Sangat Sementara/Very preliminary figures

Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka

#### 7.2.4. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD berkaitan dengan beberapa urusan yang menjadi tanggungjawab Daerah antara lain :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi;
  - 1) Pendidikan
  - 2) Kesehatan
  - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  - 6) Sosial
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
  - 1) Tenaga Kerja
  - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 3) Pangan
  - 4) Pertanahan
  - 5) Lingkungan Hidup
  - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 9) Perhubungan
  - 10) Komunikasi dan Informatika
  - 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
  - 12) Penanaman Modal
  - 13) Kepemudaan dan Olahraga
  - 14) Statistik
  - 15) Persandian
  - 16) Kebudayaan
  - 17) Perpustakaan
  - 18) Kearsipan
- c. Urusan Pilihan;
  - 1) Kelautan dan Perikanan
  - 2) Pariwisata
  - 3) Pertanian
  - 4) Perdagangan
  - 5) Perindustrian
- d. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah:
  - 1) Sekretariat DPRD
  - 2) Sekretariat Daerah
- e. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah:
  - 1) Perencanaan
  - 2) Keuangan
  - 3) Kepegawaian
  - 4) Pendidikan dan Pelatihan
  - 5) Penelitian dan Pengembangan
  - 6) Pengelolaan Perbatasan
- f. Urusan Pengawasan:
  - 1) Inspektorat Daerah
- g. Unsur Kewilayahan:
  - 1) Kecamatan
- h. Unsur Pemerintahan Umum:
  - 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebanyak 8 urusan, yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

#### 7.2.4.1. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 108 Program 263 Kegiatan dan 877 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp693.271.252.622,00 pada 8 (delapan) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 16 Program 48 Kegiatan dan 248 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 243.540.091.110,00;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 Program 37 Kegiatan dan 144 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp191.764.136.744,00;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 35 Program 56 Kegiatan dan 105 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp204.782.017.636,00;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 4 Program 22 Kegiatan dan 114 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.410.822.696,00;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 12 Program 23 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.489.661.981,00;
- f. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 20 Program 42 Kegiatan dan 96 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.489.176.649,00;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 4 Program 20 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.197.648.739,00;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan terdiri dari 3 Program 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.597.697.067,00;

**Tabel 4**

**Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	243.540.091.110,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	191.764.136.744,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	204.782.017.636,00
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.410.822.696,00
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.489.661.981,00
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.489.176.649,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.197.648.739,00

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.597.697.067,00
<b>Jumlah</b>		<b>693.271.252.622,00</b>

#### 7.2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 107 Program, 208 Kegiatan dan 519 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp93.986.431.181,00 pada 7 (tujuh) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 10 Program, 27 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.016.199.879,00;
- Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari 24 Program, 46 Kegiatan dan 115 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.755.177.153,00;
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari 10 Program, 28 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.768.659.121,00;
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 38 Program, 52 Kegiatan dan 93 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.083.710.298,00;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari 12 Program, 26 Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.846.103.118,00;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 10 Program, 22 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.338.837.513,00;
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari 3 Program, 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.177.744.099,00.

**Tabel 5**  
**Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.016.199.879,00
2	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40.755.177.153,00
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	17.768.659.121,00
4	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	13.083.710.298,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.846.103.118,00

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.338.837.513,00
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	3.177.744.099,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.986.431.181,00</b>

#### 7.2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan pilihan ditetapkan sebanyak 41 Program, 94 Kegiatan dan 242 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.334.891.802,00 pada 2 (dua) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri dari:

- Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari 23 Program, 56 Kegiatan dan 139 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.309.271.378,00;
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 18 Program, 38 Kegiatan dan 103 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.025.620.424,00;

**Tabel 6**  
**Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN	34.309.271.378,00
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	21.025.620.424,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.334.891.802,00</b>

#### 7.2.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pendukung urusan pemerintahan ditetapkan sebanyak 100 Program, 303 Kegiatan dan 807 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.317.898.148,00 pada 12 (dua belas) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu terdiri dari:

- Sekretariat Daerah terdiri dari 8 Program, 37 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.135.291.521,00;
- Sekretariat DPRD terdiri dari 4 Program, 28 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.647.686.618,00;
- Kecamatan Siantan terdiri dari 8 Program, 27 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.151.738.849,00;
- Kecamatan Jemaja terdiri dari 8 Program, 24 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.836.946.860,00;
- Kecamatan Palmatak terdiri dari 8 Program, 22 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.348.088.945,00;
- Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 4 Program, 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.399.753.958,00;

- g. Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari 9 Program, 25 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.927.471.357,00;
- h. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari 10 Program, 25 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.579.954.869,00;
- i. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 12 Program, 29 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.642.865.185,00;
- j. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 9 Program, 23 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.482.337.338,00;
- k. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 8 Program, 24 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.814.107.023,00; dan
- l. Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 12 Program, 29 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.351.655.625,00.

**Tabel 7**  
**Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	60.135.291.521,00
2	SEKRETARIAT DPRD	35.647.686.618,00
3	KECAMATAN SIANTAN	7.151.738.849,00
4	KECAMATAN JEMAJA	6.836.946.860,00
5	KECAMATAN PALMATAK	5.348.088.945,00
6	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	4.399.753.958,00
7	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	2.927.471.357,00
8	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	3.579.954.869,00
9	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	3.642.865.185,00
10	KECAMATAN SIANTAN UTARA	2.482.337.338,00
11	KECAMATAN JEMAJA BARAT	2.814.107.023,00
12	KECAMATAN KUTE SIANTAN	4.351.655.625,00
	<b>Jumlah</b>	<b>139.317.898.148,00</b>

#### 7.2.4.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 6 Program, 23 Kegiatan dan 87 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.467.645.819,00.

**Tabel 8**  
**Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH	13.467.645.819,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.467.645.819,00</b>

#### 7.2.4.6. Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur perencanaan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 8 Program, 29 Kegiatan dan 113 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.345.799.146,00.

**Tabel 9**  
**Anggaran Unsur Perencanaan Urusan Pemerintah**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH	13.345.799.146,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.345.799.146,00</b>

#### 7.2.4.7. Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur keuangan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 8 Program, 27 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.698.130.062,00.

**Tabel 10**  
**Anggaran Unsur Keuangan Urusan Pemerintah**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	229.698.130.062,00
<b>Jumlah</b>		<b>229.698.130.062,00</b>

#### 7.2.4.8. Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur kepegawaian urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 6 Program, 21 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.569.332.112,00.

**Tabel 11**  
**Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.569.332.112,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.569.332.112,00</b>

#### 7.2.4.9. Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur penghubung urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, ditetapkan sebanyak 4 Program, 18 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.239.530.497,00.

**Tabel 12**  
**Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah**

No	SKPD	Anggaran Belanja
1	2	3
1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	3.239.530.497,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.239.530.497,00</b>

#### 7.2.4.10. Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Adapun proporsi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 bila diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**



### 7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2023 dan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023. Pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di Tahun 2023. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut.

**Tabel 13**  
**Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>1.149.685.355.791,00</b>	<b>998.370.281.042,73</b>	<b>86,84</b>	<b>824.553.991.952,51</b>
2					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	41.958.839.490,00	29.362.242.093,73	69,98	29.686.658.850,51
4	PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.107.726.516.301,00	969.008.038.949,00	87,48	783.315.186.389,00
5	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	0,00	0,00	0,00	11.552.146.713,00
6					
7	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.250.230.911.389,00</b>	<b>980.270.183.929,64</b>	<b>78,41</b>	<b>865.767.979.709,20</b>
8					
9	BELANJA OPERASI	803.457.038.265,00	683.833.368.630,64	85,11	640.801.958.959,20
10	BELANJA MODAL	251.278.933.169,00	184.291.542.980,00	73,34	120.401.935.455,00
11	BELANJA TAK TERDUGA	68.799.839.255,00	0,00	0,00	0,00
12	BELANJA TRANSFER	126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52	104.564.085.295,00
13					
14	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.250.230.911.389,00</b>	<b>980.270.183.929,64</b>	<b>78,41</b>	<b>865.767.979.709,20</b>
15					
16	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(100.545.555.598,00)</b>	<b>18.100.097.113,09</b>	<b>(18,00)</b>	<b>(41.213.987.756,69)</b>
17					
18	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>100.545.555.597,00</b>	<b>5.849.631.846,57</b>	<b>5,82</b>	<b>48.198.574.587,26</b>
19					
20	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.545.555.597,00	7.849.631.846,59	7,65	49.198.574.587,26
21	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
22					
23	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>100.545.555.597,00</b>	<b>5.849.631.846,59</b>	<b>5,82</b>	<b>48.198.574.587,26</b>
24					
25	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984.586.830,57</b>

Pada bagian pendapatan terealisasi sebesar Rp998.370.281.042,73 dari target yang direncanakan sebesar Rp1.149.685.355.791,00 atau 86,84%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp980.270.183.929,64 dari target yang direncanakan sebesar Rp1.250.230.911.389,00 atau 78,41%. Akibat dari tercapainya beberapa item pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami surplus sebesar Rp18.100.097.113,09 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp100.545.555.597,00. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 adalah sebesar Rp5.849.631.846,59 bila dibandingkan dengan target TA 2023 sebesar Rp100.545.555.597,00 atau 5,82%. Dengan Tercapainya beberapa anggaran pendapatan

dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

### **7.3.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

#### **7.3.3.1. Pendapatan**

Jumlah Pendapatan yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.149.685.355.791,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp998.370.281.042,73 atau sebesar 86,84%.

Pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023. terdapat beberapa kendala dalam penerimaan pada beberapa jenis pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp41.958.839.490,00 dan yang terealisasi sebesar Rp29.362.242.093,73 atau sebesar 69,98% yang disebabkan menurunnya penerimaan pendapatan atas target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023.
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Kepulauan Riau) yang ditargetkan sebesar Rp1.107.726.516.301,00 dan yang terealisasi sebesar Rp969.008.038.949,00 atau sebesar 87,48% dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik dalam penyerapan anggaran yang diterima dari pusat. dan tepat waktu pelaporan ke Kementerian Keuangan RI akan taatnya Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku akan tetapi ada beberapa kendala lain yaitu pengurangan Penyaluran penundaan transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak tercapainya target pendapatan transfer.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

#### **7.3.3.2. Belanja**

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.250.230.911.389,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp980.270.183.929,64 atau sebesar 78,41%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pada kelompok yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp803.457.038.265,00 dan terealisasi sebesar Rp683.833.368.630,64 atau sebesar 85,11%;
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp251.278.933.169,00 dan terealisasi sebesar Rp184.291.542.980,00 atau sebesar 73,34%;
- c. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp68.799.839.255,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%;
- d. Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp126.695.100.700,00 dan terealisasi sebesar Rp112.145.272.319,00 atau sebesar 88,52%.

#### **7.3.3.3. Surplus/Defisit**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2023, saat penganggaran mengalami defisit atas belanja daerah yang dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp100.545.555.597,00 dan pada saat sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami surplus sebesar Rp18.100.097.113,09 atau sebesar 18,00%.

**7.3.3.4. Pembiayaan Daerah Netto**

Pembiayaan Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.545.555.597,00 dan terealisasi sebesar Rp5.849.631.846,59 atau sebesar 5,82% yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp102.545.555.597,00 dan terealisasi sebesar Rp7.849.631.846,59 atau sebesar 7,65% yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun lalu sebesar Rp6.984.586.830,57 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah atas Pokok Dana Bergulir sebesar Rp865.045.016,02.
- b. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% diperuntukan pada pembiayaan dana bergulir bagi masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

**7.3.3.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68.

## 7.4. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

### 7.4.2. Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabungkan dan/atau dikonsolidasikan di entitas pelaporan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023. Berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 7.4.3. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023, meliputi 34 (tiga puluh empat) SKPD yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah yang mencakup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 9 (sembilan) Bagian;
2. Sekretariat DPRD mencakup DPRD;
3. Inspektorat;
4. 14 (empat belas) Dinas yang mencakup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

5. 1 (satu) Satuan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
6. 6 (enam) Badan yang mencakup Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah termasuk didalamnya SKPKD-PPKD, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
7. 10 (sepuluh) Kecamatan yang mencakup Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

#### **7.4.4. Prosedur Konsolidasian**

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

## 7.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 7.5.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

### 7.5.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. mengimplementasikan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut melanjutkan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah berbasis akruaI.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2023 telah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2023 adalah merupakan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pengakuan (*recognition*) dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

#### **7.5.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### **7.5.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan**

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
  - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
  - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
  - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
  - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
  - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

- 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD.
- d. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
  - 1) Aset;
  - 2) Kewajiban;
  - 3) Ekuitas;
  - 4) Pendapatan-LRA;
  - 5) Belanja;
  - 6) Transfer;
  - 7) Pembiayaan;
  - 8) Saldo Anggaran Lebih;
  - 9) Pendapatan-LO;
  - 10) Beban; dan
  - 11) Arus Kas
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

#### 7.5.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD.

- a. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat:
- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
  - a. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
  - b. Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah
- 5) Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- 6) Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- 7) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum

Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.

- 8) Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pendapatan-LO diakui apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retrisbusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Perda/Pergub/Perbup) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

#### Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur sebesar nominal bukti penerimaan dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengukuran Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- d. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.
- e. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
  - a) Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
  - b) Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
- f. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- g. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam Surat Ketetapan dimaksud. Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, PERPRES tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.
- h. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa Surat Ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan bersamaan dengan Pendapatan-LRA dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/BUD tanpa penetapan);

- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi; dan
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA-LO adalah:
  - a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu

#### 7.5.4.3. Akuntansi Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Belanja dan beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan organisasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga

Belanja dan Beban diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui penerbitan SP2D LS untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat SP2D GU/GUNihil/TU-Nihil terbit.
- c. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, BOS, JKN belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah, BOS, JKN dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
 Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset  
 Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
  - 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah; dan
  - 2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  
 Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
- d. Timbulnya kewajiban  
 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu
- a) Belanja Operasi;
  - b) Belanja Modal;
  - c) Belanja Tak Terduga;
  - d) Belanja Transfer.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
- d. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK dan tidak diakui sebagai beban operasional.
- e. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
- f. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Penjelasan kejadian luar biasa.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- g. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO), Rincian dan Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  - 2) Akun luar biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/Defisit dari kegiatan Non-Operasional.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

e) Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

#### 7.5.4.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

##### Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat terjadinya penerimaan kas Daerah.
- b. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
- c. Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas ke RKUD.
- d. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer.
- e. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi.
- f. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas keluar aktivitas operasi.
- g. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- h. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.
- i. Untuk kepentingan penyajian belanja transfer pada penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.
- j. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka dan dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
- k. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

##### Pengukuran

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang sah.

- c. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- d. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

#### Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
  - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu

#### 7.5.4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun

- belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- d. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - e. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pengukuran

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- d. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran.

#### Pengungkapan

- a. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
  - a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
  - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 7.5.4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

#### Pengakuan

- a. Kas dan setara kas diakui pada saat:
  - a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
  - b) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
- b. Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a) Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
  - b) Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran
  - c) Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- d) Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
- e) Penerimaan daerah lainnya, antara lain penenmaan perhitungan pihak ketiga.
- c. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:
  - a) Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran.
  - b) Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah.
  - c) Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
  - d) Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga
- d. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penenmaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang ditransfer ke RKUD.
- e. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara penerimaan.
- f. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUD untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke RKUD. Contoh: pendapatan daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena suatu hal, belum dilimpahkan ke RKUD.
- g. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
  - a) Belanja daerah yang telah di-SPJ-kan.
  - b) Penyetoran uang pengembalian belanja UP/ GU /TU dan/ atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, dan
  - c) Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN
- h. Saldo kas di bendahara pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
  - a) Transfer uang persediaan/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD.
  - b) Penerimaan uang pengembalian belanja.
  - c) Penerimaan jasa giro; dan
  - d) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
- i. Uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran.
- j. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- k. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- l. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka Waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

- m. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### Pengukuran

- a. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
- Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
  - Rincian dan nilai kas lainnya termasuk Dana BOS yang disajikan dalam laporan keuangan
- c. Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- d. Kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Kas BLUD mengungkapkan sejumlah dana operasional BLUD yang telah digunakan namun belum dapat disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran karena belum dilakukan pengesahan ke BUD.
- f. Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam CaLK, mengungkapkan:
- Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
  - Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah.
  - Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.
  - Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti yang belum dipertanggungjawabkan.
  - Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya (bila ada).
  - Selisih kas (bila ada).
  - Rincian setara kas termasuk jenis dan jangka.

#### 7.5.4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu

tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

#### Pengakuan

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
  - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
  - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
  - b) Jumlah piutang dapat diukur.
  - c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
  - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- c. Pengakuan Piutang Pajak:
  - a) Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
  - b) Saldo Piutang Pajak diakui berdasarkan nilai tagihan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Kepulauan Anambas dikurangi dengan tagihan yang telah dibayar oleh wajib pajak.
  - c) Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- d. Pengakuan Piutang:
  - a) Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan menggunakan karcis.
  - b) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
  - c) Piutang Retribusi diakui ketika wajib bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
  - d) Penarikan pendapatan dengan menggunakan sistem karcis merupakan bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena penetapannya diakui pada saat karcis tersebut “terjual” kepada masyarakat (wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis. Karcis yang telah diporporasi dan masih dipegang oleh juru pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi.
  - e) Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

- e. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.
- f. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- g. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- h. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- i. Piutang transfer lainnya diakui:
  - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima
  - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- j. Piutang Bagi Hasil dari provinsi apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- k. Piutang transfer antar daerah apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- l. Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- m. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- n. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran dari piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

#### Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebesar nilai penetapan yang diterbitkan oleh fungsi penetapan di SKPD. Besaran nilai penetapan didasarkan atas tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dikurangi dengan diskon atau potongan pendapatan. Dengan kata lain, Piutang Pendapatan disajikan secara netto.

- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- d) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan perjanjian, adalah sebagai berikut:
  - a) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
  - e) Transaksi dibayar di muka  
Dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.  
Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan transfer yang berlaku
  - b) Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
  - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- e. Dalam hal piutang atas objek pajak menjadi barang bukti atas kasus perdata atau pidana maka kualitas piutang menjadi macet.
- f. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Piutang disajikan dan diungkapkan dalam neraca. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
  - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
  - Penjelasan atas penyelesaian piutang.
  - Jaminan atau sita jaminan jika ada.
  - Informasi lainnya yang dianggap penting.
- b. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- c. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- d. Terhadap kejadian adanya kelebihan pembayaran piutang maka dilakukan pengembalian dengan mencatat:
- Mengurangi akun kas dan menambah akun Piutang.
  - Mengurangi akun belanja yang digunakan untuk pengembalian kelebihan piutang dan akun Perubahan SAL.

#### 7.5.4.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*) direklas ke aset lain-lain berdasarkan berita acara reklasifikasi dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi.

#### Pengakuan

- Persediaan diakui:
  - pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- b) pada saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- c. Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (stock opname) atas sisa persediaan yang dimiliki secara berkala. Setelah stock opname, dilakukan rekonsiliasi atas saldo persediaan dengan fungsi akuntansi di PPK-SKPD hingga diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset yang ditandatangani oleh PPK-SKPD dan P3B. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset, PPK-SKPD menerbitkan Memo Beban untuk mengakui beban persediaan tersebut.
- d. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
- e. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan hasil *stock opname*, selisih tersebut diperlakukan sebagai Defisit Penghapusan Aset Lancar. Batasan materialitas atas persediaan adalah jika nilai selisih persediaan sebesar lebih dari 50% dari total nilai persediaan.
- f. Jika ditemukan beberapa persediaan barang yang masuk dalam kategori aset tetap ekstrakomptabel, maka Pengurus Barang melakukan koreksi pada saat stock opname, dengan mengurangi nilai Persediaan dan membebankannya pada Beban Persediaan.
- g. Jika terdapat retur atas persediaan, pengakuan atas retur tersebut bergantung pada jenis ganti rugi atas retur yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketentuan terkait retur adalah sebagai berikut:
- Pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa diakui sebagai pengurang persediaan dan beban (jika atas persediaan tersebut telah dibebankan di Laporan Operasional). Atas pengembalian persediaan kepada pihak penyedia barang dan jasa yang tidak dimintakan penggantian berupa barang, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan penagihan untuk meminta pengembalian kas yang telah dibayarkan.
  - Jika pengembalian persediaan kepada pihak ketiga berupa barang yang tidak sejenis dan berdampak pada penerimaan kas, maka dilakukan penjurnalan dengan menghapus persediaan yang lama dan menggantinya dengan yang baru serta menerima pengembalian kas. Kas yang diterima atas pengembalian retur tersebut disetorkan ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).
  - Jika atas barang persediaan yang diretur tidak dilakukan penggantian dalam bentuk barang, maka Bendahara Pengeluaran meminta pengembalian dana atas pembelian persediaan dan menyetorkan penerimaan kas atas dana tersebut ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang belanja (kontra pos).
- h. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan.
- i. Persediaan diakui sebagai:
- Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.
  - Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

#### Pengukuran

- a. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode:
  - a) Masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah First In First Out (FIFO), merupakan Metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama.
  - b) Rata-rata atau yang dikenal dengan istilah *Average*, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga barang secara rata-rata selama periode Pelaporan.
  - c) Harga perolehan terakhir, merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.
- b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.
- c. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- e. Persediaan disajikan sebesar:
  - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b) Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- f. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode first in first out (FIFO). Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.
- g. Pembukuan atas persediaan terdiri dari:
  - a) Buku penerimaan persediaan.
  - b) Buku pengeluaran persediaan.
  - c) Buku penyaluran persediaan.
  - d) Kartu barang persediaan; dan
  - e) Daftar persediaan rusak atau usang.
- h. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- i. Nota permintaan persediaan sebagaimana diajukan kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.
- j. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) atas persediaan yang dilakukan oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b. Persediaan rusak atau usang dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

- c. Mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan rusak atau usang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengungkapan untuk Persediaan di dalam Laporan Keuangan antara lain:
  - a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
  - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
    - 1. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
    - 2. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### 7.5.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. Investasi Jangka Pendek  
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang  
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
  - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

#### Pengakuan

- a. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul

- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- b. Pada kondisi tertentu dimungkinkan terjadi perubahan status SKPD menjadi BUMD yang berdampak pada adanya transfer aset berupa barang dari SKPD kepada BUMD (inbreg). Inbreg aset tersebut menjadi salah satu bentuk penyertaan modal pemerintah kepada BUMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah penyertaan modal, untuk kemudian diakui sebagai Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal. Jika proses aset ini dalam proses penyelesaian, maka perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Hal ini diperlukan sebagai bentuk penyajian yang jujur dan memenuhi prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- c. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
  - Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
  - Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
  - Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
  - Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

#### Pengukuran

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyekproyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- i. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- j. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- k. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- l. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:
  - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
  - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
  - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
  - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
  - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
  - f) Perubahan pos investasi; dan
  - g) Penghapusbukuan investasi permanen dan nonpermanen.

#### 7.5.4.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya

#### a. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya

- tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.
- b. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
  - c. **Perolehan Secara Gabungan**  
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  - d. **Pertukaran Aset**  
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
  - e. **Aset Donasi**  
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
  - f. **Kapitalisasi Aset Tetap**
    - 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.
    - 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya
    - 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
  - g. **Pengeluaran Setelah Perolehan Awal**  
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
  - h. **Penambahan masa manfaat**  
Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
  - i. **Aset Bersejarah**  
Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
  - j. **Penghentian dan Pelepasan**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **7.5.4.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

##### **Pengakuan**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
  - c) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
  - d) Jasa konsultansi yang dalam proses memperoleh aset tetap dimaksud pada tahun berjalan namun fisik atas aset tersebut belum selesai sampai tanggal pelaporan maka jasa konsultansi perencanaan tersebut dapat dicatat/disajikan ke dalam akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dibawah 4 (empat) Tahun. Namun jika fisik/konstruksi aset tetap tersebut belum selesai lebih dari masa 4 (empat) tahun maka jasa konsultansi tersebut dapat direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya (aset tak berwujud).
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan/direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; dan
  - c. Diterbitkannya BAPP/ PHO oleh Pengguna Anggaran/ PPKom.
- e. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- f. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi dan disiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BAST). Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- h. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- i. DED yang merupakan bagian dari Belanja Modal dan sudah terealisasi sedangkan konstruksi aset tetap belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan jika DED dihasilkan dari Belanja Jasa Konsultasi, dan konstruksinya dari Belanja Modal namun belum terealisasi maka DED dicatat dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan.

#### Pengukuran

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang dipengaruhi oleh metode perolehan yang digunakan dalam proses konstruksi tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak konstruksi.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi serta biaya penyewaan sarana dan perlengkapan.
  - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain meliputi asuransi, biaya rancangan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
  - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
  - b) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan.
  - c) Biaya penyewaan sarana dan prasarana.
  - d) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - a) Asuransi.
  - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
  - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Sisa bahan pasca konstruksi yang dilakukan secara swakelola dan masih dapat digunakan kembali, maka akan dicatat sebagai persediaan dan mengurangi nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar nilai material yang tersisa.
- f. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
  - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
  - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- g. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya

ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah mencakup keduanya.

- i. Klaim pembayaran atas kontrak konstruksi dapat terjadi dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut akan mempengaruhi biaya yang dapat diatribusikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- j. Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca.
- b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
  - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
  - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
  - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e) Retensi
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.
- d. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberikan gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

#### 7.5.4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

#### Pengakuan

- a. Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersamaan dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- d. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- f. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan diakui sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO.
- g. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- h. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:
  - a) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran, dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b) Pada saat penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan.
- i. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

#### Pengukuran

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
- c. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada Kelompok Aset Non Lancar
- b. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah
- c. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya
- d. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebagai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
- e. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Penerimaan Pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan
- f. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas masuk dari aktivitas investasi. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi
- g. Pengungkapan informasi mengenai Dana Cadangan pada akhir periode akuntansi, meliputi
  - 1) Rincian jenis Dana Cadangan dan dasar hukumnya
  - 2) Nilai atau besaran pembentukan, jangka waktu, sumber pendanaan, dan tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan untuk setiap jenis dana cadangan
  - 3) Tujuan pembentukan setiap jenis Dana Cadangan
  - 4) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari setiap jenis Dana Cadangan; dan
  - 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 7.5.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana

cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

#### Pengakuan

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- a. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa pemerintah secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Kepala Daerah. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.
  - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah  
Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan tuntutan kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya.
- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- e. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- f. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status

penggunaan setelah adanya perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- g. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- h. Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah.
- i. Dalam hal penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terdapat selisih lebih antara nilai wajar dengan nilai buku kemitraan dengan pihak ketiga, maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan.
- j. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

#### Pengukuran

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- a. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:
  - a) Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga
  - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian
  - c) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS  
BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
  - d) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS  
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset yang dikerjasamakan atau kemitraan dengan pihak ketiga selain tanah harus disusutkan selama masa kerjasama dan disajikan dalam Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Aset Lain-lain disajikan dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor

yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### 7.5.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek  
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### Pengakuan

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- d. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)  
Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.
  - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)  
sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
  - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)  
Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya.
  - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)  
adalah kejadian-kejadian yang tidak didasari pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena Pemerintah Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

- e. Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai, barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.
- f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Kejadian yang diakui oleh pemerintah daerah ini dicatat sebagai kewajiban ketika memenuhi dua kriteria yaitu:
  - a) Badan Legislatif telah menyetujui sumber daya yang akan digunakan
  - b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

#### Pengukuran

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- d. Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- e. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari:
  - c) Tagihan Penjualan Angsuran  
Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari:
  - e) Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga
  - f) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian
  - g) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS  
BSG dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
  - h) Kerjasama Bangun Guna Serah-BGS  
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset tetap yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- a. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

- b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Utang Pinjaman Jangka Pendek disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Utang Pinjaman Jangka Pendek diungkapkan dalam CaLK.
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.
- f. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/ akun Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan dalam CaLK.
- h. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

#### 7.5.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas
- b. Ekuitas SAL  
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan  
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

- a. Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

- a. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Penurunan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### 7.5.4.16. **Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)**

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang  
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan  
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.  
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
  
2. Kesalahan berulang  
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.  
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

#### 7.5.4.17. **Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- a. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- d. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

#### Penyajian

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
- d. Dalam Kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

## 7.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 7.6.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak melakukan Perubahan atas APBD dikarenakan tidak adanya kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan APBD-P yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, namun hanya mengadakan pergeseran APBD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati, hal ini disebabkan adanya target penerimaan yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga perlu adanya perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka penghematan belanja pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing jenis laporan keuangan disajikan sebagai berikut:

#### 7.6.1.1. PENDAPATAN - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kode Akun Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek.

Kelompok Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 14**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	41.958.839.490,00	29.362.242.093,73	69,98	(12.596.597.396,27)	29.686.658.850,51

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Pendapatan Transfer – LRA	1.107.726.516.301,00	969.008.038.949,00	87,48	(138.718.477.352,00)	783.315.186.389,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.146.713,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.149.685.355.791,00</b>	<b>998.370.281.042,73</b>	<b>86,84</b>	<b>(151.315.074.748,27)</b>	<b>824.553.991.952,51</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.149.685.355.791,00 terealisasi sebesar Rp998.370.281.042,73 atau 86,84% mengalami kenaikan sebesar Rp173.816.289.090,22 atau sebesar 21,08% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp824.553.991.952,51. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp29.362.242.093,73, Pendapatan Transfer sebesar Rp969.008.038.949,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00. Masing-masing anggaran dan realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 7.6.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 15**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Pajak Daerah	22.559.538.746,00	16.310.773.757,00	72,30	(6.248.764.989,00)	15.965.570.313,97
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.650.745.981,00	7.134.834.674,00	153,41	2.484.088.693,00	3.984.032.171,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1.596.888.717,00	121,16	278.868.954,00	1.623.626.298,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	13.430.535.000,00	4.319.744.945,73	32,16	(9.110.790.054,27)	8.113.430.067,54
<b>JUMLAH</b>		<b>41.958.839.490,00</b>	<b>29.362.242.093,73</b>	<b>69,98</b>	<b>(12.596.597.396,27)</b>	<b>29.686.658.850,51</b>

Tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.958.839.490,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.362.242.093,73 atau 69,89% mengalami penurunan sebesar Rp324.416.756,78 atau 1,09% dibandingkan realisasi dari TA 2022 sebesar Rp29.686.658.850,51. Masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian sebagai berikut:

#### 7.6.1.1.1.1. Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	3.473.022.095,00	4.180.998.324,00	120,39	707.976.229,00	1.517.413.293,97
2	Pajak Restoran	11.572.998.115,00	8.394.722.978,00	72,54	(3.178.275.137,00)	10.751.102.941,00
3	Pajak Hiburan	173.509.307,00	68.345.250,00	39,39	(105.164.057,00)	63.443.530,00
4	Pajak Reklame	79.500.000,00	14.509.300,00	18,25	(64.990.700,00)	15.769.200,00
5	Pajak Penerangan Jalan	5.450.590.066,00	2.551.351.688,00	46,81	(2.899.238.378,00)	2.496.656.000,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	68.244.163,00	4.500.000,00	6,59	(63.744.163,00)	4.500.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan	639.975.000,00	155.490.397,00	24,30	(484.484.603,00)	88.368.889,00
8	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	545.200.000,00	431.488.704,00	79,14	(113.711.296,00)	408.884.276,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	556.500.000,00	509.367.116,00	91,53	(47.132.884,00)	619.432.184,00
<b>JUMLAH</b>		<b>22.559.538.746,00</b>	<b>16.310.773.757,00</b>	<b>72,30</b>	<b>(6.248.764.989,00)</b>	<b>15.965.570.313,97</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.559.538.746,00 terealisasi sebesar Rp16.310.773.757,00 atau 72,30% dan mengalami kenaikan sebesar Rp345.203.443,03 atau sebesar 2,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.965.570.313,97.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2011 sudah melaksanakan Perda PBB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebelum dimulainya perda PBB/pemungutan PBB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki saldo piutang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan Pelayanan PBBP2 Nomor: BA-55/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan. Data Piutang PBBP2 dan Aset Sitaan Nomor BA-58/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang selaku Pihak Pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Pihak Kedua.

Terdapat dua metode pembayaran pajak daerah yaitu metode *self assessment* dan *official assessment*. Perhitungan pajak dengan *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Metode perhitungan *self assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan. Metode perhitungan *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Metode perhitungan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **7.6.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Hotel**

Pendapatan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 17**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	3.473.022.094,00	4.180.998.324,00	120,39	707.976.229,00	1.517.413.293,97
<b>JUMLAH</b>		<b>3.473.022.094,00</b>	<b>4.180.998.324,00</b>	<b>120,39</b>	<b>707.976.229,00</b>	<b>1.517.413.293,97</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.473.022.094,00 terealisasi sebesar Rp4.180.998.324,00 atau 120,39%. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.663.585.030,03 atau sebesar 175,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.517.413.293,97. Kenaikan tersebut disebabkan kondisi *new normal* atas *Pandemic Corona Virus* (Covid-19) sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan intensitas jumlah tamu yang menginap bertambah.

#### 7.6.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.572.998.115,00	1.035.685.114,00	8,95	(10.537.313.001,00)	794.295.248,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	214.060.885,00	100,00	214.060.885,00	171.749.508,00
3	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	556500	100,00	556.500,00	1.659.100,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	74.622.980,00	100,00	74.622.980,00	64.818.986,00
5	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	7.069.797.499,00	100,00	7.069.797.499,00	9.718.580.099,00
<b>JUMLAH</b>		<b>11.572.998.115,00</b>	<b>8.394.722.978,00</b>	<b>72,54</b>	<b>(3.178.275.137,00)</b>	<b>10.751.102.941,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.572.998.115,00 terealisasi sebesar Rp8.394.722.978,00 atau 72,54% dan mengalami penurunan sebesar Rp2.356.379.963,00 atau sebesar 21,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.751.102.941,00. Penurunan pajak restoran dikarenakan menurunnya realisasi dibandingkan dengan tahun lalu yaitu pada pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.

### 7.6.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hiburan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Diskotik. Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya	173.509.307,00	60.067.250,00	34,62	(113.442.057,00)	53.579.530,00
2	Panti Pijat. Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	8.278.000,00	100,00	8.278.000,00	7.864.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>173.509.307,00</b>	<b>68.345.250,00</b>	<b>39,39</b>	<b>(105.164.057,00)</b>	<b>63.443.530,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.509.307,00 terealisasi sebesar Rp68.345.250,00 atau 39,39% dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.901.720,00 atau sebesar 7,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.443.530,00.

### 7.6.1.1.1.4. Pendapatan Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Reklame yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 20**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame Papan/Bill Board/Wideotron/ Megatron	79.500.000,00	14.509.300,00	18,25	(64.990.700,00)	15.769.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>79.500.000,00</b>	<b>14.509.300,00</b>	<b>18,25</b>	<b>(64.990.700,00)</b>	<b>15.769.200,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.500.000,00 terealisasi sebesar Rp14.509.300,00 atau 18,25% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.259.900,00 atau sebesar 7,99% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.769.200,00.

#### 7.6.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Penerangan Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 21**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	2.551.351.688,00	100,00	960.454.983,00	2.351.609.249,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.450.590.066,00	0,00	0,00	0,00	145.046.751,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.450.590.066,00</b>	<b>2.551.351.688,00</b>	<b>46,81</b>	<b>(2.899.238.378,00)</b>	<b>2.496.656.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.450.590.066,00 terealisasi sebesar Rp2.551.351.688,00 atau 46,81% dan mengalami kenaikan sebesar Rp54.695.688,00 atau sebesar 2,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.496.656.000,00.

#### 7.6.1.1.1.6. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Sarang Burung Walet	68.244.163,00	4.500.000,00	6,59	(63.744.163,00)	4.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>68.244.163,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>6,59</b>	<b>(63.744.163,00)</b>	<b>4.500.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.244.163,00 terealisasi sebesar Rp4.500.000,00 atau 6,99 %. Saldo tersebut tetap/tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.500.000,00.

#### 7.6.1.1.1.7. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 23**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasir dan Krikil	0,00	74.548,00	100,00	74.548,00	0,00
2	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	639.975.000,00	155.415.849,00	24,28	(484.559.151,00)	88.368.889,00
<b>JUMLAH</b>		<b>639.975.000,00</b>	<b>155.490.397,00</b>	<b>24,30</b>	<b>(484.484.603,00)</b>	<b>88.368.889,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp639.975.000,00 terealisasi sebesar Rp155.490.397,00 atau 24,30% dan mengalami kenaikan sebesar Rp484.484.603,00 atau sebesar 75,96% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.368.889,00.

#### 7.6.1.1.1.8. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 24**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan)	545.200.000,00	431.488.704,00	79,14	(113.711.296,00)	408.884.276,00
<b>JUMLAH</b>		<b>545.200.000,00</b>	<b>431.488.704,00</b>	<b>79,14</b>	<b>(113.711.296,00)</b>	<b>408.884.276,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp545.200.000,00 terealisasi sebesar Rp431.488.704,00 atau 79,14% dan mengalami peningkatan sebesar Rp22.604.428,00 atau 5,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp408.884.276,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan ketetapan PBBP2 setelah cetak masal yang merupakan Wajib Pajak Baru dan adanya mutasi PBBP2.

#### 7.6.1.1.1.9. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pendapatan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan BPHTB dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut.

**Tabel 25**  
**Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	BPHTB - Pemindehan Hak	0,00	145.419.380,00	100,00	145.419.380,00	0,00
2	BPHTB - Pemberian Hak Baru	556.500.000,00	363.947.736,00	65,40	(192.552.264,00)	619.432.184,00
<b>JUMLAH</b>		<b>556.500.000,00</b>	<b>509.367.116,00</b>	<b>91,53</b>	<b>(47.132.884,00)</b>	<b>619.432.184,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan BPHTB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp556.500.000,00 terealisasi sebesar Rp509.367.116,00 atau 91,53% dan mengalami penurunan sebesar Rp110.065.068,00 atau sebesar 17,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp619.432.184,00.

#### 7.6.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 26**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	4.328.111.466,00	6.822.245.472,00	157,63	2.494.134.006,00	3.840.289.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	272.634.515,00	16.500.000,00	6,05	(256.134.515,00)	11.368.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	296.089.202,00	592,18	246.089.202,00	132.374.671,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.650.745.981,00</b>	<b>7.134.834.674,00</b>	<b>153,41</b>	<b>2.484.088.693,00</b>	<b>3.984.032.171,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.650.745.981,00 terealisasi sebesar Rp7.134.834.674,00 atau sebesar 153,41% dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.150.802.503,00 atau sebesar 79,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.984.032.171,00. Kenaikan tersebut terjadi karena meningkatnya atas pendapatan retribusi jasa umum pada

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tahun 2023 terdapat penambahan dokter spesialis pada RSUD Palmatak dan RSUD Tarempa, sehingga pasien-pasien yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut seperti operasi tidak lagi memerlukan rujukan ke luar daerah seperti ke Batam, Tanjungpinang ataupun Jakarta (Dinas kesehatan bisa mengajukan klaim atas jasa pelayanan tersebut). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 7.6.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 27**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.248.111.466,00	6.450.166.852,00	151,84	2.202.055.386,00	3.439.425.900,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00	54.408.000,00	68,01	(25.592.000,00)	75.755.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	317.670.620,00	100,00	317.670.620,00	325.108.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.328.111.466,00</b>	<b>6.822.245.472,00</b>	<b>157,63</b>	<b>2.494.134.006,00</b>	<b>3.840.289.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.328.111.466,00 terealisasi sebesar Rp6.822.245.472,00 atau 157,63%. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.981.955.972,00 atau sebesar 77,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.840.289.500,00.

#### 7.6.1.1.2.1.1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 28**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	299.396.452,00	100,00	299.396.452,00	281.022.500,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.248.111.466,00	6.150.770.400,00	144,79	1.902.658.934,00	3.158.403.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.248.111.466,00</b>	<b>6.450.166.852,00</b>	<b>151,84</b>	<b>2.202.055.386,00</b>	<b>3.439.425.900,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.248.111.466,00 terealisasi sebesar Rp6.450.166.852,00 atau 151,84% dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.010.740.952,00 atau sebesar 87,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.439.425.900,00.

#### 7.6.1.1.2.1.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 29

#### Anggaran dan Realisasi Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00	54.408.000,00	68,01	(25.592.000,00)	75.755.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>80.000.000,00</b>	<b>54.408.000,00</b>	<b>68,01</b>	<b>(25.592.000,00)</b>	<b>75.755.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.408.000,00 atau 68,01%. Mengalami penurunan sebesar Rp21.347.000,00 atau sebesar 28,18% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.755.000,00.

#### 7.6.1.1.2.1.3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Pasar dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 30**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Los	0,00	77.282.820,00	100,00	77.282.820,00	80.598.760,00
2	Retribusi Kios	0,00	240.387.800,00	100,00	240.387.800,00	244.509.840,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>317.670.620,00</b>	<b>100,00</b>	<b>317.670.620,00</b>	<b>325.108.600,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp317.670.620,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.437.980,00 atau sebesar 2,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp325.108.600,00.

#### 7.6.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat satu retribusi yaitu sebagai berikut.

**Tabel 31**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	252.634.515,00	0,00	0,00	(252.634.515,00)	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	16.500.000,00	82,50	(3.500.000,00)	11.368.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>272.634.515,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>6,05</b>	<b>(256.134.515,00)</b>	<b>11.368.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp272.634.515,00 terealisasi sebesar Rp16.500.000,00 atau sebesar 6,05% dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.132.000,00 atau sebesar 45,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.368.000,00.

#### 7.6.1.1.2.2.1. Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah . Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 32**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	252.634.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>252.634.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp252.634.515,00 dan tidak terealisasi.

#### 7.6.1.1.2.2.2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Jasa Kepelabuhan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 33**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	16.500.000,00	82,50	3.500.000,00	11.368.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>82,50</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>11.368.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp16.500.000,00 atau 82,50 % dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.132.000,00 atau sebesar 45,14% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.368.000,00.

#### 7.6.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap

kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 34**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih /(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	296.089.202,00	592,18	246.089.202,00	132.374.671,00
<b>JUMLAH</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>296.089.202,00</b>	<b>592,18</b>	<b>246.089.202,00</b>	<b>132.374.671,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp296.089.202,00 atau 592,18% dan mengalami peningkatan sebesar Rp163.714.531,00 atau sebesar 123,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.374.671,00.

#### 7.6.1.1.2.3.1. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 35**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	296.089.202,00	592,18	246.089.202,00	132.374.671,00
<b>JUMLAH</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>296.089.202,00</b>	<b>592,18</b>	<b>246.089.202,00</b>	<b>132.374.671,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp296.089.202,00 atau 592,18% dan mengalami peningkatan sebesar Rp163.714.531,00 atau sebesar 123,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.374.671,00.

#### 7.6.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri Syariah. Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 36**  
**Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.318.019.763,00	1.596.888.717,00	121,16	278.868.954,00	1.623.626.298,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.318.019.763,00</b>	<b>1.596.888.717,00</b>	<b>121,16</b>	<b>278.868.954,00</b>	<b>1.623.626.298,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.318.019.763,00 terealisasi sebesar Rp1.596.888.717,00 atau sebesar 121,16% merupakan pembagian laba hasil rapat umum pemegang saham tahun 2022 atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri Syariah. Mengalami penurunan sebesar Rp26.737.581,00 atau sebesar 1,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.623.626.298,00.

#### 7.6.1.1.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Pendapatan dari 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 37**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro	1.020.000.000,00	393.602.509,00	38,59	(626.397.491,00)	1.100.381.935,34
2	Hasil Dari Pengelolaan dana Bergulir	36.720.000,00	43.873.135,00	119,48	7.153.135,00	43.596.804,75
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	299.985.828,00	100,00	299.985.828,00	0,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	350.982.674,00	100,00	350.982.674,00	3.700.401.137,45

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.065.000,00	284.238.838,59	1.769,30	268.173.838,59	245.820.341,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.400.000,00	157.602.101,10	772,56	137.202.101,10	132009565
7	Pendapatan Denda Retribusi	15.300.000,00	121.320,00	0,79	(15.178.680,00)	63.620,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	374.850.000,00	1.000,00	0,00	(374.849.000,00)	0,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian	9.167.700.000,00	430.543.912,04	4,7	(8.737.156.087,96)	371190668
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.779.500.000,00	2.358.793.628,00	84,86	(420.706.372,00)	2.517.109.173,00
11	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	0,00	2856823
<b>JUMLAH</b>		<b>13.430.535.000,00</b>	<b>4.319.744.945,73</b>	<b>32,16</b>	<b>(9.110.790.054,27)</b>	<b>8.113.430.067,54</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.430.535.000,00 terealisasi sebesar Rp4.319.744.945,73 atau 32,16% dan mengalami penurunan sebesar Rp3.793.685.121,81 atau sebesar 46,76% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.113.430.067,54. Penurunan tersebut dikarenakan tingginya atas penetapan target yang di tetapkan dalam APBD seperti Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, tidak tercapainya beberapa target pendapatan atas pengembalian dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

#### 7.6.1.1.4.1. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa atas penempatan dana pada perbankan. Penerimaan jasa giro dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 38**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jasa Giro Pada Kas Daerah	1.020.000.000,00	393.602.509,00	38,59	(626.397.491,00)	1.100.381.935,34
<b>JUMLAH</b>		<b>1.020.000.000,00</b>	<b>393.602.509,00</b>	<b>38,59</b>	<b>(626.397.491,00)</b>	<b>1.100.381.935,34</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.020.000.000,00 terealisasi sebesar Rp393.602.509,00 atau 38,59% dan mengalami penurunan sebesar Rp706.779.426,34 atau sebesar 64,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.100.396.935,34.

#### 7.6.1.1.4.2. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir merupakan bunga dari pengguliran pembiayaan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat untuk mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada SKPD Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 39**  
**Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	36.720.000,00	43.873.135,00	119,48	7.153.135,00	43.596.804,75
<b>JUMLAH</b>		<b>36.720.000,00</b>	<b>43.873.135,00</b>	<b>119,48</b>	<b>7.153.135,00</b>	<b>43.596.804,75</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp36.720.000,00 terealisasi sebesar Rp43.873.135,00 atau 119,48 % dan mengalami peningkatan sebesar Rp276.330,25 atau sebesar 0,63% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.596.804,75.

#### 7.6.1.1.1.4.3. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* hasil penyaluran Dana Bagi Hasil atas Remunerasi pada rekening TDF. Penerimaan atas pendapatan Bunga dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 40**

**Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	299.985.828,00	100,00	299.985.828,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>299.985.828,00</b>	<b>100,00</b>	<b>299.985.828,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah melalui Rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp299.985.828,00 atau 100% dan mengalami kenaikan sebesar Rp299.985.828,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

#### 7.6.1.1.1.4.4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 41**

**Anggaran dan Realisasi atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	81.307.000,00	100	81.307.000,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	269.675.674,00	100	269.675.674,00	3.700.401.137,45
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>350.982.674,00</b>	<b>100</b>	<b>350.982.674,00</b>	<b>3.700.401.137,45</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah atas pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp350.982.674,00 atau 100% dan mengalami penurunan sebesar Rp3.349.418.463,45 atau sebesar 90,52% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.700.401.137,45.

#### 7.6.1.1.1.4.5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 42  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.065.000,00	284.238.838,59	1.769,30	268.173.838,59	245.820.341,00
<b>JUMLAH</b>		<b>16.065.000,00</b>	<b>284.238.838,59</b>	<b>1.769,30</b>	<b>268.173.838,59</b>	<b>245.820.341,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.065.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp284.238.838,59 atau 1.769,30%. Mengalami kenaikan sebesar Rp38.418.497,59 atau sebesar 15,63% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp245.820.341,00.

#### 7.6.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan keterlambatan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda Pajak dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 43  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ / Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	20.400.000,00	53.922.580,00	264,33	33.522.580,00	0,00
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	103.331.811,10	100	103.331.811,10	94.137.476,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih / Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	194.800,00	100	194.800,00	0,00
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	152.910,00	100	152.910,00	167.528,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.704.561,00
<b>JUMLAH</b>		<b>20.400.000,00</b>	<b>157.602.101,10</b>	<b>772,56</b>	<b>137.202.101,10</b>	<b>132.009.565,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.400.000,00 terealisasi sebesar Rp157.602.101,10 atau 772,56% dan mengalami peningkatan sebesar Rp25.592.536,10 atau sebesar 19,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp132.009.565,00.

#### 7.6.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pengembalian/penyetoran atas keterlambatan penyetoran atas retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 44  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	15.300.000,00	121.320,00	0,79	(15.178.680,00)	63.620,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.300.000,00</b>	<b>121.320,00</b>	<b>0,79</b>	<b>(15.178.680,00)</b>	<b>63.620,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.300.000,00 terealisasi sebesar Rp121.320,00 atau 0,79% dan mengalami peningkatan sebesar Rp57.700,00 atau sebesar 90,69% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.620,00.

#### 7.6.1.1.4.8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan merupakan eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan/proyek yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 45  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa	374.850.000,00	1.000,00	0,00	(374.849.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>374.850.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(374.849.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp374.850.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000,00 atau sebesar 0,00% dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

#### 7.6.1.1.4.9. Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan Dari Pengembalian merupakan pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan perimbangan objektif lainnya ASN, Belanja Barang Alat Tulis Kantor, Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja, Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 46  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.412.873,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	9.167.700.000,00	137.002.086,04	1,49	(9.030.697.913,96)	62.650.400,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0,00	0,00	0,00	0,00	284.127.395,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Alat Tulis Kantor	0,00	3.400,00	100	3.400,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	240.000,00	100	240.000,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	292.167.200,00	100	292.167.200,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang	0,00	131.226,00	100	131.226,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Berbadan Hukum Indonesia					
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.167.700.000,00</b>	<b>430.543.912,04</b>	<b>4,70</b>	<b>(8.737.156.087,96)</b>	<b>371.190.668,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.167.700.000,00 terealisasi sebesar Rp430.543.912,04 atau 4,70% dan mengalami peningkatan sebesar Rp59.353.244,04 atau sebesar 15,99% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp371.190.668,00.

#### 7.6.1.1.4.10. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan masing-masing puskesmas dan Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP2B) yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 47**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Puskesmas Tarempa	595.404.601,00	247.586.209,00	41,58	(347.818.392,00)	689.190.000,00
2	Puskesmas Palmatak	Rp905.994.915	854.050.384,00	94,27	(51.944.531,00)	765.665.673,00
3	Puskesmas Siantan Timur	Rp244.678.963	239.970.909,00	98,08	(4.708.054,00)	197.402.500,00
4	Puskesmas Siantan Selatan	Rp204.773.211	222.041.552,00	108,43	17.268.341,00	188.434.000,00
5	Puskesmas Jemaja Timur	Rp185.614.310	118.059.505,00	63,60	(67.554.805,00)	138.328.000,00
6	Puskesmas Letung	Rp412.920.000	413.155.710,00	100,06	235.710,00	344.366.000,00
7	Puskesmas Siantan Tengah	Rp230.114.000	203.630.984,00	88,49	(26.483.016,00)	193.723.000,00
8	Puskesmas Kute Siantan	0,00	60.298.375,00	100,00	60.298.375,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp2.779.500.000</b>	<b>Rp2.358.793.628</b>	<b>84,86</b>	<b>(420.706.372,00)</b>	<b>2.517.109.173,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.779.500.000,00 pada masing-masing FKTP. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai akun yang tersedia pada SIPD Kemendagri dan terealisasi sebesar Rp2.358.793.628,00 atau 84,86% dan mengalami penurunan sebesar Rp158.315.545,00 atau sebesar 6,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.517.109.173,00.

#### 7.6.1.1.4.11. Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya merupakan pendapatan atas transaksi yang terjadi pada Bendahara Pengeluaran SKPD. Realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. dengan rician sebagai berikut:

**Tabel 48**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.823,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.823,00</b>

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya pada Tahun Anggaran 2023. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.856.823,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.856.823,00.

#### 7.6.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Pendapatan Transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 49**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	986.805.461.479,00	851.583.263.975,00	86,30	(135.222.197.504,00)	686.133.704.760,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	54.074.162.000,00	55.482.217.000,00	102,60	1.408.055.000,00	42.927.635.500,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	66.846.892.822,00	61.942.557.974,00	92,66	(4.904.334.848,00)	54.253.846.129,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.107.726.516.301,00</b>	<b>969.008.038.949,00</b>	<b>87,48</b>	<b>(138.718.477.352,00)</b>	<b>783.315.186.389,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.107.726.516.301,00 terealisasi sebesar Rp969.008.038.949,00 atau 87,48%. Mengalami kenaikan sebesar Rp185.692.852.560,00 atau sebesar 23,71% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp783.315.186.389,00. Kenaikan tersebut dikarenakan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 mendapat penyaluran Kekurangan Bayar (KB) atas DBH Pajak Penghasilan, DBH PBB, DBH SDA Migas, DBH SDA Minerba, DBH SDA Kehutanan sesuai dengan PMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang penyaluran kurang bayar dan bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp178.227.754.000,00 dengan dikurangi atas pemotongan Lebih Bayar (LB), sehingga total atas sisa KB yang diperoleh sebesar Rp162.713.544.000,00. Pada tanggal 29 Desember 2023 telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp152.366.355.950,00 sisanya sebesar Rp 10.347.188.050,00 telah di TDF kan melalui RKUN dan bisa dicairkan pada Tahun Anggaran mendatang.

### 7.6.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 50**  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Bagi Hasil Pajak- LRA	47.694.370.000,00	70.647.320.020,00	148,13	22.952.950.020,00	55.740.956.367,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)- LRA	404.354.584.748,00	250.956.541.788,00	62,06	(153.398.042.960,00)	195.428.870.320,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	383.891.391.000,00	383.849.195.981,00	99,99	(42.195.019,00)	368.244.672.250,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.865.115.731,00	146.130.206.186,00	96,86	(4.734.909.545,00)	66.719.205.823,00
<b>JUMLAH</b>		<b>986.805.461.479,00</b>	<b>851.583.263.975,00</b>	<b>86,30</b>	<b>(135.222.197.504,00)</b>	<b>686.133.704.760,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp986.805.461.479,00 terealisasi sebesar Rp851.583.263.975,00 atau 86,30% dan mengalami peningkatan sebesar Rp165.449.559.215,00 atau sebesar 24,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp686.133.704.760,00.

#### 7.6.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 51**  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.984.207.000,00	48.372.500.950,00	156,12	17.388.293.950,00	39.822.659.937,00
2	DBH PPh Pasal 21	16.000.000.000,00	21.245.524.000,00	132,78	5.245.524.000,00	15.244.794.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	710.163.000,00	1.025.591.000,00	144,42	315.428.000,00	663.916.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	3.704.070,00	100	3.704.070,00	9.586.430,00
<b>JUMLAH</b>		<b>47.694.370.000,00</b>	<b>70.647.320.020,00</b>	<b>148,13</b>	<b>22.952.950.020,00</b>	<b>55.740.956.367,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.694.370.000,00 terealisasi sebesar

Rp70.647.320.020,00 atau 148,13% dan mengalami penurunan sebesar Rp14.906.363.653,00 atau sebesar 26,74% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.740.956.367,00.

#### 7.6.1.1.2.1.2. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 52**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	332.918.554.326,00	120.101.629.788,00	36,08	(212.816.924.538,00)	44.248.139.812,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	63.792.820.422,00	121.755.230.000,00	190,86	57.962.409.578,00	145.688.116.223,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	884.582.000,00	1.456.472.000,00	164,65	571.890.000,00	0,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	884.582.000,00	0,00	884.582.000,00	3.479.622.285,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.186.000,00	20.186.000,00	100	0,00	54.681.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.738.442.000,00	6.738.442.000,00	100	0,00	1.958.311.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>404.354.584.748,00</b>	<b>250.956.541.788,00</b>	<b>62,06</b>	<b>(153.398.042.960,00)</b>	<b>195.428.870.320,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.354.584.748 terealisasi sebesar Rp250.956.541.788,00 atau 62,06% dan mengalami peningkatan sebesar Rp55.527.671.468,00 atau sebesar 28,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp195.428.870.320,00. Hal ini dikarenakan telah ditransfernya atas Kekurangan Bayar (KB) atas bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang di TDFkan pada tahun lalu dan tahun anggaran berjalan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang penyaluran kurang bayar dan bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada Tahun 2023.

#### 7.6.1.1.2.1.3. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum -

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 53**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	270.564.176.000,00	270.521.980.981,00	99,98	(42.195.019,00)	368.244.672.250,00
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	20.055.426.000,00	20.055.426.000,00	100,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	14.716.656.000,00	14.716.656.000,00	100,00	0,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	29.246.331.000,00	29.246.331.000,00	100,00	0,00	0,00
6	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	48.908.802.000,00	48.908.802.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>383.891.391.000,00</b>	<b>383.849.195.981,00</b>	<b>99,99</b>	<b>(42.195.019,00)</b>	<b>368.244.672.250,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp383.891.391.000,00 terealisasi sebesar Rp383.849.195.981,00 atau 99,99% dan mengalami peningkatan sebesar Rp15.604.523.731,00 atau sebesar 4,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp368.244.672.250,00. Hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan melakukan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya, Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK, Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan, Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 hanya pada Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya.

#### 7.6.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus - LRA

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran dan Realisasi penerimaan Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 54**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.378.396.731,00	100.946.353.790,00	96,71	(3.432.042.941,00)	45.419.256.929,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	46.486.719.000,00	45.183.852.396,00	97,20	(1.302.866.604,00)	21.299.948.894,00
<b>JUMLAH</b>		<b>150.865.115.731,00</b>	<b>146.130.206.186,00</b>	<b>96,86</b>	<b>(4.734.909.545,00)</b>	<b>66.719.205.823,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.865.115.731,00 terealisasi sebesar Rp146.130.206.186,00 atau 96,86%. Mengalami peningkatan sebesar Rp79.411.000.363,00 atau sebesar 119,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.719.205.823,00. Kenaikan tersebut dikarenakan dari segi perencanaan, semua usulan sesuai dengan lokasi prioritas yang telah ditetapkan, didukung dengan bukti pendukung seperti DED yang telah ada, lokasi yang mumpuni, anggaran penunjang tersedia. Dari segi pelaksanaan, pelaksanaan dinilai atas realisasi capaian tahun sebelumnya, seperti penyerapan kontrak paling tinggi dari pagu, pekerjaan yang terlaksana secara maksimal dan tidak ada gagal salur. Dari segi monitoring dan evaluasi, semua usulan DAK Fisik dapat meningkatkan aktivitas masyarakat.

#### 7.6.1.1.2.1.4.1. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023, dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 55**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	352.277.000,00	349.986.799,00	99,35	(2.290.201,00)	1.312.280.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.943.253.000,00	2.883.218.250,00	97,96	(60.034.750,00)	8.689.882.989,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.914.958.000,00	4.804.046.488,00	97,74	(110.911.512,00)	12.035.507.097,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	32.962.003.731,00	30.394.193.964,00	92,21	(2.567.809.767,00)	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.965.778,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.440.100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	1.190.375.000,00	100	1.190.375.000,00	86.875.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	2.165.560.000,00	2.040.143.896,00	94,21	(125.416.104,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar					
	Pembangunan Pertanian					
9	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.750.606.000,00	7.388.968.284,00	95,33	(361.637.716,00)	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	41.548.146.000,00	40.857.513.154,00	98,34	(690.632.846,00)	6.350.807.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813.904.824,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529.563.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.826.141,00
14	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	741.593.000,00	740.308.155,00	99,83	(1.284.845,00)	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	250.205.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan - Penugasan	11.000.000.000,00	10.297.599.800,00	93,61	(702.400.200,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.378.396.731,00</b>	<b>100.946.353.790,00</b>	<b>96,71</b>	<b>(3.432.042.941,00)</b>	<b>45.419.256.929,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.378.396.731,00 terealisasi sebesar Rp100.946.353.790,00 atau 96,71%. Mengalami peningkatan sebesar Rp55.527.096.861,00 atau sebesar 122,25% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.419.256.929,00. Akun-akun yang terdapat diatas disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 7.6.1.1.2.1.4.2. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 56**  
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	13.621.272.000,00	12.465.674.840,00	91,52	(1.155.597.160,00)	10.668.492.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	792.000.000,00	100,00	792.000.000,00	754.250.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.397.479.000,00	3.397.479.000,00	100,00	0,00	2.685.333.000,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.703.930.000,00	1.694.930.000,00	99,47	(9.000.000,00)	1.480.960.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	331.940.000,00	331.940.000,00	100	0,00	148.200.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.820.545.000,00	11.544.321.621,00	97,66	(276.223.379,00)	3.698.936.135,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.182.998.000,00	1.825.228.732,00	83,61	(357.769.268,00)	661.687.800,00
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	440.194.500,00
9	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	521.700.000,00	0,00	0,00	(521.700.000,00)	0,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	311.077.880,00	100,00	311.077.880,00	218.890.273,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	185.075.000,00	106.146.862,00	57,35	(78.928.138,00)	543.005.186,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	598.000.000,00	100	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-BOS Reguler	12.123.780.000,00	12.117.053.461,00	99,94	(6.726.539,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.486.719.000,00</b>	<b>45.183.852.396,00</b>	<b>97,20</b>	<b>(1.302.866.604,00)</b>	<b>21.299.948.894,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.486.719.000,00 terealisasi sebesar Rp45.183.852.396,00 atau 97,2%. Mengalami peningkatan sebesar Rp23.883.903.502,00 atau sebesar 112,13% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp21.299.948.894,00.

#### 7.6.1.1.2.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA – LRA

Pendapatan Pemerintah Pusat Lainnya merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2023 dan 2022 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 57**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Transfer pemerintah Pusat Lainnya - LRA Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.659.002.000,00	10.659.002.000,00	100,00	0,00	6.072.979.000,00
2	Dana Desa	37.718.007.000,00	39.126.062.000,00	103,73	1.408.055.000,00	36.854.656.500,00
3	Insentif Fiskal	5.697.153.000,00	5.697.153.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>54.074.162.000,00</b>	<b>55.482.217.000,00</b>	<b>102,6</b>	<b>1.408.055.000,00</b>	<b>42.927.635.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA yang besarnya telah ditentukan pada Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp54.074.162.000,00 terealisasi sebesar Rp55.482.217.000,00 atau 102,6%. Mengalami peningkatan sebesar Rp12.554.581.500,00 atau sebesar 29,25% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp42.927.635.500,00. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas menerima penambahan Insentif Daerah (DID) lebih besar pada tahun sebelumnya dan adanya penerimaan atas Insentif Fiskal atas penghargaan kinerja tahun berjalan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 58**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID)	10.659.002.000,00	10.659.002.000,00	100	0,00	6.072.979.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.659.002.000,00</b>	<b>10.659.002.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072.979.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.659.002.000,00 terealisasi sebesar Rp10.659.002.000,00 atau 100%. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.586.023.000,00 atau sebesar 75,52% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 Sebesar Rp6.072.979.000,00. Peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) dikarenakan adanya penambahan alokasi atas kinerja tahun sebelumnya.

#### 7.6.1.1.2.2.2. Dana Desa - LRA

Dana Desa merupakan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 59**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Desa	37.718.007.000,00	39.126.062.000,00	103,73	1.408.055.000,00	36.854.656.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>37.718.007.000,00</b>	<b>39.126.062.000,00</b>	<b>103,73</b>	<b>1.408.055.000,00</b>	<b>36.854.656.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.197.871.000,00 terealisasi sebesar Rp39.126.062.000,00 atau 103,73%. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.271.405.500,00 atau sebesar 6,16% dibandingkan

realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp36.854.656.500,00. Pada Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Serta pada Tahun yang sama mendapatkan Tambahan Alokasi berdasarkan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa sebesar Rp1.408.055.000,00.

**Tabel 60**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	991.945.000,00	991.945.000	100,00	0,00	849.350.000
2	Desa Tarempa Selatan	744.100.000,00	872.105.000	117,20	0,00	686.544.000
3	Desa Tarempa Timur	1.002.162.000,00	1.002.162.000	100,00	128.005.000	761.748.000
4	Desa Pesisir Timur	671.635.000,00	671.635.000	100,00	0,00	677.699.000
5	Desa Sri Tanjung	671.769.000,00	799.774.000	119,05	128.005.000	658.441.000
6	Desa Tarempa Barat Daya	634.274.000,00	634.274.000	100,00	0,00	650.270.000
7	Desa Mampok	713.590.000,00	713.590.000	100,00	0,00	686.702.000
8	Desa Rewak	703.096.000,00	703.096.000	100,00	0,00	665.712.000
9	Desa Air Biru	689.561.000,00	689.561.000	100,00	0,00	664.066.000
10	Desa Batu Berapit	670.885.000,00	670.885.000	100,00	0,00	659.331.000
11	Desa Landak	680.085.000,00	680.085.000	100,00	0,00	667.107.000
12	Desa Tebang	953.839.000,00	1.081.844.000	113,42	128.005.000	689.334.000
13	Desa Ladan	746.267.000,00	746.267.000	100,00	0,00	1.007.103.000
14	Desa Piabung	746.887.000,00	874.892.000	117,14	128.005.000	697.948.000
15	Desa Langir	932.573.000,00	932.573.000	100,00	0,00	862.700.000
16	Desa Candi	629.281.000,00	629.281.000	100,00	0,00	657.330.000
17	Desa Putik	1.090.145.000,00	1.090.145.000	100,00	0,00	816.741.000
18	Desa Belibak	617.529.000,00	617.529.000	100,00	0,00	862.594.000
19	Desa Nyamuk	698.950.000,00	698.950.000	100,00	0,00	719.286.000
20	Desa Batu Belah	1.019.399.000,00	1.147.404.000	112,56	128.005.000	1.003.087.000
21	Desa Munjan	756.746.000,00	756.746.000	100,00	0,00	745.352.000
22	Desa Serat	674.255.000,00	674.255.000	100,00	0,00	652.146.000
23	Desa Air Putih	702.764.000,00	702.764.000	100,00	0,00	693.485.000
24	Desa Temburun	706.277.000,00	706.277.000	100,00	0,00	642.846.000
25	Desa Kiabu	744.704.000,00	744.704.000	100,00	0,00	710.994.000
26	Desa Telaga	665.602.000,00	665.602.000	100,00	0,00	628.294.000
27	Desa Mengkait	760.256.000,00	888.261.000	116,84	128.005.000	736.713.000
28	Desa Tiangau	639.676.000,00	639.676.000	100,00	0,00	648.325.000
29	Desa Telaga Kecil	659.681.000,00	659.681.000	100,00	0,00	615.635.500
30	Desa Lingai	674.151.000,00	674.151.000	100,00	0,00	652.982.000
31	Desa Air Bini	722.256.000,00	722.256.000	100,00	0,00	953.720.000
32	Desa Kuala Maras	731.632.000,00	731.632.000	100,00	0,00	972.145.000
33	Desa Ulu Maras	706.487.000,00	706.487.000	100,00	0,00	729.073.000
34	Desa Bukit Padi	681.761.000,00	681.761.000	100,00	0,00	691.495.000

No	Nama Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
35	Desa Genting Pulur	905.468.000,00	905.468.000	100,00	0,00	669.038.000
36	Desa Air Asuk	650.384.000,00	650.384.000	100,00	0,00	645.578.000
37	Desa Air Sena	688.077.000,00	688.077.000	100,00	0,00	655.350.000
38	Desa Teluk Siantan	668.006.000,00	668.006.000	100,00	0,00	665.314.000
39	Desa Lidi	624.698.000,00	624.698.000	100,00	0,00	615.094.000
40	Desa Liuk	600.696.000,00	600.696.000	100,00	0,00	603.837.000
41	Desa Teluk Sunting	608.865.000,00	736.870.000	121,02	128.005.000	607.465.000
42	Desa Impol	638.918.000,00	638.918.000	100,00	0,00	628.393.000
43	Desa Keramat	641.399.000,00	641.399.000	100,00	0,00	641.167.000
44	Desa Sunggak	652.591.000,00	652.591.000	100,00	0,00	876.390.000
45	Desa Mubur	723.964.000,00	723.964.000	100,00	0,00	689.739.000
46	Desa Piasan	955.467.000,00	1.083.472.000	113,40	128.005.000	915.376.000
47	Desa Bayat	733.824.000,00	861.829.000	117,44	128.005.000	717.984.000
48	Desa Payalaman	629.769.000,00	757.774.000	120,33	128.005.000	655.815.000
49	Desa Teluk Bayur	622.231.000,00	750.236.000	120,57	128.005.000	606.658.000
50	Desa Matak	573.735.000,00	573.735.000	100,00	0,00	234.000.000
51	Desa Batu Ampar	667.189.000,00	667.189.000	100,00	0,00	703.139.000
52	Desa Payamaram	698.506.000,00	698.506.000	100,00	0,00	708.021.000
<b>JUMLAH</b>		<b>37.718.007.000,00</b>	<b>39.126.062.000,00</b>	<b>103,73</b>	<b>1.408.055.000,00</b>	<b>36.854.656.500,00</b>

#### 7.6.1.1.2.2.3. Insentif Fiskal - LRA

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dana Insentif Fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 61**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dana Insentif Fiskal	5.697.153.000,00	5.697.153.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.697.153.000,00</b>	<b>5.697.153.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.697.153.000,00 terealisasi sebesar Rp5.697.153.000,00 atau 100%. Mengalami peningkatan sebesar Rp5.697.153.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 Sebesar Rp0,00. Hal ini didasarkan adanya penambahan atas Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Inentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun berjalan pada Tahun Anggaran 2023.

### 7.6.1.1.2.3. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH-LAINNYA – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan di Kepulauan Anambas. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 62  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil	61.646.892.822,00	56.757.976.060,00	92,07	(4.888.916.762,00)	53.533.846.129,00
2	Bantuan Keuangan	5.200.000.000,00	5.184.581.914,00	99,70	(15.418.086,00)	720.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.846.892.822,00</b>	<b>61.942.557.974,00</b>	<b>92,66</b>	<b>(4.904.334.848,00)</b>	<b>54.253.846.129,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp66.846.892.822,00 terealisasi sebesar Rp61.942.557.974,00 atau 92,66%. Mengalami peningkatan sebesar Rp7.688.711.845,00 atau sebesar 14,17% dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp54.253.846.129,00.

#### 7.6.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil - LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 63  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Kendaraan Bermotor	12.355.427.947,00	11.161.392.653,00	90,34	(1.194.035.294,00)	10.303.996.030,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.084.497.143,00	9.863.893.123,00	139,23	2.779.395.980,00	6.392.155.527,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	33.384.111.538,00	26.451.407.690,00	79,23	(6.932.703.848,00)	27.528.240.651,00
4	Pajak Air Permukaan	49.007.343,00	36.649.384,00	74,78	(12.357.959,00)	34.147.780,00
5	Pajak Rokok	8.773.848.851,00	9.244.633.210,00	105,37	470.784.359,00	9.275.306.141,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>61.646.892.822,00</b>	<b>56.757.976.060,00</b>	<b>92,07</b>	<b>(4.888.916.762,00)</b>	<b>53.533.846.129,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.646.892.822,00 terealisasi sebesar Rp56.757.976.060,00 atau 92,07%. Mengalami peningkatan sebesar Rp3.224.129.931,00 atau sebesar 6,02% dibandingkan realisasi pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp53.533.846.129,00. Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil diatur dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 164 Tahun 2023 tentang Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan - LRA

Bantuan Keuangan merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah untuk membantu pembangunan Infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dana Bagi Hasil Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 64**  
**Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5.200.000.000,00	5.184.581.914,00	99,70	(15.418.086,00)	720.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.200.000.000,00</b>	<b>5.184.581.914,00</b>	<b>99,70</b>	<b>(15.418.086,00)</b>	<b>720.000.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,200,000,000.00 terealisasi sebesar Rp5.184.581.914,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.464.581.914,00 atau sebesar 620,08% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp720.000.000,00. Besaran alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Riau diatur pada Keputusan Gubernur Nomor 1340 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

##### 7.6.1.1.3.1. Pendapatan Lainnya - LRA

Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.552.146.713,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.552.146.713,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 65**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.146.713,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.552.146.713,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Tahun Anggaran 2023, pendapatan Dana BOS terdapat pada rekening DAK Non Fisik sesuai dengan Perda APBD Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.2. BELANJA – LRA

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.250.230.911.389,00 dan terealisasi Rp980.261.125.829,64 atau sebesar 78,41%. Hal ini disebabkan banyak pekerjaan fisik yang telah selesai s.d 31 Desember 2022 namun diakui sebagai hutang, tetapi pada Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan pelunasan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kode Akun Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek. Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagaimana berikut.

**Tabel 66**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio	Lebih/	Realisasi
		2023	2023	(%)	(Kurang)	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Operasi	803.457.038.265,00	683.833.368.630,64	85,11	(119.623.669.634,36)	640.801.958.959,20
2	Belanja Modal	251.278.933.169,00	184.291.542.980,00	73,34	(66.987.390.189,00)	120.401.935.455,00
3	Belanja Tak Terduga	68.799.839.255,00	0,00	0,00	(68.799.839.255,00)	0,00
4	Belanja Transfer	126.695.100.700,00	112.145.272.319,00	88,52	(14.549.828.381,00)	104.564.085.295,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.250.230.911.389,00</b>	<b>980.270.183.929,64</b>	<b>78,41</b>	<b>(269.960.727.459,36)</b>	<b>865.767.979.709,20</b>

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.250.230.911.389,00 terealisasi sebesar Rp980.270.183.929,64 atau 78,41%. Mengalami peningkatan sebesar Rp114.502.204.220,44 atau sebesar 13,23% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp865.767.979.709,20. Dikarenakan Tunda Salur yang diakui pada Tahun Anggaran 2022 telah dibayarkan sebagian besar pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.2.1. BELANJA OPERASI - LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 67**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	368.552.961.524,00	333.755.055.240,00	90,56	(34.797.906.284,00)	308.350.657.013,00
2	Belanja Barang dan Jasa	414.841.981.749,00	332.767.580.289,64	80,21	(82.074.401.459,36)	319.660.172.869,20
3	Belanja Hibah	18.616.010.962,00	17.149.119.101,00	92,12	(1.466.891.861,00)	10.234.147.577,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.446.084.030,00	161.614.000,00	11,18	(1.284.470.030,00)	2.556.981.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>803.457.038.265,00</b>	<b>683.833.368.630,64</b>	<b>85,11</b>	<b>(119.623.669.634,36)</b>	<b>640.801.958.959,20</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp803.457.038.265,00 terealisasi sebesar Rp683.833.368.630,64 atau 85,11%. Mengalami peningkatan sebesar Rp43.031.409.671,44 atau sebesar 6,72% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp640.801.958.959,20. Sedangkan untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan akan diungkapkan tersendiri yang tak terpisahkan dari Kelompok Belanja.

#### 7.6.1.2.1.1. Belanja Pegawai -LRA

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 68**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	140.674.814.023,00	125.466.719.618,00	89,19	(15.208.094.405,00)	114.438.923.701,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	183.929.000.563,00	168.134.239.442,00	91,41	(15.794.761.121,00)	154.623.507.297,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.753.539.203,00	30.390.374.078,00	90,04	(3.363.165.125,00)	28.192.211.831,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.391.138.520,00	9.206.286.256,00	98,03	(184.852.264,00)	10.516.528.944,00
5	Belanja Gaji dan	372.663.655,00	161.329.046,00	43,29	(211.334.609,00)	161.025.280,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Tunjangan KDH/WKDH					
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	431.805.560,00	396.106.800,00	91,73	(35.698.760,00)	418.459.960,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>368.552.961.524,00</b>	<b>333.755.055.240,00</b>	<b>90,56</b>	<b>(34.797.906.284,00)</b>	<b>308.350.657.013,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp368.552.961.524,00 terealisasi sebesar Rp333.755.055.240,00 atau 90,56% dan mengalami peningkatan sebesar Rp25.404.398.227,00 atau sebesar 8,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp308.350.657.013,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

**Tabel 69**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	22.178.969.532,00	17.603.356.232,00	79,37	(4.575.613.300,00)	15.351.199.335,00
2	Sekretariat DPRD	13.211.837.814,00	12.843.317.578,00	97,21	(368.520.236,00)	13.686.931.957,00
3	Inspektorat	8.555.909.224,00	7.772.144.312,00	90,84	(783.764.912,00)	7.563.840.857,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	132.626.082.490,00	117.617.078.763,00	88,68	(15.009.003.727,00)	98.427.116.096,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.011.984.867,00	66.627.371.085,00	95,17	(3.384.613.782,00)	58.626.593.541,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.539.619.495,00	8.695.716.718,00	82,51	(1.843.902.777,00)	7.780.291.801,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.579.479.894,00	4.161.533.135,00	90,87	(417.946.759,00)	5.094.609.762,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.269.339.965,00	3.828.216.763,00	89,67	(441.123.202,00)	5.139.925.769,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	8.610.715.836,00	7.626.490.640,00	88,57	(984.225.196,00)	7.277.917.294,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	5.719.100.700,00	5.376.411.982,00	94,01	(342.688.718,00)	5.352.452.774,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.648.384.268,00	5.504.281.975,00	97,45	(144.102.293,00)	4.020.122.848,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.449.479.223,00	4.315.969.388,00	97,00	(133.509.835,00)	3.805.499.980,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	6.570.063.970,00	5.146.383.341,00	78,33	(1.423.680.629,00)	4.202.812.736,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.960.853.838,00	3.311.086.807,00	83,60	(649.767.031,00)	3.494.300.618,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4.702.993.659,00	4.680.803.256,00	99,53	(22.190.403,00)	5.614.502.653,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.916.774.032,00	4.900.028.328,00	99,66	(16.745.704,00)	4.135.628.458,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	18.456.302.647,00	16.984.539.993,00	92,03	(1.471.762.654,00)	26.758.160.555,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	6.071.226.844,00	5.439.435.584,00	89,59	(631.791.260,00)	5.015.120.598,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.046.306.824,00	2.746.758.013,00	90,17	(299.548.811,00)	2.777.521.420,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.141.103.304,00	4.438.560.767,00	86,33	(702.542.537,00)	3.988.332.853,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.204.744.156,00	1.926.636.752,00	87,39	9278.107.404,00)	54.000.000,00
22	Kecamatan Jemaja	3.616.437.058,00	3.601.024.703,00	99,57	(15.412.355,00)	3.477.746.950,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	2.154.071.421,00	1.813.397.944,00	84,18	(340.673.477,00)	1.787.710.595,00
24	Kecamatan Palmatak	2.720.616.185,00	2.681.341.138,00	98,56	(39.275.047,00)	2.776.955.388,00
25	Kecamatan Siantan	2.859.018.625,00	2.797.666.959,00	97,85	(61.351.666,00)	2.483.494.217,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.704.167.005,00	1.701.746.408,00	99,86	(2.420.597,00)	1.726.377.329,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.796.038.078,00	1.784.013.433,00	99,33	(12.024.645,00)	1.860.454.012,00
28	Kecamatan Siantan Timur	1.723.235.295,00	1.637.451.453,00	95,02	(85.783.842,00)	1.354.113.456,00
29	Kecamatan Siantan Utara	1.579.447.197,00	1.504.523.042,00	95,26	(74.924.155,00)	1.319.429.056,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.588.445.635,00	1.448.141.201,00	91,17	(140.304.434,00)	1.503.782.652,00
31	Kecamatan Kute Siantan	2.095.927.130,00	2.094.104.999,00	99,91	(1.822.131,00)	1.893.711.453,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	46.080.000,00	46.080.000,00	100,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	97.355.000,00	91.907.000,00	94,40	(5.448.000,00)	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1.100.850.313,00	1.007.535.548,00	91,52	(93.314.765,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>368.552.961.524,00</b>	<b>333.755.055.240,00</b>	<b>90,56</b>	<b>(34.797.906.284,00)</b>	<b>308.350.657.013,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp368.552.961.524,00 terealisasi sebesar Rp333.755.055.240,00 atau 90,54% dan mengalami peningkatan sebesar Rp25.404.398.227,00 atau sebesar 8,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp308.350.657.013,00. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai adanya penambahan Formasi CPNS dan PPPK pada Tahun Anggaran 2023. Belanja Pimpinan DPRD dan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digabungkan dengan belanja pegawai di perangkat daerah itu sendiri.

#### 7.6.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN diperuntukkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember 2023. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 70**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok ASN	97.851.623.672,00	90.116.986.541,00	92,10	(7.734.637.131,00)	82.050.075.900,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.984.011.288,00	8.156.746.277,00	81,70	(1.827.265.011,00)	7.455.510.696,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.477.004.900,00	3.754.655.000,00	83,87	(722.349.900,00)	3.504.469.531,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.450.555.900,00	6.316.921.870,00	84,78	(1.133.634.030,00)	4.910.352.250,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.827.861.950,00	1.344.430.000,00	73,55	(483.431.950,00)	1.694.604.360,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.832.158.114,00	5.767.166.700,00	84,41	(1.064.991.414,00)	5.295.652.954,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	102.977.563,00	54.346.452,00	52,78	(48.631.111,00)	47.025.657,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.671.594,00	1.432.371,00	25,26	(4.239.223,00)	1.326.510,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.264.021.537,00	9.206.276.294,00	81,73	(2.057.745.243,00)	8.817.476.652,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	192.000.000,00	186.426.386,00	97,10	(5.573.614,00)	196.829.856,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	563.000.000,00	561.331.727,00	99,70	(1.668.273,00)	465.599.335,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	123.927.505,00	0,00	0,00	(123.927.505,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>140.674.814.023,00</b>	<b>125.466.719.618,00</b>	<b>89,19</b>	<b>(15.208.094.405,00)</b>	<b>114.438.923.701,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.674.814.023,00 terealisasi sebesar Rp125.413.961.852,00 atau 89,15%. Mengalami peningkatan sebesar Rp11.027.795.917,00 atau sebesar 9,64% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp114.438.923.701,00.

#### 7.6.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, anggaran dan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN yang berakhir per 31 Desember 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 71**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	103.293.229.062,00	94.254.917.743,00	91,25	(9.038.311.319,00)	90.151.892.973,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.713.995.226,00	3.169.553.468,00	85,34	(544.441.758,00)	2.535.579.484,00
3	Tambahan Penghasilan	10.085.273.335,00	9.124.619.053,00	90,47	(960.654.282,00)	7.995.407.753,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	berdasarkan Kondisi Kerja ASN					
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.477.126.176,00	6.816.897.503,00	91,17	(660.228.673,00)	6.027.609.207,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	59.359.376.764,00	54.768.251.675,00	92,27	(4.591.125.089,00)	47.913.017.880,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>183.929.000.563,00</b>	<b>168.134.239.442,00</b>	<b>91,41</b>	<b>(15.794.761.121,00)</b>	<b>154.623.507.297,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp183.929.000.563,00 terealisasi sebesar Rp168.134.239.442,00 atau 91,41 % dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.510.732.145,00 atau sebesar 8,74% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp154.623.507.297,00.

#### 7.6.1.2.1.1.3. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2023, serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 72**  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  
Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)						
No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.180.545.725,00	511.320.297,00	43,31	(669.225.428,00)	476.705.747,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	228.581.036,00	224.494.903,00	98,21	(4.086.133,00)	148.136.465,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	12.896.945.760,00	12.667.889.668,00	98,22	(229.056.092,00)	11.647.183.480,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.881.789.200,00	3.385.688.400,00	87,22	(496.100.800,00)	2.656.798.400,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.022.000.000,00	773.750.000,00	75,71	(248.250.000,00)	735.750.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.951.435.434,00	2.416.073.732,00	81,86	(535.361.702,00)	1.820.035.296,00
7	Belanja Honorarium	11.559.842.048,00	10.378.757.078,00	89,78	(1.181.084.970,00)	10.344.540.259,00
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	32.400.000,00	32.400.000,00	100	0,00	363.062.184,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>33.753.539.203,00</b>	<b>30.390.374.078,00</b>	<b>90,04</b>	<b>(3.363.165.125,00)</b>	<b>28.192.211.831,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.753.539.203,00 terealisasi sebesar Rp30.390.374.078,00 atau 90,04%. Mengalami kenaikan sebesar

Rp2.198.162.247,00 atau sebesar 7,80% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp28.192.211.831,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya Penambahan Formasi CPNS dan PPPK pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 73**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Uang Representasi DPRD	462.572.250,00	448.140.000,00	96,88	(14.432.250,00)	451.290.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.514.450,00	40.038.600,00	43,28	(52.475.850,00)	39.471.600,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.353.620,00	56.487.600,00	90,59	(5.866.020,00)	52.504.500,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.367.000,00	99,19	(315.000,00)	38.682.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	649.803.000,00	99,30	(4.567.500,00)	654.370.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.358.900,00	70.339.500,00	94,59	(4.019.400,00)	70.704.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.481.800,00	5.008.650,00	20,46	(19.473.150,00)	0,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.499.400.000,00	99,17	(12.600.000,00)	2.520.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	371.700.000,00	98,33	(6.300.000,00)	619.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.230.000,00	765.814,00	62,26	(464.186,00)	656.412,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.035.975.000,00	3.003.136.092,00	98,92	(32.838.908,00)	3.027.349.032,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.042.000.000,00	3.016.800.000,00	99,17	(25.200.000,00)	3.042.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	12.600.000,00	6.300.000,00	50,00	(6.300.000,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.391.138.520,00</b>	<b>9.206.286.256,00</b>	<b>98,03</b>	<b>(184.852.264,00)</b>	<b>10.516.528.944,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.391.138.520,00 terealisasi sebesar Rp9.206.286.256,00 atau 98,03 % dan mengalami penurunan sebesar Rp1.310.242.688,00 atau sebesar 12,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.516.528.944,00.

#### 7.6.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 74  
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.400.000,00	54.600.000,00	82,23	(11.800.000,00)	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.150.000,00	0,00	0,00	(5.150.000,00)	0,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.500.000,00	98.280.000,00	98,77	(1.220.000,00)	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.375,00	2.027.760,00	38,89	(3.186.615,00)	1.738.080,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.000.000,00	1.177.446,00	11,77	(8.822.554,00)	1.163.680,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	100.000,00	2.240,00	2,24	(97.760,00)	1.920,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.100.000,00	5.241.600,00	64,71	(2.858.400,00)	5.241.600,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	0,00	(112.320,00)	0,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	0,00	(336.960,00)	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	177.750.000,00	0,00	0,00	(177.750.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>372.663.655,00</b>	<b>161.329.046,00</b>	<b>43,29</b>	<b>(211.334.609,00)</b>	<b>161.025.280,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp372.663.655,00 terealisasi sebesar Rp161.329.046,00 atau 43,29 % dan mengalami peningkatan sebesar Rp303.766,00 atau sebesar 0,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebesar Rp161.025.280,00.

#### 7.6.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 75  
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00	111.106.800,00	88,18	(14.893.200,00)	201.600.000,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	305.805.560,00	285.000.000,00	93,20	(20.805.560,00)	216.859.960,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>431.805.560,00</b>	<b>396.106.800,00</b>	<b>91,73</b>	<b>(35.698.760,00)</b>	<b>418.459.960,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.805.560,00 terealisasi sebesar Rp396.106.800,00 atau 91,73% dan mengalami penurunan sebesar Rp22.353.160,00 atau sebesar 5,34% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp418.459.960,00.

#### 7.6.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa - LRA

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial. Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BOS. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 76  
Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Barang Pakai Habis	107.753.761.949,00	77.458.658.922,00	71,88	(30.295.103.027,00)	58.264.092.400,25
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai/Material	772.569.948,00	530.499.740,00	68,67	(242.070.208,00)	49.550.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	168.356.630.720,00	150.457.694.753,00	89,37	(17.898.935.967,00)	144.129.743.890,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.249.201.610,00	18.419.830.506,00	95,69	(829.371.104,00)	21.888.384.173,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.148.577.790,00	2.476.019.518,00	78,64	(672.558.272,00)	5.566.306.875,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.395.871.407,00	5.721.302.916,00	89,45	(674.568.491,00)	7.529.804.239,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	226.575.000,00	205.447.000,00	90,68	(21.128.000,00)	358.666.200,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.769.357.070,00	13.493.784.370,00	75,94	(4.275.572.700,00)	20.658.523.350,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	1.022.649.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	177.500.000,00	177.500.000,00	100	0,00	245.000.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta	1.314.421.000,00	1.113.150.600,00	84,69	(201.270.400,00)	1.016.203.920,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan dan Pelatihan					
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.024.516.286,00	3.419.249.260,00	68,05	(1.605.267.026,00)	2.935.474.601,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.719.186.422,00	1.537.567.880,00	56,55	(1.181.618.542,00)	2.343.215.866,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	314.053.500,00	216.172.500,00	68,83	(97.881.000,00)	1.483.524.203,00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.724.279.831,00	47.617.887.044,00	69,29	(21.106.392.787,00)	41.518.078.776,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	170.226.756,00	0,00	0,00	(170.226.756,00)	0,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.511.932.080,00	2.243.828.000,00	49,73	(2.268.104.080,00)	3.028.839.800,00
19	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.320.000,00	12.604.000,00	33,77	(24.716.000,00)	121.000.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.076.000.380,00	7.666.383.280,64	94,93	(409.617.099,36)	7.501.115.575,95
	<b>JUMLAH</b>	<b>414.841.981.749,00</b>	<b>332.767.580.289,64</b>	<b>80,22</b>	<b>(82.074.401.459,36)</b>	<b>319.660.172.869,20</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp414.841.981.749,00 terealisasi sebesar Rp332.767.580.289,64 atau 80,22%. Mengalami peningkatan sebesar Rp13.107.407.420,44 atau sebesar 4,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp319.660.172.869,20. Untuk akun nomenklatur telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Tabel 77  
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	35.697.232.389,00	29.886.448.230,00	83,72	(5.810.784.159,00)	30.803.594.829,00
2	Sekretariat DPRD	21.944.080.696,00	17.454.342.147,00	79,54	(4.489.738.549,00)	18.638.327.900,00
3	Inspektorat	4.837.285.527,00	3.853.774.605,00	79,67	(983.510.922,00)	3.586.106.192,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	81.401.811.220,00	64.764.646.469,64	79,56	(16.637.164.750,36)	63.369.201.635,95
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.502.275.488,00	72.247.896.630,00	87,57	(10.254.378.858,00)	74.436.254.321,25
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	41.684.708.771,00	28.047.941.768,00	67,29	(13.636.767.003,00)	27.570.867.638,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.004.766.880,00	3.301.598.436,00	82,44	(703.168.444,00)	4.941.413.148,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.330.966.661,00	2.003.903.482,00	85,97	(327.063.179,00)	4.040.020.809,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	22.988.601.883,00	16.703.398.218,00	72,66	(6.285.203.665,00)	6.838.281.267,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	12.706.312.942,00	10.426.554.740,00	82,06	(2.279.758.202,00)	14.286.328.251,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.922.466.877,00	3.769.820.573,00	96,11	(152.646.304,00)	2.483.742.263,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	11.288.303.616,00	8.245.355.704,00	73,04	(3.042.947.912,00)	8.916.645.040,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	6.050.098.893,00	5.395.237.887,00	89,18	(654.861.006,00)	3.532.554.438,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.329.305.071,00	7.043.856.766,00	49,16	(7.285.448.305,00)	5.530.766.887,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	9.188.973.067,00	8.931.600.811,00	97,20	(257.372.256,00)	9.498.166.305,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.386.224.480,00	2.555.987.693,00	75,48	(830.236.787,00)	3.049.765.600,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.455.936.960,00	12.842.311.447,00	83,09	(2.613.625.513,00)	10.418.008.179,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.043.588.402,00	5.223.906.659,00	74,17	(1.819.681.743,00)	4.639.174.038,00
19	Badan Kesatuan Bangsa Politik	2.448.228.939,00	2.039.658.742,00	83,31	(408.570.197,00)	1.577.861.298,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.007.980.235,00	5.926.677.696,00	98,65	(81.302.539,00)	5.833.675.519,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	857.360.641,00	804.416.499,00	93,82	(52.944.142,00)	522.988.602,00
22	Kecamatan Jemaja	2.693.787.333,00	2.239.042.630,00	83,12	(454.744.703,00)	2.155.104.703,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	1.325.494.248,00	1.045.854.400,00	78,90	(279.639.848,00)	1.088.659.330,00
24	Kecamatan Palmatak	2.590.302.760,00	2.489.872.865,00	96,12	(100.429.895,00)	1.991.894.097,00
25	Kecamatan Siantan	3.954.338.424,00	3.343.043.107,00	84,54	(611.295.317,00)	2.662.663.256,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.173.104.352,00	945.601.855,00	80,61	(227.502.497,00)	846.957.519,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.645.165.107,00	1.484.592.521,00	90,24	(160.572.586,00)	1.150.414.831,00
28	Kecamatan Siantan Timur	2.560.519.463,00	1.664.351.553,00	65,00	(896.167.910,00)	1.400.411.846,00
29	Kecamatan Siantan Utara	862.890.141,00	825.012.396,00	95,61	(37.877.745,00)	936.889.824,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.166.664.288,00	1.004.807.396,00	86,13	(161.856.892,00)	850.886.068,00
31	Kecamatan Kute Siantan	1.777.199.511,00	1.605.113.141,00	90,32	(172.086.370,00)	1.650.246.802,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	834.055.701,00	764.259.813,00	91,63	(69.795.888,00)	26.098.800,00
33	Dinas Pemberdayaan	2.241.482.513,00	2.011.475.775,00	89,74	(230.006.738,00)	206.313.068,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat Dan Desa					
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	1.940.468.270,00	1.875.217.635,00	96,64	(65.250.635,00)	179.888.565,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>414.841.981.749,00</b>	<b>332.767.580.289,64</b>	<b>80,22</b>	<b>(82.074.401.459,36)</b>	<b>319.660.172.869,20</b>

### 7.6.1.2.1.3. Belanja Hibah - LRA

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, guna menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 78  
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.653.814.161,00	12.954.870.000,00	94,88	(698.944.161,00)	3.072.607.199,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	476.038.915,00	127.756.920,00	26,84	(348.281.995,00)	634.161.150,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	160.000.000,00	0,00	0,00	(160.000.000,00)	170.000.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	240.000.000,00	239.990.000,00	99,99	(10.000,00)	5.307.213.000,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba.	1.926.794.453,00	1.802.404.650,00	93,54	(124.389.803,00)	162.643.924,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
	Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					
6	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
7	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.298.435.715,00	1.166.185.714,00	89,81	(132.250.001,00)	0,00
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	463.800.000,00	460.784.099,00	99,35	(3.015.901,00)	437.394.586,00
9	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	397.127.718,00	397.127.718,00	100	0,00	397.127.718,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.616.010.962,00</b>	<b>17.149.119.101,00</b>	<b>92,12</b>	<b>(1.466.891.861,00)</b>	<b>10.234.147.577,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.616.010.962,00 terealisasi sebesar Rp17.149.119.101,00 atau 92,12% dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.914.971.524,00 atau sebesar 67,57% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.234.147.577,00. Belanja Hibah pada Tahun 2023 dianggarkan dan direalisasikan pada SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 di masing-masing Perangkat Daerah yang disebut diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut:

**Tabel 79**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)						
No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.210.000.000,00	1.130.000.000,00	93,39	(80.000.000,00)	2.280.192.700,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.814.115.261,00	2.627.654.099,00	93,37	(186.461.162,00)	1.091.670.736,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.492.938.384,00	2.486.902.064,00	99,76	(6.036.320,00)	5.402.387.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.350.000,00	338.100.000,00	71,88	(132.250.000,00)	572.414.499,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
5	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	120.469.924,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	800.000.000,00	250.000.000,00	31,25	(550.000.000,00)	0,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	199.885.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.965.127.718,00	9.805.127.718,00	98,39	(160.000.000,00)	567.127.718,00
9	Kecamatan Jemaja	356.049.715,00	127.756.920,00	35,88	(228.292.795,00)	0,00
10	Kecamatan Siantan	119.989.200,00	0,00	0,00	(119.989.200,00)	0,00
11	Kecamatan Kute Siantan	387.440.684,00	383.578.300,00	99,00	(3.862.384,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.616.010.962,00</b>	<b>17.149.119.101,00</b>	<b>92,12</b>	<b>(1.466.891.861,00)</b>	<b>10.234.147.577,00</b>

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 5 (lima) Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 80**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	1.210.000.000,00	1.130.000.000,00	93,39	(80.000.000,00)	2.280.192.700,00
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.235.814.161,00	2.166.870.000,00	6,26	(68.944.161,00)	220.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	572.414.499,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	800.000.000,00	250.000.000,00	31,25	(550.000.000,00)	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.408.000.000,00	9.408.000.000,00	100	0,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.653.814.161,00</b>	<b>12.954.870.000,00</b>	<b>94,88</b>	<b>(698.944.161,00)</b>	<b>3.072.607.199,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.653.814.161,00 terealisasi sebesar Rp12.954.870.000,00 atau sebesar 94,88%.

**Tabel 81**  
**Daftar Penerima**  
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Anambas.	Tarempa - Kep. Anambas	130.000.000,00
2	Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kepulauan Anambas.	Tarempa - Kep. Anambas	100.000.000,00

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
3	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Kepulauan Anambas.	Tarempa - Kep. Anambas	900.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.130.000.000,00</b>

**Tabel 82**  
**Daftar Penerima**  
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	KWARCAB Kabupaten Kepulauan Anambas	Kec. Siantan	140.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>140.000.000,00</b>

**Tabel 83**  
**Daftar Penerima**  
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kab. Kep. Anambas	Jl Imam Bonjol Kelurahan Tarempa - Kep. Anambas	338.100.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>338.100.000,00</b>

**Tabel 84**  
**Daftar Penerima**  
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kep. Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	6.200.000.000,00
2.	Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kab. Kep. Anambas	Tarempa - Kep. Anambas	3.208.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>9.408.000.000,00</b>

**Tabel 85**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Jemaja	356.049.715,00	127.756.920,00	35,88	228.292.795,00
2	Kecamatan Siantan	119.989.200,00	0,00	0,00	119.989.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>476.038.915,00</b>	<b>127.756.920,00</b>	<b>35,88</b>	<b>348.281.995,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp476.038.915,00 terealisasi sebesar Rp127.756.920,00 atau sebesar 35,88%.

**Tabel 86**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	434.276.150,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.276.150,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%

Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 87**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut.

**Tabel 88**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.424.852.669,00	1.418.826.350,00	99,58	6.026.319,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	114.501.100,00	0,00	0,00	114.501.100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.539.353.769,00</b>	<b>1.418.826.350,00</b>	<b>99,58</b>	<b>120.527.419,00</b>

Tabel 89

## Daftar Penerima

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	ISMAYADI LOKADI Kepala Desa Teluk Siantan	Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah	95.996.000,00
2	ISMAYADI LOKADI Kepala Desa Teluk Siantan	Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah	71.997.000,00
3	ISMAYADI LOKADI Kepala Desa Teluk Siantan	Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah	71.997.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>239.990.000,00</b>

Tabel 90

## Daftar Penerima

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	ZULKIFLI,S.Sos Kepala Desa Ladan	Desa Ladan Kecamatan Palmatan	198.190.500,00
2	LURAH Kelurahan Letung	Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja	161.974.530,00
3	Kepala Desa Nyamuk	Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur	196.808.652,00
4	MUKHSIN Pengurus Masjid	Gudang Tengah Kecamatan Siantan	426.693.658,00
5	ARSAD Pengurus Masjid	Desa Landak Kecamatan Jemaja	123.302.000,00
6	MUKHSIN Pengurus Masjid	Gudang Tengah Kecamatan Siantan	311.857.010,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.418.826.350,00</b>

Tabel 91

## Daftar Penerima

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	SYAIFUL Kepala Desa Liuk	Desa Liuk Kecamatan Siantan Tengah	192.500.000,00
2	Kepala Desa Genting Pulur	Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja	177.160.000,00
3	LANDA Kepala Desa Air Bini	Des Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	210.000.000,00
4	LANDA Kepala Desa Air Bini	Des Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	90.000.000,00

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
5	SYAIFUL Kepala Desa Liuk	Desa Liuk Kecamatan Siantan Tengah	85.500.000,00
6	Kepala Desa Genting Pulur	Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja	75.925.714,00
<b>JUMLAH</b>			<b>828.057.714,00</b>

**Tabel 92**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**  
**Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	463.800.000,00	460.784.099,00	99,35	3.015.901,00
<b>JUMLAH</b>		<b>463.800.000,00</b>	<b>460.784.099,00</b>	<b>99,35</b>	<b>3.015.901,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp463.800.000,00 terealisasi sebesar Rp460.784.099,00 atau sebesar 99,35%.

Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 93**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	397.127.718,00	397.127.718,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>397.127.718,00</b>	<b>397.127.718,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp397.127.718,00 terealisasi sebesar Rp397.127.718,00 atau sebesar 100,00%.

**Tabel 94**  
**Daftar Penerima**  
**Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P)	Tarempa	51.262.752,00
2	Partai Bulan Bintang (Pbb)	Tarempa	43.173.642,00
3	Partai Golongan Karya (Golkar)	Tarempa	51.262.752,00
4	Partai Demokrat	Tarempa	32.768.826,00
5	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Tarempa	17.732.598,00

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
6	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Tarempa	25.250.712,00
7	Partai Amanat Nasional (Pan)	Tarempa	50.929.671,00
8	Partai Persatuan Pembangunan (Ppp)	Tarempa	74.705.310,00
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Tarempa	28.010.526,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Tarempa	22.030.929,00
<b>JUMLAH</b>			<b>397.127.718,00</b>

#### 7.6.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial - LRA

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang menganggarkan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas dapat diungkapkan pada tabel berikut:

Tabel 95  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.446.084.030,00	161.614.000,00	11,18	(1.284.470.030,00)	2.476.989.500,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	79.992.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.446.084.030,00</b>	<b>161.614.000,00</b>	<b>11,18</b>	<b>(1.284.470.030,00)</b>	<b>2.556.981.500,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.446.084.030,00 terealisasi sebesar Rp161.614.000,00 atau 11,18% dan mengalami penurunan sebesar Rp2.395.367.500,00 atau sebesar 93,68% dibandingkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp2.556.981.500,00.

**Tabel 96**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.970.000,00	33.940.000,00	99,91	30.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.412.114.030,00	127.674.000,00	9,04	(1.284.440.030,00)
3	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.446.084.030,00</b>	<b>161.614.000,00</b>	<b>11,18</b>	<b>(1.284.410.030,00)</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang per SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.446.084.030,00 terealisasi sebesar Rp161.614.000,00 atau sebesar 11,18%.

**Tabel 97**  
**Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Alamat	Nominal
1	2	3	4
1	Darwis	Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur	7.000.000,00
2	Heroni Tarmizi	Desa Putik Kecamatan Palmatak	5.050.000,00
3	Maslinus	Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan	4.950.000,00
4	Mukhtar	Desa Tarempa Kecamatan Siantan	7.530.000,00
5	Muchtar. S	Desa Belibak Kecamatan Palmatak	5.400.000,00
6	Zulkarnain	Desa Putik Kecamatan Palmatak	4.040.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>33.940.000,00</b>

**Tabel 98**  
**Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No	NIK	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
1	2105020107510009	M. Nuh	Palatak	3.114.000,00
2	2105024107490008	Salipah	Palatak	3.114.000,00
3	2105024706560001	Aminah	Palatak	3.114.000,00
4	2105026605360001	Arpah	Palatak	3.114.000,00
5	2105021209540001	Sulaiman	Palatak	3.114.000,00
6	2105022107200005	Laili	Palatak	3.114.000,00
7	2105020506090023	Ilyas	Palatak	3.114.000,00
8	2105022004620001	Harun	Palatak	3.114.000,00
9	2105020708600001	Abdul Malik	Palatak	3.114.000,00

No	NIK	Nama Penerima	Alamat	Jumlah
1	2	3	4	5
10	2105020102600002	Khairuddin	Palmatak	3.114.000,00
11	2101144107740002	Robiati	Siantan Utara	3.114.000,00
12	2105021003750002	Zakaria P.M.B	Siantan Utara	3.114.000,00
13	2105024107410002	Masanah	Siantan Utara	3.114.000,00
14	2105020107710017	Azman	Kute Siantan	3.114.000,00
15	2105024107570008	Maryam	Kute Siantan	3.114.000,00
16	2105021511410001	Ibrahim Toib	Kute Siantan	3.114.000,00
17	2105024107580011	Zaayah	Kute Siantan	3.114.000,00
18	2105020105500001	Abdul Samat	Kute Siantan	3.114.000,00
19	2105020107610001	Adam	Kute Siantan	3.114.000,00
20	2105075405420001	Mastura	Siantan Tengah	3.114.000,00
21	2105075208570000	Sanim	Siantan Tengah	3.114.000,00
22	2105074703610001	Yang Besar	Siantan Tengah	3.114.000,00
23	2105074701400001	Dima	Siantan Tengah	3.114.000,00
24	2105075007580002	Habsah	Siantan Tengah	3.114.000,00
25	2105070405660001	Nizam	Siantan Tengah	3.114.000,00
26	2105070107500001	Engsan	Siantan Tengah	3.114.000,00
27	2105074107750001	Mui	Siantan Tengah	3.114.000,00
28	2105034203640001	Maimun	Siantan Timur	3.114.000,00
29	2105020901430000	Zhainudin	Siantan Timur	3.114.000,00
30	2105030107410001	M.Isa	Siantan Timur	3.114.000,00
31	2105014101570001	Murhini	Siantan	3.114.000,00
32	2105014107440001	Sarinah	Siantan	3.114.000,00
33	2105040107570004	Yusoa Gigok	Siantan Selatan	3.114.000,00
34	2105040107710001	Banggo	Siantan Selatan	3.114.000,00
35	2105040304420001	Senek	Siantan Selatan	3.114.000,00
36	3204252102600001	IR.M.Machrus.S	Jemaja Timur	3.114.000,00
37	2105055001700001	Murni Yati	Jemaja Timur	3.114.000,00
38	2105054107420001	Nurpah	Jemaja Timur	3.114.000,00
39	2105051007420000	M. Ali M Nur	Jemaja Timur	3.114.000,00
40	2105064107480001	Zainab	Jemaja	3.114.000,00
41	2105060107410000	Kateman	Jemaja	3.114.000,00
<b>Total</b>				<b>127.674.000,00</b>

#### 7.6.1.2.2. BELANJA MODAL – LRA

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset

Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 99**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Tanah	145.000.000,00	0,00	0,00	(145.000.000,00)	80.343.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.659.873.476,00	51.188.694.187,00	83,02	(10.471.179.289,00)	28.836.390.808,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.485.585.922,00	34.500.354.929,00	75,85	(10.985.230.993,00)	35.745.221.460,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	142.355.782.311,00	96.909.592.427,00	68,08	(45.446.189.884,00)	54.961.403.287,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.632.691.460,00	1.692.901.437,00	103,69	60.209.977,00	778.576.900,00
<b>JUMLAH</b>		<b>251.278.933.169,00</b>	<b>184.291.542.980,00</b>	<b>73,34</b>	<b>(66.987.390.189,00)</b>	<b>120.401.935.455,00</b>

Tabel di atas menunjukkan jumlah anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp251.278.933.169,00 terealisasi sebesar Rp184.291.542.980,00 atau 73,34% dan mengalami kenaikan sebesar Rp63.889.602.525,00 atau sebesar 53,06% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp120.401.935.455,00. Kenaikan ini disebabkan adanya penyaluran Kurang Bayar (KB) atas Dana Bagi Hasil ke Kas Daerah sehingga SKPD bisa memaksimalkan dalam realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023

#### 7.6.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah - LRA

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap Tanah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 pada Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 100**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00		80.343.000,00
2	Belanja Modal Tanah Persil	45.000.000,00	0,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00
3	Belanja Modal Tanah Non Persil	100.000.000,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>145.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(145.000.000,00)</b>	<b>80.343.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp145.000.000,00 tidak terdapat realisasi pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.6.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 101**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	851.089.600,00	663.468.450,00	77,96	(187.621.150,00)	123.587.400,00
2	Sekretariat DPRD	456.645.108,00	203.369.000,00	44,54	(253.276.108,00)	456.790.850,00
3	Inspektorat	74.451.068,00	70.500.000,00	94,69	(3.951.068,00)	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.853.422.810,00	4.042.119.522,00	69,06	(1.811.303.288,00)	6.780.873.144,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.523.721.657,00	29.690.795.919,00	94,19	(1.832.925.738,00)	18.006.737.102,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	596.811.908,00	403.910.000,00	67,68	(192.901.908,00)	530.249.000,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	22.465.845,00	18.500.000,00	82,35	(3.965.845,00)	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	243.797.292,00	212.080.000,00	86,99	(31.717.292,00)	16.126.000,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	807.600.354,00	670.087.850,00	82,97	(137.512.504,00)	28.527.000,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	13.669.332.462,00	10.898.989.170,00	79,73	(2.770.434.292,00)	1.137.900.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	445.348.734,00	365.261.300,00	82,02	(80.087.434,00)	236.535.000,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.030.876.282,00	1.608.607.670,00	79,21	(422.268.612,00)	442.756.000,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	463.547.435,00	23.842.800,00	5,14	(439.704.635,00)	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.153.061.515	41.390.000,00	3,59	(1.111.671.515,00)	49.617.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	518.855.970,00	518.314.370,00	99,90	(541.600,00)	310.029.500,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	266.333.600,00	208.369.600,00	78,24	(57.964.000,00)	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	290.950.500,00	0,00	0,00	(290.950.500,00)	31.302.000,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	230.983.900,00	140.018.600,00	60,62	(90.965.300,00)	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	29.998.500,00	0,00	0,00	(29.998.500,00)	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.595.200,00	0,00	0,00	(14.595.200,00)	24.992.000,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	177.425.700,00	155.218.950,00	87,48	(22.206.750,00)	140.058.912,00
22	Kecamatan Jemaja	170.672.754,00	68.431.500,00	40,10	(102.241.254,00)	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	100.389.200,00	0,00	0,00	(100.389.200,00)	237.191.900,00
24	Kecamatan Palmatak	37.170.000,00	37.146.150,00	99,94	(23.850,00)	0,00
25	Kecamatan Siantan	218.392.600,00	201.910.000,00	92,45	(16.482.600,00)	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	50.200.000,00	50.200.000,00	100,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	201.662.000,00	181.900.000,00	90,20	(19.762.000,00)	35.101.500,00
28	Kecamatan Siantan Timur	115.999.200,00	0,00	0,00	(115.999.200,00)	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	40.000.000,00	40.000.000,00	100	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	58.997.100,00	0,00	0,00	(58.997.100,00)	0,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
31	Kecamatan Kute Siantan	91.088.300,00	87.929.000,00	96,53	(3.159.300,00)	248.016.500,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	717.561.366,00	463.824.320,00	64,64	(253.737.046,00)	0,00
33	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	136.425.516,00	122.510.016,00	89,80	(13.915.500,00)	0,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>61.659.873.476,00</b>	<b>51.188.694.187,00</b>	<b>83,02</b>	<b>(10.471.179.289,00)</b>	<b>28.836.390.808,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.659.873.476,00 terealisasi sebesar Rp51.188.694.187,00 atau 83,02% dan mengalami peningkatan sebesar Rp22.352.303.379,00 atau sebesar 77,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.836.390.808,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin di setiap sub rincian objek pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 102**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Mesin Proses	1.389.810.513,00	1.296.000.000,00	93,25	(93.810.513,00)	101.299.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	119.946.000,00
3	Belanja Modal Electric Generating Set	3.060.588.290,00	2.981.007.090,00	97,40	(79.581.200,00)	0,00
4	Belanja Modal Pompa	6.550.000,00	5.100.000,00	77,86	(1.450.000,00)	122.000.000,00
5	Belanja Modal Mesin Bor	6.503.900,00	0,00	0,00	(6.503.900,00)	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Selam	97.600.000,00	0,00	0,00	(97.600.000,00)	192.060.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	761.001.704,00	379.618.300,00	49,88	(381.383.404,00)	244.410.112,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	307.874.456,00	132.750.000,00	43,12	(175.124.456,00)	165.000.000,00
12	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
15	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.450.000.000,00	9.839.325.000,00	94,16	(610.675.000,00)	0,00
16	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.718.600,00
17	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00
18	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.440.000	4.400.000	99,10	(40.000,00)	0,00
19	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50	(300.000,00)	0,00
20	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	13.152.926,00	3.219.000,00	24,47	(9.933.926,00)	0,00
21	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.750.000,00	0,00	0,00	(12.750.000,00)	0,00
22	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	713.785.214,00	374.361.610,00	52,45	(339.423.604,00)	173.165.000,00
23	Belanja Modal Mebel	1.548.016.172,00	712.432.800,00	46,02	(835.583.372,00)	655.962.140,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
24	Belanja Modal Alat Pembersih	1.387.743.700,00	1.303.948.000,00	93,96	(83.795.700,00)	0,00
25	Belanja Modal Alat Pendingin	971.087.606,00	775.898.936,00	79,90	(195.188.670,00)	177.531.848,00
26	Belanja Modal Alat Dapur	9.556.758,00	8.644.458,00	90,45	(912.300,00)	5.852.800,00
27	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	198.924.924,00	77.042.000,00	38,73	(121.882.924,00)	461.174.900,00
28	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	362.950.080,00	184.637.400,00	50,87	(178.312.680,00)	0,00
29	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	822.044.280,00	213.526.058,00	25,98	(608.518.222,00)	133.639.100,00
30	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	10.918.000,00	0,00	0,00	(10.918.000,00)	49.940.000,00
31	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	291.474.436,00	236.690.188,00	81,20	(54.784.248,00)	60.096.000,00
32	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	91.575.000,00
33	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	37.057.572,00	36.960.000,00	99,74	(97.572,00)	0,00
34	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	74.881.000,00	13.209.000,00	17,64	(61.672.000,00)	0,00
35	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	191.501.700,00	99.126.000,00	51,76	(92.375.700,00)	795.896.850,00
36	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	86.618.094,00	82.520.030,00	95,27	(4.098.064,00)	85.462.300,00
37	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.499.106.026,00	1.199.804.640,00	80,03	(299.301.386,00)	362.498.000,00
38	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	111.752.000,00	79.731.500,00	71,35	(32.020.500,00)	40.073.000,00
39	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.822.500,00	0,00	0,00	(10.822.500,00)	0,00
40	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812.000,00
41	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	28.225.080,00	28.200.000,00	99,91	(25.080,00)	0,00
42	Belanja Modal Switcher/ Menara Antena	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
43	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975.000,00
44	Belanja Modal Program Input Equipment	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
45	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	133.200.000,00	0,00	0,00	(133.200.000,00)	0,00
46	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.655.976.569,00	9.190.423.060,00	95,18	(465.553.509,00)	1.280.480.155,00
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	5.240.492.808,00	4.994.770.793,00	95,31	(245.722.015,00)	0,00
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.314.096.041,00	3.161.310.622,00	95,39	(152.785.419,00)	3.504.438.758,00
49	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.045.170,00	7.045.170,00	100,00	0,00	80.671.040,00
50	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	84.022.103,00	84.022.000,00	100,00	(103,00)	0,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.106.748.500,00	1.077.567.850,00	97,36	(29.180.650,00)	543.635.666,00
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	1.522.058.797,00	1.495.204.900,00	98,24	(26.853.897,00)	0,00
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.162.745.700,00	1.061.880.000,00	91,33	(100.865.700,00)	8.009.338.600,00
54	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	396.434.700,00	9.464.000,00	2,39	(386.970.700,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	29.382.300,00	29.200.000,00	99,38	(182.300,00)	396.577.600,00
54	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950.000,00
55	Belanja Modal Photo and Film Equipment	31.772.100,00	30.870.000,00	97,16	(902.100,00)	0,00
54	Belanja Modal Komputer Jaringan	212.000,00	212.000,00	100,00	0,00	0,00
55	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	0,00	99.892.000,00
56	Belanja Modal Personal Computer	3.369.054.914	1.869.720.150,00	55,50	(1.499.334.764,00)	554.382.225,00
57	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.607.900,00	13.400.000,00	28,15	(34.207.900,00)	1.422.553.000,00
58	Belanja Modal Peralatan Mainframe	173.000.000,00	0,00	0,00	(173.000.000,00)	0,00
59	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	655.252.966,00	476.552.100,00	72,73	(178.700.866,00)	516.687.920,00
60	Belanja Modal Peralatan Jaringan	652.181.400,00	523.364.000,00	80,25	(128.817.400,00)	29.295.000,00
61	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.248.188.684,00	2.818.381.100,00	86,77	(429.807.584,00)	255.176.050,00
62	Belanja Modal Sepatu Lapangan	21.420.000,00	3.569.760,00	16,67	(17.850.240,00)	0,00
63	Belanja Modal Baju Pengaman	279.748.800,00	279.142.800,00	99,78	(606.000,00)	0,00
64	Belanja Modal Topi Kerja	9.188.000,00	0,00	0,00	(9.188.000,00)	0,00
65	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	225.425.200,00	225.186.400,00	99,89	(238.800,00)	437.712.000,00
66	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	288.329.041,00	171.128.700,00	59,35	(117.200.341,00)	0,00
67	Belanja Modal Rambu Bersuar	858.775.194,00	302.580.000,00	35,23	(556.195.194,00)	199.700.000,00
68	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.372.195.484,00	397.779.000,00	28,99	(974.416.484,00)	573.264.000,00
69	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	553.706.184,00	73.676.250,00	13,31	(480.029.934,00)	0,00
70	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	355.146.000,00
71	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.656.165.500,00	2.772.140.522,00	104,37	115.975.022,00	3.367.656.144,00
72	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	6.612.600,00	0,00	0,00	(6.612.600,00)	0,00
73	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	29.003.900,00	0,00	0,00	(29.003.900,00)	0,00
75	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	680.000,00	0,00	0,00	(680.000,00)	0,00
76	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	3.142.800,00	3.141.000,00	99,94	(1.800,00)	0,00
77	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	37.271.190,00	37.110.000,00	99,57	(161.190,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>61.659.873.476,00</b>	<b>51.188.694.187,00</b>	<b>83,02</b>	<b>10.471.179.289,00</b>	<b>28.836.390.808,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.659.873.476,00 terealisasi sebesar Rp51.188.694.187,00 atau 83,02% dan mengalami peningkatan sebesar Rp22.352.303.379,00 atau sebesar 71,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.836.390.808,00. Anggaran dan realisasi diatas merupakan akun sub rincian objek belanja yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

### 7.6.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 103  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	198.000.000,00	0,00	0,00	(198.000.000,00)	198.011.494,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.214.077.869,00	15.715.732.941,00	81,79	(3.498.344.928,00)	20.408.810.842,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.526.043.932,00	6.837.450.520,00	90,85	(688.593.412,00)	1.160.874.324,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.134.921.006,00	7.032.351.438,00	57,95	(5.102.569.568,00)	8.479.854.075,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	1.706.660.429,00	1.630.652.619,00	95,55	(76.007.810,00)	147.298.750,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	3.923.482.686,00	3.284.167.411,00	83,71	(639.315.275,00)	2.496.653.478,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	838.345.800,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.372.697,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	782.400.000,00	0,00	0,00	(782.400.000,00)	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.485.585.922,00</b>	<b>34.500.354.929,00</b>	<b>75,85</b>	<b>(10.985.230.993,00)</b>	<b>35.745.221.460,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.485.585.922,00 terealisasi sebesar Rp34.500.354.929,00 atau 75,85%. Mengalami penurunan sebesar Rp1.244.866.531,00 atau sebesar 3,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.35.745.221.460,00.

**Tabel 104**  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.143.546.686,00	815.057.916,00	71,27	(328.488.770,00)	311.102.550,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	219.180.000,00	20.979.000,00	9,57	(198.201.000,00)	1.233.041.014,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.526.043.932,00	6.837.450.520,00	90,85	(688.593.412,00)	1.160.874.324,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.712.301.014,00	6.623.957.722,00	61,84	(4.088.343.292,00)	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.528.241.954,00	15.030.733.941,00	81,12	(3.497.508.013,00)	20.408.810.842,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	685.835.915,00	684.999.000,00	99,88	(836.915,00)	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.322.768.400,00	3.033.312.711,00	91,29	(289.455.689,00)	2.109.233.478,00
8	Belanja Modal Bangunan Terbuka	749.534.360,00	101.686.119,00	13,57	(647.848.241,00)	157.958.900,00
9	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.760.000,00
10	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	871.875.000,00	828.014.674,00	94,97	(43.860.326,00)	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	330.535.971,00	0,00	0,00	(330.535.971,00)	8.982.904.858,00
12	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	734.999.810,00	198.326.848,00	26,98	(536.672.962,00)	121.322.000,00
13	Belanja Modal Bangunan Parkir	275.851.370,00	251.473.049,00	91,16	(24.378.321,00)	0,00
14	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	198.011.494,00
17	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	544.809.000,00
18	Belanja Modal Pagar	199.875.859,00	0,00	0,00	(199.875.859,00)	427.393.000,00
19	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	184.995.651,00	74.363.429,00	40,20	(110.632.222,00)	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.485.585.922,00</b>	<b>34.500.354.929,00</b>	<b>75,85</b>	<b>(10.985.230.993,00)</b>	<b>35.745.221.460,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.485.585.922,00 terealisasi sebesar Rp34.500.354.929,00 atau 75,85% dan mengalami penurunan sebesar Rp1.244.866.531,00 atau sebesar 3,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.745.221.460,00.

#### 7.6.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 105  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	35.123.000,00	0,00	0,00	(35.123.000,00)	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	127.999.300,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	200.000.000,00	199.333.100,00	99,67	(666.900,00)	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	137.188.018.072,00	94.521.946.536,00	68,90	(42.666.071.536,00)	52.942.424.926,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	195.692.876,00	0,00	0,00	(195.692.876,00)	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	4.736.948.363,00	2.188.312.791,00	46,20	(2.548.635.572,00)	1.890.979.061,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa. Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	142.355.782.311,00	96.909.592.427,00	68,08	(45.446.189.884,00)	54.961.403.287,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp142.355.782.311,00 terealisasi sebesar Rp96.909.592.427,00 atau 68,08% dan mengalami kenaikan sebesar Rp41.948.189.140,00 atau sebesar 76,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.961.403.287,00.

**Tabel 106**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	83.587.749.206,00	62.652.897.152,00	74,95	(20.934.852.054,00)	40.636.420.719,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	29.409.562.863,00	13.046.878.777,00	44,36	(16.362.684.086,00)	154.493.900,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	10.000.004.590,00	9.176.924.402,00	91,77	(823.080.188,00)	393.151.000,00
4	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.080.691.465,00	1.036.143.200,00	95,88	(44.548.265,00)	1.554.214.800,00
5	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	3.302.270.811,00	624.483.967,00	18,91	(2.677.786.844,00)	1.249.279.820,00
6	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	4.736.948.363,00	2.188.312.791,00	46,2	(2.548.635.572,00)	1.838.790.061,00
7	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0,000	0,000	0,000	0,00	317.488.342,00
8	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.573.082.460,00	1.573.082.460,00	100	0,00	2.816.205.354,00
9	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	2.644.627.680,00	2.644.627.624,00	99,99	(56,00)	0,00
10	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	61.384.800,00
11	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	400.000.000,00	199.739.974,00	49,93	(200.260.026,00)	52.189.000,00
12	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.318.164.334,00	1.550.463.159,00	66,88	(767.701.175,00)	0,00
13	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.753.622.723,00	1.302.971.742,00	74,3	(450.650.981,00)	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00	199.333.100,00	99,67	(666.900,00)	221.874.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	886.071.015,00	631.576.727,00	71,28	(254.494.288,00)	0,00
16	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	35.123.000,00	0,00	0,00	(35.123.000,00)	127.999.300,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
17	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.912.191,00
18	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	238.047.270,00	0,00	0,00	(238.047.270,00)	0,00
19	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	189.816.531,00	82.157.352,00	43,28	(107.659.179,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>142.355.782.311,00</b>	<b>96.909.592.427,00</b>	<b>68,08</b>	<b>(45.446.189.884,00)</b>	<b>54.961.403.287,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp142.355.782.311,00 terealisasi sebesar Rp96.909.592.427,00 atau 68,08% dan mengalami kenaikan sebesar Rp41.948.189.140,00 atau sebesar 76,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.961.403.287,00.

#### 7.6.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap selain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 107  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	79.531.500,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.630.581.460,00	1.690.921.437,00	103,70	60.339.977,00	382.553.400,00
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.800,00	0,00	0,00	(110.800,00)	197.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.999.200,00	1.980.000,00	99,04	(19.200,00)	0,00
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646.000,00
13	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	98.346.000,00
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jemaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Palmatak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Siantan Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Siantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siantan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.632.691.460,00</b>	<b>1.692.901.437,00</b>	<b>103,69</b>	<b>(60.209.977,00)</b>	<b>778.576.900,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.632.691.460,00 terealisasi sebesar Rp1.692.901.437,00 atau 103,69% dan mengalami kenaikan sebesar Rp914.324.537,00 atau sebesar 117,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp778.576.900,00.

Tabel 108  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2022 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	59.475.000,00
3	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	184.985.900,00	172.136.580,00	93,05	(12.849.320,00)	0,00
4	Belanja Modal Buku Laporan	40.800,00	0,00	0,00	(40.800,00)	0,00
5	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	70.000,00	0,00	0,00	(70.000,00)	0,00
6	Belanja Modal Alat Musik	141.523.900,00	99.080.070,00	70,01	(42.443.830,00)	0,00
7	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	201.257.540,00	198.246.000,00	98,50	(3.011.540,00)	0,00
8	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.999.200,00	1.980.000,00	99,04	(19.200,00)	0,00
9	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	0,00	396.023.500,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.102.814.120,00	1.221.458.787,00	110,76	118.644.667,00	323.078.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.632.691.460,00</b>	<b>1.692.901.437,00</b>	<b>103,69</b>	<b>(60.209.977,00)</b>	<b>778.576.900,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.632.691.460,00 terealisasi sebesar Rp1.692.901.437,00 atau 103,69% dan mengalami kenaikan sebesar Rp914.324.537,00 atau sebesar 54,01% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp778.576.900,00.

### 7.6.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang tidak terdapat dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain bencana alam dan lain sebagainya. Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2023 dapat di rinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 109  
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Terduga	68.799.839.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>68.799.839.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.799.839.255,00 dan tidak terdapat realisasi pada anggaran Belanja Tak Terduga. Penurunan ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah tidak lagi menangani wabah Covid-19.

**Tabel 110**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	68.799.839.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>68.799.839.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.799.839.255,00 dianggarkan pada DPA/DPPA SKPKD-PPKD. Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat realisasi pada akun belanja ini.

#### 7.6.1.2.4. BELANJA TRANSFER - LRA

##### 7.6.1.2.4.1. Belanja Transfer Bagi Hasil - LRA

Belanja Bagi Hasil adalah penyaluran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat diungkapkan sebagai berikut.

**Tabel 111**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.750.000.000,00	1.871.700.186,00	52,89	(878.299.814,00)	1.691.880.710,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	390.032.103,00	100,00	390.032.103,00	125.009.675,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.750.000.000,00</b>	<b>2.261.732.289,00</b>	<b>82,24</b>	<b>(488.267.711,00)</b>	<b>1.816.890.385,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.261.732.289,00 atau 82,24% dan mengalami peningkatan sebesar Rp444.841.904,00 atau sebesar 24,48% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.816.890.385,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

**Tabel 112**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah**  
**Per Desa Pada Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Tarempa Barat	116.839.990,00	96.094.828,00	82,24	(20.745.162,00)	80.100.153,00
2	Desa Tarempa Selatan	137.239.651,00	112.872.490,00	82,24	(24.367.161,00)	94.085.228,00
3	Desa Tarempa Timur	122.886.796,00	101.068.013,00	82,24	(21.818.783,00)	84.245.567,00
4	Desa Pesisir Timur	47.911.334,00	39.404.586,00	82,24	(8.506.748,00)	32.845.819,00
5	Desa Sri Tanjung	67.930.077,00	55.868.963,00	82,24	(12.061.114,00)	46.569.754,00
6	Desa Tarempa Barat Daya	75.980.997,00	62.490.427,00	82,24	(13.490.570,00)	52.089.097,00
7	Desa Mampok	36.033.415,00	29.635.614,00	82,24	(6.397.801,00)	17.502.369,00
8	Desa Rewak	41.302.597,00	33.969.243,00	82,24	(7.333.354,00)	28.315.171,00
9	Desa Air Biru	34.769.576,00	28.596.171,00	82,24	(6.173.405,00)	23.836.431,00
10	Desa Batu Berapit	35.867.379,00	29.499.058,00	82,24	(6.368.321,00)	24.589.035,00
11	Desa Landak	58.242.713,00	47.901.609,00	82,24	(10.341.104,00)	39.928.540,00
12	Desa Tebang	78.987.273,00	64.962.933,00	82,24	(14.024.340,00)	54.150.062,00
13	Desa Ladan	78.550.185,00	64.603.451,00	82,24	(13.946.734,00)	53.850.414,00
14	Desa Piabung	32.301.999,00	26.566.718,00	82,24	(5.735.281,00)	15.689.923,00
15	Desa Langir	44.176.904,00	36.333.211,00	82,24	(7.843.693,00)	30.285.666,00
16	Desa Candi	45.367.895,00	37.312.739,00	82,24	(8.055.156,00)	31.102.154,00
17	Desa Putik	50.781.639,00	41.765.263,00	82,24	(9.016.376,00)	34.813.570,00
18	Desa Belibak	41.231.057,00	33.910.404,00	82,24	(7.320.653,00)	28.266.127,00
19	Desa Nyamuk	49.222.757,00	40.483.163,00	82,24	(8.739.594,00)	33.744.871,00
20	Desa Batu Belah	38.442.770,00	31.617.183,00	82,24	(6.825.587,00)	26.354.605,00
21	Desa Munjan	31.730.769,00	26.096.911,00	82,24	(5.633.858,00)	21.753.164,00
22	Desa Serat	42.081.360,00	34.609.734,00	82,24	(7.471.626,00)	20.440.014,00
23	Desa Air Putih	34.943.539,00	28.739.248,00	82,24	(6.204.291,00)	23.955.692,00
24	Desa Temburun	56.568.509,00	46.524.663,00	82,24	(10.043.846,00)	38.780.783,00
25	Desa Kiabu	144.376.024,00	118.741.787,00	82,24	(25.634.237,00)	98.977.599,00
26	Desa Telaga	55.930.611,00	46.000.025,00	82,24	(9.930.586,00)	38.343.469,00
27	Desa Mengkait	54.783.348,00	45.056.461,00	82,24	(9.726.887,00)	37.556.958,00
28	Desa Tiangau	56.632.899,00	46.577.620,00	82,24	(10.055.279,00)	38.824.925,00
29	Desa Telaga Kecil	43.220.935,00	35.546.976,00	82,24	(7.673.959,00)	29.630.297,00
30	Desa Lingai	33.120.157,00	27.239.611,00	82,24	(5.880.546,00)	22.705.665,00
31	Desa Air Bini	38.164.866,00	31.388.622,00	82,24	(6.776.244,00)	26.164.086,00
32	Desa Kuala Maras	72.004.479,00	59.219.952,00	82,24	(12.784.527,00)	49.362.968,00
33	Desa Ulu Maras	70.335.162,00	57.847.021,00	82,24	(12.488.141,00)	34.163.622,00
34	Desa Bukit Padi	56.687.241,00	46.622.314,00	82,24	(10.064.927,00)	38.862.180,00
35	Desa Genting Pulur	56.277.520,00	46.285.339,00	82,24	(9.992.181,00)	38.581.294,00
36	Desa Air Asuk	57.375.983,00	47.188.769,00	82,24	(10.187.214,00)	39.334.350,00
37	Desa Air Sena	49.709.147,00	40.883.194,00	82,24	(8.825.953,00)	24.145.029,00
38	Desa Teluk Siantan	43.765.330,00	35.994.713,00	82,24	(7.770.617,00)	30.003.509,00
39	Desa Lidi	38.642.540,00	31.781.483,00	82,24	(6.861.057,00)	18.769.689,00
40	Desa Liuk	36.580.299,00	30.085.397,00	82,24	(6.494.902,00)	25.077.780,00
41	Desa Teluk Sunting	37.099.184,00	30.512.154,00	82,24	(6.587.030,00)	25.433.504,00
42	Desa Impol	34.006.105,00	27.968.257,00	82,24	(6.037.848,00)	16.517.652,00
43	Desa Keramat	33.322.071,00	27.405.674,00	82,24	(5.916.397,00)	22.844.088,00
44	Desa Sunggak	37.541.694,00	30.876.095,00	82,24	(6.665.599,00)	25.736.868,00
45	Desa Mubur	32.809.862,00	26.984.407,00	82,24	(5.825.455,00)	22.492.941,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
46	Desa Piasan	39.103.479,00	32.160.582,00	82,24	(6.942.897,00)	18.993.579,00
47	Desa Bayat	31.867.066,00	26.209.008,00	82,24	(5.658.058,00)	21.846.603,00
48	Desa Payalaman	44.440.871,00	36.550.310,00	82,24	(7.890.561,00)	30.466.628,00
49	Desa Teluk Bayur	31.730.769,00	26.096.911,00	82,24	(5.633.858,00)	21.753.164,00
50	Desa Matak	53.677.151,00	44.146.671,00	82,24	(9.530.480,00)	36.798.600,00
51	Desa Batu Ampar	32.248.930,00	26.523.071,00	82,24	(5.725.859,00)	22.108.403,00
52	Desa Payamaram	35.155.096,00	28.913.242,00	82,24	(6.241.854,00)	24.100.726,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.570.000.000,00</b>	<b>2.261.732.289,00</b>	<b>82,24</b>	<b>(488.267.711,00)</b>	<b>1.816.890.385,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.261.732.289,00 atau 82,24%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.816.890.385,00 mengalami kenaikan sebesar Rp444.841.904,00 atau sebesar 24,48%. Hal ini disebabkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dianggarkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Bagi hasil pajak dan retribusi ini disalurkan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak dan retribusi daerah yang dikompensasikan ke Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 7.6.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan - LRA

Belanja Bantuan Keuangan adalah Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke Pemerintah Desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 113  
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ Kurang	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bantuan Keuangan	123.945.100.700,00	109.883.540.030,00	88,66	(14.061.560.670,00)	102.747.194.910,00
<b>JUMLAH</b>		<b>123.945.100.700,00</b>	<b>109.883.540.030,00</b>	<b>88,66</b>	<b>(14.061.560.670,00)</b>	<b>102.747.194.910,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp123.945.100.700,00 terealisasi sebesar Rp109.883.540.030,00 atau 88,66% dan mengalami peningkatan sebesar Rp7.136.345.120,00 atau sebesar 6,95% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.747.194.910,00. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan atas Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### 7.6.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH - LRA

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali di mana

dalam penganggaran pemerintah dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal antara lain dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali Pinjaman kepada Masyarakat, sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal antara lain dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat. dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 7.6.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN - LRA

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun lalu. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 114  
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	102.045.555.597,00	6.984.586.830,57	6,84	(95.060.968.766,43)	48.091.005.786,26
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	865.045.016,02	173,01	365.045.016,02	1.107.568.801,00
<b>JUMLAH</b>		<b>102.545.555.597,00</b>	<b>7.849.631.846,59</b>	<b>7,65</b>	<b>(94.695.923.750,41)</b>	<b>49.198.574.587,26</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.545.555.597 terealisasi sebesar Rp7.849.631.846,59 dan mengalami penurunan sebesar Rp41.348.942.740,67 atau 84,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.198.574.587,26.

#### 7.6.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN - LRA

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 115  
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00	1.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau

100% dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 merupakan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang berada pada SKPD Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

#### 7.6.1.3.3. PEMBIAYAAN NETTO - LRA

Pembiayaan netto merupakan perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 116  
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan	102.545.555.597,00	7.849.631.846,59	7,65	(94.695.923.750,41)	49.198.574.587,26
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100	0,00	1.000.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.545.555.597,00</b>	<b>5.849.631.846,59</b>	<b>5,82</b>	<b>(94.695.923.750,41)</b>	<b>48.198.574.587,26</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.545.555.597,00 terealisasi sebesar Rp5.849.631.846,59 atau 5,82% dan mengalami penurunan sebesar Rp42.348.942.740,67 atau sebesar 87,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.198.574.587,26.

#### 7.6.1.3.4. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN APBD (SiLPA/SiKPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 117  
Anggaran dan Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio (%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	23.949.728.959,68	100,00	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>100,00</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>6.984.586.830,57</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp23.949.728.959,68 atau 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar Rp16.965.142.129,11 atau sebesar 242,89% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.984.586.830,57.

## 7.6.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjelasan atas pos-pos perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2023 sebesar Rp6.984.568.830,57 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar Rp41.106.418.955,69 dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp48.091.005.786,26.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.984.586.830,57 dan mengalami penurunan sebesar Rp41.106.418.955,69 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp48.091.005.786,26.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode pembukuan tahun sebelumnya. Tahun 2023 dan Tahun 2022 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya.

Tabel 118  
Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	2	3	4
1	Sisa Anggaran Lebih Awal	6.984.586.830,57	48.091.005.786,26
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.984.586.830,57	48.091.005.786,26
3	<b>Sub Total (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	23.949.728.959,68	6.984.586.830,57
5	<b>Sub Total (3+4)</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>6.984.586.830,57</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>6.984.586.830,57</b>

### 7.6.3. NERACA

#### 7.6.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### 7.6.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas, Aset Lancar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Kas dan Setara Kas, (2) Investasi Jangka Pendek, (3) Piutang dan (4) Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.815.336.405,41 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 119  
Aset Lancar Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Kas Di Kas Daerah	22.327.961.923,56	6.978.780.311,81
Kas Di Bendahara Penerimaan	15.369.994,00	2.093.290,00
Kas Dana BOS	1,12	3.713.228,76
Kas Lainnya	1.606.397.041,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	1.527.820.534,00	1.429.545.792,08
Piutang Retribusi Daerah	0,00	136.657.400,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	590.980.517,00	503.293.865,00
Piutang Transfer	12.454.416.671,00	12.894.730.089,00
Penyisihan Piutang	(1.268.883.906,33)	(1.091.827.780,53)
Piutang Lainnya	214.473.933,32	214.473.933,32
Persediaan	28.263.789.582,11	26.364.443.448,01
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>65.732.326.290,78</b>	<b>47.435.903.577,45</b>

##### 7.6.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum

disetorkan ke kas daerah, serta uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per tanggal neraca, yang terdiri dari.

Tabel 120  
Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	2	2
Kas di Kas Daerah	22.327.961.923,56	6.978.780.311,81
Kas di Bendahara Penerimaan	15.369.994,00	2.093.290,00
Kas Di Bendahara BOS	1,12	3.713.228,76
Kas Lainnya	1.606.397.041,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.949.728.959,68</b>	<b>6.984.586.830,57</b>

#### 7.6.3.1.1.1.1. Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah. Jumlah Kas Di Kas Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.327.961.923,56 terdiri dari Kas di Kas BUD sebesar Rp21.250.874.783,15 dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1.077.087.140,41 sebagai berikut.

Tabel 121  
Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	2
<b>Kas Di Kas Daerah</b>	
1. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	17.211.236.555,00
2. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	4.039.638.228,15
3. Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi	1.077.087.140,41
<b>Jumlah</b>	<b>22.327.961.923,56</b>

Sado Kas Di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Kas di BUD

Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2023 pada Laporan Keuangan sebesar Rp21.250.874.783,15, saldo kas secara pembukuan sebesar Rp21.255.181.493,15, dan saldo bank sebesar Rp23.881.700.556,15. Perbedaan saldo kas pada Laporan Keuangan, saldo kas buku, dan saldo bank terdiri dari outstanding SP2D-LS pada SKPD dan kesalahan pencatatan oleh bank.

Perbedaan saldo Kas di BUD pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dengan saldo kas buku sebesar Rp4.306.710,00 merupakan kelebihan pencatatan Belanja pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 atas kesalahan bank. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat menelusuri kelebihan pencatatan pengeluaran belanja atas kelebihan debet SP2D oleh bank tersebut. Kelebihan pengeluaran kas akibat kesalahan pencatatan bank berupa kelebihan debet Iuran BPJS pada rekening No.170 – 02 – 00001 sesuai Surat dari Pimpinan PT Bank Riau Kepri Syariah Capem Tarempa kepada

Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 175/PB.02/170/2024 tanggal 18 April 2024.

Saldo bank sebesar Rp23.881.700.556,15 yang terdiri dari saldo pada rekening 170-02-00001 sebesar Rp19.842.062.328,00 dan pada rekening 170-02-00002 sebesar Rp4.039.638.228,15. Perbedaan saldo kas pada Laporan Keuangan dan saldo bank sebesar Rp2.630.825.773,00 yang terdiri dari:

- Kesalahan pencatatan Rek. 170 – 02 – 00001 berupa kelebihan debit sebesar Rp299.313.864,00 dan kekurangan debit sebesar Rp48.998.462,00; dan
- Outstanding SP2D-LS pada SKPD pada Rek. 170 – 02 – 00001 sebesar Rp2.881.141.175,00.

Saldo Rekening Kas Umum Daerah secara pembukuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.255.181.493,15. Saldo bank sebesar Rp23.881.700.556,15 yang terdiri dari saldo pada rekening 170-02-00001 sebesar Rp19.842.062.328,00 dan pada rekening 170-02-00002 sebesar Rp4.039.638.28,15. Perbedaan saldo kas buku dan saldo bank sebesar Rp2.626.519.063,00 yang terdiri dari.

<b>A. Saldo Kas Akhir Buku</b>	<b>21.255.181.493,15</b>
<b>B. Saldo Kas Bank</b>	<b>21.255.181.493,15</b>
<b>1. Saldo Kas Akhir di rekening</b>	<b>23.881.700.556,15</b>
- Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	19.842.062.328,00
- Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002	4.039.638.228,15
<b>2. Item rekonsiliasi</b>	<b>(2.626.519.063,00)</b>
(+) Kesalahan pencatatan Rek. 170 – 02 – 00001 berupa kelebihan debit	303.620.574,00
(-) Kesalahan pencatatan Rek. 170 – 02 – 00001 berupa kekurangan debit	(48.998.462,00)
(-) Outstanding SP2D-LS pada SKPD	(2.881.141.175,00)

Kelebihan debit oleh bank pada rekening No.170 – 02 – 00001 sebesar Rp303.620.574,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 122**  
**Rincian Kelebihan Debit Bank per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Keterangan	Nilai Lebih Debit	Nomor SP2D
1	2	3	4	5
1	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulan januari 2023	6.000,00	32.08/04.0/000005/LS/2.17.3.30.3.31.01.0000/P.01/3/2023
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Pembayaran Belanja Jasa Iklan (Galery) Bulan Mei 2023 Kabar Anambas.Com	1,00	32.08/04.0/000100/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/P.04/7/2023
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bulan Mei s/d Oktober 2023	6.000.000,00	32.08/04.0/000790/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/10/2023
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN	Double Posting Pembayaran Termin 100% Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan	85.885.000,00	32.08/04.0/000322/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/P.10/12/2023

No	Nama OPD	Keterangan	Nilai Lebih Debet	Nomor SP2D
1	2	3	4	5
	KAWASAN PERMUKIMAN			
5	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	PENGAJUAN BELANJA PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KNTOR-KERTAS DAN COVER BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2023	1.777.925,00	32.08/04.0/000062/LS/5.06.0.00.0.00.04.0000/P.10/12/2023
6	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEMBAYARAN BELANJA AHAN KOMPUTER PUSKESMAS LETUNG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT ( APBD 2023)	4.430.541,00	32.08/04.0/000811/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Belanja BPJS Desa	205.521.107,00	SRT B/900.1.3.9/606/BPKPD/SD/1 00.65.72033
<b>TOTAL</b>			<b>303.620.574,00</b>	

Kekurangan debit oleh bank pada rekening No.170 – 02 – 00001 sebesar Rp48.998.462,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 123**  
**Rincian Kurang Debet Bank per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Nama OPD	Keterangan	Nilai Kurang Debet	Nomor SP2D
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Siantan Selatan	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan STQH Ke-VIII Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2023	54,00	32.08/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/P.01/3/2023
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2023 KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	950.000,00	32.08/04.0/000015/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P.01/4/2023
3	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Pembayaran Tunjangan Hari Raya PTT (THR Tahun 2023) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	950.000,00	32.08/04.0/000013/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/P.01/4/2023
4	Inspektorat	Pembayaran Honorarium Tim Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Anambas Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas - Maret s/d April 2023	1.275.000,00	32.08/04.0/000033/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2023
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembayaran Gaji Terusan PNS An. UNIA ULTA ASTARI pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bulan Juli 2023	138.220,00	32.08/04.0/000051/LS/5.01.5.05.0.00.01.0000/P.03/7/2023
6	Inspektorat	Pembayaran Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar - Mei s/d Juni Tahun Anggaran 2023	1.425.000,00	32.08/04.0/000039/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/7/2023
7	Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan bulan Januari s/d April 2023 pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	2.850.000,00	32.08/04.0/000446/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/7/2023
8	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Pembayaran Belanja Jasa Iklan (Banner) Bulan Mei 2023 Liputanesia	10.000,00	32.08/04.0/000171/LS/2.16.2.21.2.20.01.0000/P.04/9/2023
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PEMBAYARAN TERMIN 70% PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	2.000,00	32.08/04.0/000224/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.05/11/2023

No	Nama OPD	Keterangan	Nilai Kurang Debet	Nomor SP2D
1	2	3	4	5
		BESERTA PERABOTNYA SDN 003 BUKIT PADI (DAK 2023)		
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEMBAYARAN PERJADIN DD KEG WORKSHOP KADER POSYANDU TENTANG PERAWATAN JANGKA PANJANG (CAREGIVER INFORMAL) PADA LANJUT USIA SUB KEG PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT ( DAK NON FISIK 2023 )	220.000,00	32.08/04.0/000486/LS/1.02.2.14.00.01.0000/P.07/11/2023
11	Inspektorat	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.135,00	32.08/04.0/000098/LS/6.01.0.00.00.01.0000/P.10/12/202
12	Inspektorat	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.747,00	32.08/04.0/000111/LS/6.01.0.00.00.01.0000/P.10/12/2023
13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PEMBAYARAN PENGADAAN ALAT-ALAT PJOKSBDP SDN 001 TAREMPA KECAMATAN SIANTAN - PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	2.000,00	32.08/04.0/000341/LS/1.01.2.19.00.01.0000/P.10/12/2023
14	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	PERMOHONAN PENCAIRAN LS HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN (KONSELOR P2TP2A) SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	240.000,00	32.08/04.0/000108/LS/1.06.2.08.00.03.0000/P.10/12/2023
15	Sekretariat DPRD	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT SUB KEGIATAN RESES	3.927.273,00	32.08/04.0/000229/LS/4.02.0.00.00.01.0000/P.10/12/2023
16	Sekretariat DPRD	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD BULAN JULI 2023	296.591,00	32.08/04.0/000232/LS/4.02.0.00.00.01.0000/P.10/12/202
17	Sekretariat DPRD	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD BULAN AGUSTUS 2023	296.591,00	32.08/04.0/000233/LS/4.02.0.00.00.01.0000/P.10/12/2023
18	Sekretariat DPRD	PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME,FILM DAN PEMOTRETAN GALLERY FOTO DPRD ANAMBAS BULAN OKTOBER 2023 MEDIA WARTA KEPRI PADA KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	1,00	32.08/04.0/000303/LS/4.02.0.00.00.01.0000/P.10/12/2023
19	Sekretariat DPRD	PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME,FILM DAN PEMOTRETAN GALLERY FOTO DPRD ANAMBAS BULAN SEPTEMBER 2023 MEDIA JURNAL SIDIK.COM PADA KEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	1,00	32.08/04.0/000313/LS/4.02.0.00.00.01.0000/P.10/12/2023

No	Nama OPD	Keterangan	Nilai Kurang Debet	Nomor SP2D
1	2	3	4	5
20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PEMBAYARAN BELANJA PAKET PENGIRIMAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR ( APBD 2023)	8.640.000,00	32.08/04.0/000838/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
21	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya TK Negeri Pembina	5,00	32.08/04.0/000418/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.10/12/2023
22	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembayaran Termin 100% Lanjutan pembangunan bak penampungan air lanal tarempa (DAU SG)	27.458.844,00	32.08/04.0/000359/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/P.10/12/2023
<b>TOTAL</b>			<b>48.998.462,00</b>	

Nilai *outstanding* SP2D-LS pada SKPD sebesar Rp2.881.141.175,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 124**  
**Rincian Saldo Outstanding SP2D Per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah Pembayaran	No SP2D
1	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
1	Pembayaran DD	28.415.682,00	32.08/04.0.000864/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
2	Pembayaran Paket	1.380.200,00	32.08/04.0/000856/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
3	Belanja Alat Pendingin & Komputer	13.376.700,00	32.08/04.0/000754/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
4	Pembayaran DD	49.487.164,00	32.08/04.0/000852/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
5	Pembayaran DD	10.395.000,00	32.08/04.0/000863/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
6	Pembayaran Bimbingan Akreditasi	172.864.000,00	32.08/04.0/000780/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
7	Pembayaran DD	30.830.000,00	32.08/04.0/000857/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
8	Pembayaran DD	31.190.212,00	32.08/04.0/000848/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
9	Honorarium Narasumber	85.600.000,00	32.08/04.0/000736/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
10	Honorarium Narasumber	243.200.000,00	32.08/04.0/000735/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
11	Pembayaran Jaspel	297.486.050,00	32.08/04.0.000771/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
12	Honorarium Penanggung Jawab	343.875.000,00	32.08/04.0/000701/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.09/12/2023
13	Pembayaran DD	18.380.000,00	32.08/04.0/000746/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
14	Pembayaran Keg Mkjp	11.100.000,00	32.08/04.0/000876/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
15	Belanja Keg Pelayanan Kesehatan	104.960.000,00	32.08/04.0/000739/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
16	Pembayaran DD	16.830.000,00	32.08/04.0/000853/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
17	Pembayaran Jaspel	27.449.848,00	32.08/04.0/000845/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023

No	Keterangan	Jumlah Pembayaran	No SP2D
1	3	4	5
18	Pembayaran DD	28.250.000,00	32.08/04.0/000774/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
19	Pembayaran Jaspel	38.528.950,00	32.08/04.0/000770/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
20	Pembayaran DD	65.311.000,00	32.08/04.0/000773/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
21	Pembayaran Jaspel	216.694.750,00	32.08/04.0/000781/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
22	Pembayaran Jaspel	7.575.350,00	32.08/04.0/000783/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
23	Pembayaran Jaspel	190.149.533,00	32.08/04.0/000868/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/10/2023
24	Pembayaran DD	242.235.227,00	32.08/04.0/000855/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
25	Pembayaran DD	29.253.417,00	32.08/04.0/000826/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
26	Pembayaran Jaspel	5.031.500,00	32.08/04.0/000802/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
27	Pembayaran DD	3.612.000,00	32.08/04.0/000821/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P.10/12/2023
<b>B</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
28	Perjalanan Dinas	198.441.930,00	32.08/04.0/000398/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/P.10/12/2023
29	Honorarium Tim Eksternal	12.000.000,00	32.08/04.0/000369/LS/4.01.2.23.2.24.01.0000/P.10/12/2023
<b>C</b>	<b>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup</b>		
30	Pembayaran DD	26.456.000,00	32.08/04.0/000158/LS/2.15.2.11.0.00.01.0000/P.10/12/2023
<b>D</b>	<b>Kecamatan Siantan Timur</b>		
31	Pembayaran DD	30.241.100,00	32.08/04.0/000109/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023
32	Pembayaran Honorarium Instruktur Paskibraka	12.700.000,00	32.08/04.0/000079/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P.10/12/2023
<b>E</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>		
33	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana	20.400.000,00	32.08/04.0/000024/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023
<b>F</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		
34	Pembayaran Termin 100% Penyangga Pasir Pantai Tanjung Momong Kec. Siantan	199.739.974,00	32.08/04.0/000346/LS/1.03.1.04.2.10.01.0000/P.10/12/2023
<b>G</b>	<b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>		
35	Pembayaran Honorarium Keg Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Smp	6.000.000,00	32.08/04.0/000485/LS/1.01.2.19.0.00.01.0000/P.10/12/2023
<b>H</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah</b>		
36	Pembayaran ADD	30.373.381,00	32.08/04.0/001055/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023
37	Pembayaran ADD	30.927.207,00	32.08/04.0/001056/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.10/12/2023
<b>I</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>		
38	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	32.08/04.0/000218/LS/3.25.3.27.2.09.01.0000/P.10/12/2023
	<b>Total</b>	<b>2.881.141.175,00</b>	

Outstanding SP2D-LS merupakan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD selaku SKPKD namun dikarenakan sampai tanggal 31 Desember 2023 perbankan belum melakukan posting atas SP2D-LS yang telah diterbitkan, sehingga hal tersebut menjadi Outstanding SP2D. Atas kejadian tersebut BUD telah menghitung sebagai pengeluaran

pada Kas Daerah, hal ini sejalan dengan pencatatan Akuntansi dan Pelaporan pada sistem SIPD sebagai transaksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan, sehingga menambah Pengeluaran pada Realisasi Anggaran (LRA), mencatat Beban pada Laporan Operasional dan Pengeluaran pada Rekening Kasda. Jumlah Outstanding SP2D yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.881.141.175,00.

#### b. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.077.087.140,41. Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.077.087.140,41 terdiri dari.

Tabel 125  
Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas - Dana JKN Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja/Beban	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
Puskesmas Tarempa	829.385.684,00	247.586.209,00	667.771.280,00	409.200.613,00
Puskesmas Palmatak	56.599.594,00	854.050.384,00	775.678.041,00	134.971.937,00
Puskesmas Letung	123.591.281,00	413.155.710,00	355.348.154,00	181.398.837,00
Puskesmas Siantan Selatan	102.492.379,00	222.041.552,00	233.686.799,00	90.847.132,00
Puskesmas Siantan Tengah	65.539.844,94	203.630.984,00	207.487.870,00	61.682.958,94
Puskesmas Siantan Timur	65.613.348,00	239.970.909,00	213.505.084,00	92.079.173,00
Puskesmas Jemaja Timur	100.846.014,47	118.059.505,00	172.297.405,00	46.608.114,47
Puskesmas Kute Siantan	0,00	60.298.375,00	0,00	60.298.375,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.344.068.145,41</b>	<b>2.358.793.628,00</b>	<b>2.625.774.633,00</b>	<b>1.077.087.140,41</b>

#### 7.6.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.369.994,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 126  
Kas Di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Saldo Awal	Retribusi	Non Kapitasi (INA CBG'S)	Jasa Raharja	Setor Ke Kasda	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
RSUD Palmatak	359.000,00	73.186.000,00	3.537.829.700,00	46.116.600,00	3.657.132.300,00	0,00
RSUD Tarempa	718.940,00	86.783.000,00	2.116.075.200,00	5.977.000,00	2.209.554.140,00	0,00
RSUD Jemaja	0,00	132.000,00	284.670.900,00	0,00	284.802.900,00	0,00
Puskesmas Tarempa	51.010,00	3.907.100,00	40.895.812,00	0,00	43.205.812,00	1.597.100,00
Puskesmas Siantan Selatan	340,00	0,00	2.391.640,00	0,00	2.391.640,00	0,00

Puskesmas	Saldo Awal	Retribusi	Non Kapitasi (INA CBG'S)	Jasa Raharja	Setor Ke Kasda	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7
Puskesmas Letung	0,00	2.084.000,00	88.119.400,00	0,00	90.203.400,00	0,00
Puskesmas Siantan Tengah	0,00	0,00	37.705.200,00	0,00	37.705.200,00	0,00
Puskesmas Palmatak	0,00	0,00	99.608.100,00	0,00	99.608.100,00	0,00
Puskesmas Jemaja Timur	0,00	0,00	21.888.100,00	0,00	21.888.100,00	0,00
Puskesmas Siantan Timur	0,00	0,00	2.797.100,00	0,00	2.797.100,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00	317.670.620,00	0,00	0,00	303.920.070,00	13.772.894,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	964.000,00	70.908.000,00	00	00	70.908.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		296.089.202,00			296.089.202,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>2.093.290,00</b>	<b>850.759.922,00</b>	<b>6.231.981.152,00</b>	<b>52.093.600,00</b>	<b>7.120.205.964,00</b>	<b>15.369.994,00</b>

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.369.994,00 merupakan pendapatan yang diterima pada Tahun 2023 dan disetor ke RKUD oleh Petugas Pemungut di Tahun 2024, terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA sebesar Rp1.597.100,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024;
- Retribusi Kios – LRA sebesar Rp12.312.350,00 disetorkan tanggal 7 Februari dan 13 Februari 2024;
- Retribusi Los - LRA sebesar Rp1.438.200,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024; dan
- Pendapatan Denda Retribusi Kios - LRA sebesar Rp22.344,00 disetorkan tanggal 7 Februari 2024.

#### 7.6.3.1.1.1.3. Kas Di Bendahara BOS

Kas Di Bendahara BOS merupakan saldo di rekening dana BOS yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BOS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sumbernya dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke rekening sekolah. Saldo Kas Di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,12 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 127  
Kas Di Bendahara BOS Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

Tingkatan Sekolah	Saldo Awal	Penambahan	Belanja/Beban Tahun 2023	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
SD NEGERI	2.073.096,29	7.654.188.517,00	7.656.261.612,41	0,88
SMP NEGERI	1.640.132,47	4.002.080.845,00	4.003.720.977,23	0,24
<b>JUMLAH</b>	<b>3.713.228,76</b>	<b>11.656.269.362,00</b>	<b>11.659.982.589,64</b>	<b>1,12</b>

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan SD per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,88 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 128**  
**Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Dasar (SD) Per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas
1	2	3
SDN 004 Letung	7136745818	0,19
SDN 001 Nyamuk	7136775906	0,69
<b>JUMLAH</b>		<b>0,88</b>

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkat SMP per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,24 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 129**  
**Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

Nama Sekolah	Nomor Rekening	Saldo Kas
1	2	3
SMPN 3 Telaga	7136779642	0,05
SMPN 4 Genting	7136779715	0,06
SMPN 1 Siantan Timur	7136779855	0,13
<b>JUMLAH</b>		<b>0,24</b>

#### 7.6.3.1.1.1.4. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah Kas dan Setara Kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris. Contohnya adalah pendapatan yang belum dipindahbukukan ke Rekening BUD (*deposit in transit*). Kas Lainnya merupakan saldo Kas pada BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.605.355.041,00 dan Kas Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.042.000,00. Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.606.397.041,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 130**  
**Kas Lainnya Per 31 Desember 2023**

(Dalam Rupiah)

Puskesmas	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4 = 2-3
Puskesmas Tarempa	606.629.000,00	453.380.651,00	153.248.349,00
Puskesmas Palmatak	522.045.000,00	326.632.379,00	195.412.621,00
Puskesmas Letung	503.843.000,00	326.892.092,00	176.950.908,00
Puskesmas Siantan Selatan	731.717.000,00	349.715.000,00	382.002.000,00
Puskesmas Siantan Tengah	656.103.000,00	565.628.114,00	90.474.886,00
Puskesmas Siantan Timur	719.481.020,00	561.484.354,00	157.996.666,00
Puskesmas Jemaja Timur	469.248.000,00	385.222.871,00	84.025.129,00
Puskesmas Kute Siantan	449.445.000,00	296.890.751,00	152.554.249,00
Puskesmas Jemaja Barat	445.047.000,00	369.037.151,00	76.009.849,00
Puskesmas Siantan Utara	424.528.000,00	287.847.616,00	136.680.384,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	863.170.341,02	862.128.341,02	1.042.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>6.391.256.361,02</b>	<b>4.784.859.320,02</b>	<b>1.606.397.041,00</b>

### 7.6.3.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sesuai kewenangannya Pemerintah Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.429.545.792,08. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan dan penambahan piutang pajak karena adanya pelunasan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Jumlah Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.527.820.534,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 131  
Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Restoran	67.504.007,08	0,00	53.158.373,08	14.345.634,00
2	Piutang Pajak Reklame	817.000,00	0,00	817.000,00	0,00
3	Piutang PBBP2	1.361.224.785,00	551.559.840,00	399.309.725,00	1.513.474.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.429.545.792,08</b>	<b>548.431.400,84</b>	<b>13.487.903.507,08</b>	<b>1.527.820.534,00</b>

#### 7.6.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pendapatan Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.345.634,00 merupakan sisa Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 132  
Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Restoran	67.504.007,08	0,00	53.158.373,08	14.345.634,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.504.007,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.158.373,08</b>	<b>14.345.634,00</b>

#### 7.6.3.1.1.2.2. Piutang Pendapatan Pajak Reklame

Saldo Piutang Pendapatan Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 133  
Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Reklame	817.000,00	0,00	817.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.6.3.1.1.2.3. Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB-P2)

Saldo Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.513.474.900,00 dengan mutasi sebagai berikut.

Tabel 134  
Mutasi Piutang PBBP2 Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang PBBP2	1.361.224.785,00	551.559.840,00	399.309.725,00	1.513.474.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.361.224.785,00</b>	<b>551.559.840,00</b>	<b>399.309.725,00</b>	<b>1.513.474.900,00</b>

#### 7.6.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek. Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp136.657.400,00. Mutasi tambah dan kurang Piutang Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 135  
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	6
Piutang Retribusi	136.657.400,00	0,00	136.657.400,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>136.657.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.657.400,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.6.3.1.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan hasil penjualan BMD yang dipisahkan, piutang hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, dan piutang hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang PBBP2 (Denda) Tahun 2023 sebesar Rp590.980.517,00 yang belum dibayarkan Tahun 2023, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp500.062.945,00.

Tabel 136  
Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	3.230.920,00	0,00	3.230.920,00	0,00
2	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	500.062.945,00	0,00	90.917.572,00	590.980.517,00
	<b>Jumlah</b>	<b>503.293.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.148.492,00</b>	<b>590.980.517,00</b>

#### 7.6.3.1.1.4.1. Piutang Remunerasi TDF

Piutang Remunerasi TDF merupakan pendapatan bagi hasil atas penempatan dana atau imbalan bunga atas penyimpanan dana milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada fasilitas TDF. Piutang Remunerasi TDF Tahun 2023 sebesar

Rp0,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.230.290,00. Mutasi tambah dan kurang Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 137  
Mutasi Piutang Remunerasi TDF Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	6
Remunerasi TDF	3.230.920,00	0,00	3.230.920,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.230.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.920,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.6.3.1.1.4.2. Piutang Pendapatan Denda PBB-P2

Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Tahun 2023 sebesar Rp590.980.517,00 merupakan Piutang Denda PBB-P2 yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak sampai Tahun 2023, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp500.062.945,00.

Tabel 138  
Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	26.842.717,00	170.238.841,00	141.931.802,00	251.967.157,00	590.980.517,00
2	Penyisihan	(134.213,59)	(17.023.884,10)	(70.965.901,00)	(251.967.157,00)	(340.091.155,69)
	<b>Nilai Yang Dapat Direalisasikan</b>	<b>26.708.503,42</b>	<b>153.214.956,90</b>	<b>70.965.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.889.361,32</b>

#### 7.6.3.1.1.5. Piutang Transfer

Piutang Transfer merupakan piutang yang timbul karena ada bagian dari dana transfer atas dana bagi hasil pemerintah pusat sesuai PMK maupun dana transfer atas dana bagi hasil provinsi atas sesuai Keputusan Gubernur. Mutasi Piutang Transfer Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 139  
Mutasi Piutang Transfer Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Transfer Antar Daerah	12.894.730.089,00	12.454.416.671,00	12.894.730.089,00	12.454.416.671,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.894.730.089,00</b>	<b>12.454.416.671,00</b>	<b>12.894.730.089,00</b>	<b>12.454.416.671,00</b>

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.454.416.671,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp12.894.730.089,00 merupakan piutang atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 adalah imbalan yang diperoleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 250 Tahun 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Air Permukaan. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 140**  
**Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.150.477.043,00	3.551.384.241,00	3.150.477.043,00	3.551.384.241,00
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB)	2.738.369.681,00	2.465.847.894,00	2.738.369.681,00	2.465.847.894,00
Pajak Air Permukaan	10.647.862,00	9.909.490,00	10.647.862,00	9.909.490,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	6.995.235.503,00	6.427.275.046,00	6.995.235.503,00	6.427.275.046,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.894.730.089,00</b>	<b>12.454.416.671,00</b>	<b>12.894.730.089,00</b>	<b>12.454.416.671,00</b>

#### 7.6.3.1.1.6. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.473.933,32 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp214.473.933,32 merupakan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atas imbalan yang diperoleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan tuntutan ganti rugi daerah terhadap bendahara dan pihak ketiga. Piutang Lainnya Bagian Lancar TP-TGR Tahun 2023 terdiri dari:

- Piutang TGR PT. Natuna Insani berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp96.876.570,47; dan
- Piutang TGR PT. Andesta/R. Taufan Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362,85.

Tidak terdapat penambahan atas Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023. Saldo Piutang Lainnya Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp214.473.933,32 merupakan piutang tuntutan ganti rugi Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 yang telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang diatur paling lambat 24 bulan dari tanggal penandatanganan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak. Saldo piutang lainnya ini telah dilakukan penyisihan per 31 Desember 2022, sehingga nilai piutang lainnya secara netto adalah sebesar Rp0,00.

#### 7.6.3.1.1.7. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.268.883.906 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.091.827.780,53 Penyisihan Piutang Tahun 2023 terdiri dari.

Tabel 141  
Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4
1	Penyisihan Piutang PBB-P2	(595.806.042,69)	(712.884.254,00)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	(281.547.804,52)	(340.091.155,69)
3	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	(1.434.563,40)
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(214.473.933,32)	(214.473.933,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.091.827.780,53)</b>	<b>(1.268.883.906)</b>

Tabel 142  
Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	14.345.634,00	0,00	0,00	14.345.634,00
2	Penyisihan	0,00	(1.434.563,40)	0,00	0,00	(1.434.563,40)
	<b>Piutang Lainnya Netto (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345.634,00</b>
1	Piutang PBB-P2	321.237.525,00	398.527.403,00	244.569.292,00	549.140.680,00	1.513.474.900,00
2	Penyisihan	(1.606.187,63)	(39.852.740,30)	(122.284.646,00)	(549.140.680,00)	(712.884.253,93)
	<b>Piutang Lainnya Netto (1-2)</b>	<b>319.631.337,38</b>	<b>358.674.662,70</b>	<b>122.284.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.590.646,08</b>
1	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	26.842.717,00	170.238.841,00	141.931.802,00	251.967.157,00	590.980.517,00
2	Penyisihan	(134.213,59)	(17.023.884,10)	(70.965.901,00)	(251.967.157,00)	(340.091.155,69)
	<b>Piutang Lainnya Netto (1-2)</b>	<b>26.708.503,42</b>	<b>153.214.956,90</b>	<b>70.965.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.889.361,32</b>
1	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	214.473.933,32	214.473.933,32
2	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(214.473.933,32)	(214.473.933,32)
	<b>Piutang Lainnya Netto (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.6.3.1.1.8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp28.263.789.582,11 terdiri dari.

Tabel 143  
Persediaan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Bahan	4.921.853.548,23	5.049.832.288,00
Suku Cadang	0,00	78.354.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	492.281.236,00	1.007.788.952,00
Obat-obatan	9.717.634.855,25	5.260.664.475,28
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	13.132.019.942,63	14.922.862.487,73
Persediaan dalam Proses	0,00	34.006.345,00
Barang Tak Pakai Habis	0,00	10.934.900,00
<b>Jumlah Akhir Persediaan Per 31 Desember 2023</b>	<b>28.263.789.582,11</b>	<b>26.364.443.448,01</b>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 memiliki 2 (dua) akun untuk menjadikan persediaan s.d. akhir tahun yaitu Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Saldo Persediaan Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai pada akhir priode 31 Desember 2023 sebesar Rp28.263.789.582,11. Mutasi Persediaan Tahun 2023 sebagai berikut:

- Saldo awal persediaan Tahun 2022 Rp26.364.443.448,01
- (+) Persediaan pada tahun berjalan Rp31.516.401.603,11
- (-) Persediaan atas penyesuaian saldo tahun lalu dan pemakaian Rp29.617.055.469,01
- Saldo akhir Tahun 2023 Rp28.263.789.582,11

Rincian Persediaan pada setiap Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 144  
Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	49.755.620,00	326.671.450,00	336.574.935,00	39.852.135,00
Sekretariat DPRD	27.438.950,00	318.014.300,00	345.453.250,00	0,00
Inspektorat	700.300,00	38.286.500,00	38.567.600,00	419.200,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.123.691.285,00	359.061.180,00	1.236.206.385,00	246.546.080,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.736.281.813,01	14.831.842.726,98	11.736.281.813,01	14.831.842.726,98
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.926.182.879,00	10.834.344.990,63	12.133.014.455,00	10.627.513.414,63
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	493.950,00	47.989.607,00	48.152.157,00	331.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127.481.241,00	39.033.105,00	153.884.726,00	12.629.620,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	20.900.000,00	107.216.841,50	56.324.800,00	71.792.041,50
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	30.405.458,00	150.530.982,00	150.954.407,00	29.982.033,00

SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.552.700,00	421.283.654,00	408.792.009,00	55.044.345,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	833.060,00	93.491.200,00	93.210.560,00	1.113.700,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	7.127.022,00	512.484.463,00	514.003.485,00	5.608.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	800.400,00	59.142.000,00	59.246.800,00	695.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0	75.447.000,00	73.752.000,00	1.695.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	986.000,00	30.937.000,00	30.546.493,00	1.376.507,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	139.947.823,00	196.146.300,00	205.857.838,00	130.236.285,00
Badan Perencanaan Pengembangan Daerah	673.560,00	117.883.500,00	117.967.060,00	590.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	578.000,00	34.968.000,00	29.930.500,00	5.615.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.076.121.012,00	2.221.930.014,00	1.115.657.078,00	2.182.393.948,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.801.000,00	52.311.319,00	54.937.919,00	174.400,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0	23.175.000,00	22.851.160,00	323.840,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	331.200,00	31.317.400,00	30.564.800,00	1.083.800,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	493.500,00	72.257.127,00	71.944.177,00	806.450,00
Kecamatan Jemaja	1.478.370,00	34.188.500,00	34.681.770,00	985.100,00
Kecamatan Jemaja Timur	212.000,00	15.025.000,00	14.729.000,00	508.000,00
Kecamatan Palmatak	740.370,00	62.485.070,00	62.339.440,00	886.000,00
Kecamatan Siantan	1.048.150,00	42.469.250,00	41.894.694,00	1.622.706,00
Kecamatan Siantan Selatan	948.772,00	69.641.200,00	69.514.072,00	1.075.900,00
Kecamatan Siantan Tengah	32.767.413,00	66.457.400,00	98.285.263,00	939.550,00
Kecamatan Siantan Timur	1.910.000,00	177.414.823,00	178.584.223,00	740.600,00
Kecamatan Siantan Utara	160.000,00	14.008.900,00	13.578.200,00	590.700,00
Kecamatan Jemaja Barat	906.600,00	18.553.800,00	19.235.400,00	225.000,00
Kecamatan Kute Siantan	7.695.000,00	20.392.000,00	19.537.000,00	8.550.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>26.364.443.448,01</b>	<b>31.516.401.603,11</b>	<b>29.617.055.469,01</b>	<b>28.263.789.582,11</b>

Rincian persediaan Obat-Obatan pada setiap UPT dan SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 145**  
**Rincian persediaan Obat-Obatan Pada Setiap UPT dan SKPD**

(Dalam Rupiah)

No	DINKES PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat dan BMHP yang Baik
1	2	3
1	DINAS KESEHATAN – PPKB	152.956.000,00
2	BALAI FARMASI & ALAT KESEHATAN	3.969.412.598,77
3	RSUD TAREMPA	3.229.567.001,29
4	RSUD PALMATAK	2.916.486.687,05

No	DINKES PPKB dan UPT	Nilai Persediaan Obat dan BMHP yang Baik
1	2	3
5	RSUD JEMAJA	1.253.903.587,28
6	PUSKESMAS TAREMPA	474.205.664,91
7	PUSKESMAS PALMATAK	358.857.051,30
8	PUSKESMAS LETUNG	424.583.379,72
9	PUSKESMAS SIANTAN SELATAN	300.299.094,00
10	PUSKESMAS SIANTAN TENGAH	255.473.621,22
11	PUSKESMAS SIANTAN TIMUR	231.989.777,76
12	PUSKESMAS JEMAJA TIMUR	230.111.980,12
13	PUSKESMAS JEMAJA BARAT	99.867.551,87
14	PUSKESMAS SIANTAN UTARA	145.274.682,28
15	PUSKESMAS KUTE SIANTAN	182.784.118,99
<b>Total</b>		<b>14.225.772.796,56</b>

#### 7.6.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.337.507.035,59 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.513.807.035,59 dan Investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.823.700.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 146  
Investasi Jangka Panjang Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
INVESTASI JANGKA PANJANG		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	15.241.643.610,00	12.677.505.291,00
Dana Bergulir Tak Tertagih	(11.727.836.574,42)	(10.927.858.247,23)
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>3.513.807.035,59</b>	<b>1.749.647.043,77</b>
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah s/d Tahun 2023 (Bank Riau)	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00
Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2023	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>7.823.700.000,00</b>	<b>7.823.700.000,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>11.337.507.035,59</b>	<b>9.573.347.043,77</b>

### 7.6.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan.

Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan 5 Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.513.807.035,59 merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir yang disajikan dengan *net realizable value*. Rincian nilai investasi non permanen lainnya - dana bergulir per 31 Desember 2023 yang terdapat pada UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagai berikut.

Tabel 147  
Dana Bergulir Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
1	2
<b>A. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian</b>	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	12.677.505.291,00
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2023	2.000.000.000,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2023	(858.795.016,00)
<b>4. Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Sebelum Penyisihan (1+2+3)</b>	<b>13.818.710.275,00</b>
5. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2023	(10.304.903.239,00)
<b>6. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Netto (4 – 5)</b>	<b>3.513.807.035,59</b>
<b>B. Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan</b>	
1. Dana Bergulir Per 31 Desember 2022	1.429.183.335,00
2. Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2023	0,00
3. Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2023	(6.250.000,00)
<b>4. Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Sebelum Penyisihan (1+2+3)</b>	<b>1.422.933.335,00</b>
5. Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2023	(1.422.933.335,00)
<b>6. NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2023 Netto (4 – 5)</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah A.6 + B.6</b>	<b>3.513.807.035,59</b>

Dari saldo di atas diketahui NRV per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.513.807.035,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 148  
NRV Dana Bergulir Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Tahun	Baki Debet	Umur Piutang				Total Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
		0-1 Thn 0,50%	1-2 Thn 10%	2-5 Thn 50%	>5 Thn 100%		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8 = 2 - 7
<b>A</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian</b>						
2007	10.051.987.211,00	-	-	-	10.051.987.211,00	10.051.987.211,00	-
2014	110.404.181,00	-	-	-	110.404.181,00	110.404.181,00	-
2015	152.652.389,00	-	-	63.883.899,50	24.884.590,00	88.768.489,50	63.883.899,50
2017	22.009.339,00	-	-	11.004.835,50	-	11.004.835,50	11.004.503,50
2018	55.171.280,00	-	1.221.526,70	21.570.233,50	-	22.791.760,20	32.379.519,80
2019	110.679.353,00	553.396,77	-	-	-	553.396,77	110.125.956,24
2020	440.644.885,00	2.067.423,10	2.950.000,00	-	-	5.017.423,10	435.627.461,90
2021	480.992.483,00	2.405.092,58	-	-	-	2.405.092,58	478.587.390,42
2022	589.608.240,00	2.948.045,20	-	-	-	2.948.045,20	586.660.194,80
2023	1.804.560.914,00	9.022.804,57	-	-	-	9.022.804,57	1.795.538.109,43
	<b>13.818.710.275,00</b>	<b>16.996.762,22</b>	<b>4.171.526,70</b>	<b>96.458.968,50</b>	<b>10.187.275.982,00</b>	<b>10.304.903.239,42</b>	<b>3.513.807.035,59</b>
<b>B</b>	<b>Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan</b>						
2002 & 2003	1.422.933.335,00	-	-	-	1.422.933.335,00	1.422.933.335,00	-
<b>A + B</b>	<b>15.241.643.610,00</b>	<b>16.996.762,22</b>	<b>4.171.526,70</b>	<b>96.458.968,50</b>	<b>11.610.209.317,00</b>	<b>11.727.836.574,42</b>	<b>3.513.807.035,59</b>

#### 7.6.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.823.700.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 149  
Penyertaan Modal Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2023
1	2	3	4	5
PT. Bank Riau Kepri	7.823.700.000,00	0,00	0,00	7.823.700.000,00
Perusda Anambas Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH (1+2)</b>	<b>7.823.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823.700.000,00</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.823.700.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri. Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Anambas Sejahtera per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan nilai kerugian yang disajikan dalam laporan rugi/laba per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.337.832.656,00 melebihi nilai Ekuitas dan kewajiban.

## PT Bank Riau Kepri Syariah

Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0.71%. Metode penilaian investasi PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah metode biaya. Tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) selama Tahun 2023. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT Bank Riau Kepri Syariah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah, dimana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar Rp7.500.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menetapkan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah sesuai dengan ketentuan maka perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro. SH. M.Kn. Nomor 03. tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri Syariah berasal dari konversi atas Dividen Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa dividen saham sebesar Rp323.700,000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham.

## Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera disajikan dengan menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah daerah adalah 100%. Laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DR.H.E.R. Suhardjadinata & Rekan untuk periode audit terakhir per 31 Desember 2017.

Pada Tahun 2023, Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera telah menyampaikan dokumen laporan keuangan perusda untuk dijadikan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Nilai kerugian per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.337.832.656,00 dan saldo ekuitas dan kewajiban sebesar Rp10.337.832.656,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 150  
Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2023 (Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	31 Desember 2023	Audit Independen 2017
1	2	3	4
1.	Aset Lancar	0,00	144.467.308,00
2.	Aset Tidak Lancar	0,00	78.849.479,00
3.	<b>Jumlah Aset (1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>223.316.787,00</b>
4.	Kewajiban Lancar	10.337.832.656,00	7.074.920.945,00

No	Uraian	31 Desember 2023	Audit Independen 2017
1	2	3	4
5.	Kewajiban Tidak Lancar	0,00	4.562.500.000,00
6.	<b>Jumlah Kewajiban (4+5)</b>	<b>10.337.832.656,00</b>	<b>11.637.420.945,00</b>
7.	Modal Setor	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
8.	Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-6-7)	(16.337.832.656,00)	(17.414.104.158,00)
9.	<b>Jumlah Ekuitas (1 - 6)</b>	<b>(10.337.832.656,00)</b>	<b>(11.414.104.158,00)</b>
10.	<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas (6+9)</b>	<b>(10.337.832.656,00)</b>	<b>223.316.787,00</b>
11.	Penjualan	0,00	349.700.000,00
12.	Beban Pokok Penjualan	0,00	1.398.000,00
13.	<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>348.302.000,00</b>
14.	Beban Penjualan	0,00	0,00
15.	Beban Administrasi dan Umum	0,00	385.973.101,00
16.	<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>0,00</b>	<b>385.973.101,00</b>
17.	<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.671.101,00)</b>
18.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	15.440,00
19.	Beban Lain-Lain	0,00	(1.617.483,00)
20.	<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.602.043,00)</b>
21.	<b>Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.273.144,00)</b>
22.	Pajak Tangguhan	0,00	0,00
23.	<b>Laba (Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.273.144,00)</b>
24.	<b>Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.	<b>Jumlah Laba (Rugi) Periode Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.273.144,00)</b>

### 7.6.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi, (5) Aset Tetap Lainnya dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.832.411.541.800,93 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.796.366.335.170,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 151  
Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	2	3	4	5
Tanah	171.615.482.367,00	170.931.290.367,00	684.192.000,00	0,400
Peralatan Dan Mesin	459.753.167.299,10	406.419.495.119,10	53.333.672.180,00	13,123
Gedung Dan Bangunan	926.886.684.259,33	899.205.878.959,68	27.680.805.299,65	3,078
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.294.517.038.574,14	1.206.459.143.728,28	88.057.894.845,86	7,299
Aset Tetap Lainnya	16.202.632.592,16	14.700.612.035,16	1.502.020.557,00	10,217

Uraian	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
1	2	3	4	5
Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.008.496.706,80	109.965.889.614,52	4.042.607.092,28	3,676
Akumulasi Penyusutan	(1.150.571.959.997,60)	(1.011.315.974.652,85)	(139.255.985.344,75)	13,770
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.832.411.541.800,93</b>	<b>1.796.366.335.170,89</b>	<b>36.045.206.630,04</b>	<b>51,56</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2023 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.832.411.541.800,93 Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

#### 7.6.3.1.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pada Tahun 2023 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp171.615.482.367,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp170.931.290.367,00.

**Tabel 152**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Tanah Perkebunan	6.926.827.750,00	0,00	0,00	6.926.827.750,00
Tanah Kebun Campur	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00
Tanah Hutan	20.488.198.000,00	0,00	0,00	20.488.198.000,00
Tanah Danau/Rawa	174.925.500,00	0,00	0,00	174.925.500,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	125.062.383.023,00	684.192.000,00	0,00	125.746.575.023,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.361.155.094,00	0,00	0,00	9.361.155.094,00
Tanah Untuk Bangunan Jalan	8.067.801.000,00	0,00	0,00	8.067.801.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>170.931.290.367,00</b>	<b>684.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.615.482.367,00</b>

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2023, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 153**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	64.407.715.195,00	684.192.000,00	0,00	65.091.907.195,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	69.404.915.500,00	0,00	0,00	69.404.915.500,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.752.322.250,00	0,00	0,00	2.752.322.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.536.616.019,00	0,00	0,00	27.536.616.019,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	344.250.000,00	0,00	0,00	344.250.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	495.370.750,00	0,00	0,00	495.370.750,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	775.072.323,00	0,00	0,00	775.072.323,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	165.404.000,00	0,00	0,00	165.404.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	655.562.080,00	0,00	0,00	655.562.080,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	716.283.000,00	0,00	0,00	716.283.000,00
Kecamatan Jemaja	630.890.000,00	0,00	0,00	630.890.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.288.065.000,00	0,00	0,00	1.288.065.000,00
Kecamatan Palmatak	237.750.750,00	0,00	0,00	237.750.750,00
Kecamatan Siantan	1.206.605.000,00	0,00	0,00	1.206.605.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	33.356.000,00	0,00	0,00	33.356.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	86.982.000,00	0,00	0,00	86.982.000,00
Kecamatan Siantan Timur	194.130.500,00	0,00	0,00	194.130.500,00
<b>JUMLAH</b>	<b>170.931.290.367,00</b>	<b>684.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.615.482.367,00</b>

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp684.192.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 154**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap-Tanah 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>170.931.290.367,00</b>
Mutasi Tambah:	
Penambahan Aset Tetap Tanah pada Pengelola Barang berupa tanah dari Kementerian Keuangan (Jastipman)	684.192.000,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>684.192.000,00</b>
Mutasi Kurang:	
-	-
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>171.615.482.367,00</b>

#### 7.6.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat bantu, alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan tidak bermotor, alat apung bermotor, alat bengkel

dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, dan pemancar, alat pengolahan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat praga sekolah, alat persenjataan, alat laboratorium kimia nuklir/elektronika, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp459.753.167.299,10 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp406.419.495.119,10 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 155**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Alat Besar Darat	2.070.511.194,00	0,00	0,00	2.070.511.194,00
Alat Besar Apung	429.321.000,00	0,00	0,00	429.321.000,00
Alat Bantu	4.813.461.745,00	1.475.433.090,00	1.900.000,00	6.286.994.835,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	52.280.985.643,00	576.368.300,00	0,00	52.857.353.943,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	420.966.400,00	9.900.000,00	800.000,00	430.066.400,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	30.189.767.885,45	10.173.079.800,00	303.518.000,00	40.059.329.685,45
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.179.915.600,00	0,00	0,00	1.179.915.600,00
Alat Bengkel Bermesin	1.127.226.900,00	7.600.000,00	6.750.000,00	1.128.076.900,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	282.661.956,00	13.988.000,00	0,00	296.649.956,00
Alat Ukur	3.229.579.660,00	8.083.902,00	1.583.000,00	3.236.080.562,00
Alat Pengolahan	2.368.746.093,00	567.410.800,00	4.680.999,00	2.931.475.894,00
Alat Kantor	14.423.571.247,29	819.515.700,00	384.487.048,00	14.858.599.899,29
Alat Rumah Tangga	54.593.423.908,74	2.833.641.422,00	650.569.685,00	56.776.495.645,74
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.569.437.736,55	310.525.658,00	80.191.500,00	6.799.771.894,55
Alat Studio	7.893.781.479,50	3.753.683.000,00	21.517.000,00	11.625.947.479,50
Alat Komunikasi	4.663.122.448,68	28.200.000,00	0,00	4.691.322.448,68
Peralatan Pemancar	4.248.378.053,00	16.500.000,00	0,00	4.264.878.053,00
Alat Kedokteran	74.694.561.134,54	22.107.697.343,00	189.019.610,00	96.613.238.867,54
Alat Kesehatan Umum	7.783.038.374,00	1.363.641.894,00	1.363.495.839,00	7.783.184.429,00
Unit Alat Laboratorium	18.796.902.459,00	1.720.096.710,00	2.456.800,00	20.514.542.369,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	146.805.400,00	1.485.000.000,00	0,00	1.631.805.400,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	16.339.159.067,00	14.574.000,00	34.648.400,00	16.319.084.667,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	127.135.500,00	0,00	0,00	127.135.500,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	428.487.453,00	0,00	0,00	428.487.453,00
Radiation Aplication And Non Destruktif Testing Laboratory Lainnya	217.600.000,00	0,00	0,00	217.600.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.370.837.400,00	0,00	0,00	2.370.837.400,00

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	657.001.000,00	5.208.000,00	0,00	662.209.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	3.125.000,00	647.400,00	0,00	3.772.400,00
Senjata Api	69.154.000,00	0,00	500.000,00	68.654.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	270.865.788,00	191.620.000,00	6.660.000,00	455.825.788,00
Alat Khusus Kepolisian	443.861.150,00	60.270.000,00		504.131.150,00
Komputer Unit	44.173.197.285,00	3.130.880.292,00	212.000,00	47.303.865.577,00
Peralatan Komputer	19.476.157.362,50	1.356.212.700,00	7.474.000,00	20.824.896.062,50
Alat Ekspolrasi Topografi	8.979.472,00	0,00	0,00	8.979.472,00
Alat Pengeboran Mesin	1.947.000,00	0,00	0,00	1.947.000,00
Alat Pelindung	922.904.400,00	316.278.960,00	3.569.760,00	1.235.613.600,00
Alat Sar	2.571.125.472,10	223.827.700,00	500.000,00	2.794.453.172,10
Alat Kerja Penerbangan	45.738.000,00	40.690.000,00	0,00	86.428.000,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	16.612.767.473,52	818.600.950,00	0,00	17.431.368.423,52
Peralatan Olah Raga	9.473.285.978,23	2.969.340.200,00	310.000,00	12.442.316.178,23
<b>JUMLAH</b>	<b>406.419.495.119,10</b>	<b>56.398.515.821,00</b>	<b>3.064.843.641,00</b>	<b>459.753.167.299,10</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per SKPD Tahun 2023, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 156  
Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	64.639.757.828,00	663.468.450,00	0,00	65.303.226.278,00
Sekretariat DPRD	11.632.416.375,00	203.369.000,00	0,00	11.835.785.375,00
Inspektorat Daerah	1.996.831.473,00	70.500.000,00	0,00	2.067.331.473,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74.777.611.165,36	4.104.069.522,00	916.921.976,00	77.964.758.711,36
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.985.102.618,77	31.339.592.053,00	1.709.346.935,00	156.615.347.736,77
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.608.661.772,00	403.910.000,00	0,00	12.012.571.772,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.316.902.764,00	18.500.000,00	0,00	2.335.402.764,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.379.356.510,00	318.835.000,00	0,00	2.698.191.510,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	11.329.912.787,00	670.087.850,00	20.517.150,00	11.979.483.487,00

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	34.404.451.370,97	11.277.309.670,00	10.552.110,00	45.671.208.930,97
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.474.602.700,00	365.261.300,00	13.000.000,00	2.826.864.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.578.063.278,00	1.608.607.670,00	0,00	8.186.670.948,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	7.965.677.538,00	23.842.800,00	0,00	7.989.520.338,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.586.167.343,00	41.390.000,00	297.518.000,00	4.330.039.343,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	463.824.320,00	5.640.000,00	458.184.320,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	122.510.016,00	0,00	122.510.016,00
Satuan Polisi Pamong Praja	13.135.236.066,00	518.314.370,00	35.105.970,00	13.618.444.466,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.548.651.248,00	208.369.600,00	0,00	2.757.020.848,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.732.676.206,00	0,00	0,00	6.732.676.206,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.610.842.176,00	140.018.600,00	0,00	4.750.860.776,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.089.541.918,00	0,00	0,00	1.089.541.918,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.607.280.400,00	3.014.000.000,00	0,00	4.621.280.400,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	140.058.912,00	155.218.950,00	0,00	295.277.862,00
Kecamatan Jemaja	1.261.449.250,00	68.431.500,00	0,00	1.329.880.750,00
Kecamatan Jemaja Timur	1.216.599.600,00	0,00	0,00	1.216.599.600,00
Kecamatan Palmatak	1.605.745.556,00	37.146.150,00	0,00	1.642.891.706,00
Kecamatan Siantan	2.827.357.251,00	201.910.000,00	0,00	3.029.267.251,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.498.930.281,00	50.200.000,00	0,00	1.549.130.281,00
Kecamatan Siantan Tengah	2.066.503.391,00	181.900.000,00	0,00	2.248.403.391,00
Kecamatan Siantan Timur	840.270.951,00	0,00	0,00	840.270.951,00
Kecamatan Siantan Utara	236.904.800,00	40.000.000,00	0,00	276.904.800,00
Kecamatan Jemaja Barat	537.404.890,00	0,00	0,00	537.404.890,00
Kecamatan Kute Siantan	788.526.700,00	87.929.000,00	56.241.500,00	820.214.200,00
<b>JUMLAH</b>	<b>406.419.495.119,10</b>	<b>56.398.515.821,00</b>	<b>3.064.843.641,00</b>	<b>459.753.167.299,10</b>

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023 belum termasuk Tanah sebanyak 61 persil hasil penilaian Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan penilaian barang milik daerah atas Aset Tanah sebanyak 61 persil sesuai Lampiran I Keputusan Bupati Nomor 1077 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemanfaatan, dan pemindahtanganan

barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rincian Aset Tanah pada Lampiran tersebut sebagai berikut.

**Tabel 157**  
**Rincian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah**

Tahun Perolehan	Jumlah Persil	Jumlah Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Appraisal KPKNL (Rp)	NJOP Tersedia
1994	2	715	1.045.140.000,00	NJOP Tersedia untuk Tahun 2016, 2018, dan 2021
2008	1	20.000	1.898.493.000,00	
2009	1	3.000	3.712.342.000,00	
2011	1	163	33.087.000,00	
2012	1	800	134.710.000,00	
2016	1	2.030	2.099.771.000,00	
2017	46	359.894	122.071.876.000,00	
2018	4	4.773	2.373.765.000,00	
2019	1	225	50.850.000,00	
2022	3	1.200	127.057.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>392.800</b>	<b>133.547.091.000,00</b>	

Pelaksanaan penilaian oleh KPKNL mengacu pada PMK No.173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nilai barang milik daerah hasil penilaian belum menghasilkan nilai Aset Tanah pada saat perolehan, melainkan nilai wajar pada tanggal penilaian.

Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 158**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>406.419.495.119,10</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun 2023	51.037.730.091,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan karena kesalahan kode rekening pada Dishub LH	378.320.500,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi dari KIB E (dana BOS) karena kesalahan kode rekening pada Disdikpora berupa Stand Micropon, Sound System, Mesin Pompa Air, Kipas Angin, Papan Pengumuman/ Peraga/ Mading, Rak Galon, Speaker Mini, Loudspeaker (tercentral), Papan Nama Ruangan, Stand Micropon, Microphone/Wireless Mic, dan Speaker mini/aktif portabel.	61.950.000,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi dari KDP berupa pembayaran 60% oksigen central pada Dinkes PPKB	1.592.820.000,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas hibah dari: - Pemerintah Pusat Tahun 2023 berupa 2 Unit Sepeda Motor dan 1 buah Kapal Rigid Inflatable Boat Sea Rider 2 Unit Mesin (Black kliger 850) pada BPBD - Kemenkes Tahun 2023 berupa 1 unit Vaccine Refrigerator sebesar Rp.48.994.570, 14 buah Vaccine Carrier sebesar Rp.1.948.324 dan 5 buah Tensimeter 3070101005 sebesar Rp.5.033.240	3.069.976.134,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas belanja modal dari dana kapitasi pada Dinkes PPKB	150.964.096,00
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi dari Persediaan Berupa CPU Rp.20.625.000 Monitor Rp.4.451.330 Laptop Rp.81.678.670 dengan total belanja Rp.106.755.000 pengakuan atas barang yang tidak jadi dihibahkan kepada masyarakat - LSM Due Sebelek pada DPMPSTP	106.755.000,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>56.398.515.821,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke KIB C berupa teralis dan daun pintu pada Disdikpora	76.855.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke KIB D berupa alat IPAL Sebesar Rp,998.000.0000 dan Mesin Proses Sebesar Rp.298.000.000 pada Dinkes PPKB	1.296.000.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke KIB E berupa Buku, Pakaian dan Alat Musik pada Disdikpora	48.785.700,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena perubahan kondisi menjadi rusak berat pada Disparbud	297.518.000,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke Beban Persediaan pada: - Disdikpora berupa alat dapur, pakaian seni, alat komputer lainnya (kabel dan mouse), dan alat rumah tangga lainnya; - Dinkes PPKB berupa alat dapur Sebesar Rp.8.644.458 dan perlengkapan komputer berupa kabel dan mouse sebesar Rp.840.000; dan - Dishub LH berupa Sepatu Lapangan Rp.3.569.760.	83.169.218,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel pada: - Disdikpora sebesar Rp. 721.166.276 - Dinkes PPKB sebesar Rp. 234.845.139 - Puskesmas sebesar Rp. 169.017.338 - Satpol PP sebesar Rp.35.105.970 - Damkar sebesar Rp.5.640.000 - Disdukcapil sebesar Rp.13.000.000 - Dishub LH sebesar Rp. 982.350 - DPPP sebesar Rp.20.517.150 - dan Kec. Kute Siantan sebesar Rp.56.241.500	1.256.515.723,00
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas kekurangan volume terhadap Bus Air RoRo - Anambas Bermadah 7 pada Dishub LH sebesar Rp.6.000.000	6.000.000,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>3.064.843.641,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>459.753.167.299,10</b>

### 7.6.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monument. bangunan menara. rambu-rambu dan tugu titik kontrol/pasti. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp926.886.684.259,33 dibandingkan dengan Tahun 2022 Rp899.205.878.959,68.

**Tabel 159**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja	749.289.845.992,89	26.625.070.491,00	4.287.437.262,00	771.627.479.221,89
Bangunan Tempat Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.622.604.756,00	0,00	0,00	15.622.604.756,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	29.727.590.684,00	6.857.760.352,00	2.642.654.708,35	33.942.696.327,65
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	44.918.187.994,01	975.824.042,00	0,00	45.894.012.036,01
Bangunan Bersejarah/Monumen dan Tugu	5.529.983.064,00	226.605.814,00	74.363.429,00	5.682.225.449,00

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Bangunan Menara Perambuan	544.809.000,00	0,00	0,00	544.809.000,00
Bangunan Rambu-Rambu Transportasi	3.923.441.315,98	0,00	0,00	3.923.441.315,98
Bangunan Rambu Lalu Lintas Udara	856.347.000,00	0,00	0,00	856.347.000,00
Bangunan Bandara Pelabuhan	8.384.122.822,00	0,00	0,00	8.384.122.822,00
Bangunan Gedung Laboratorium	760.000.000,00	0,00	0,00	760.000.000,00
Bangunan Tempat Pendidikan	662.394.407,00	0,00	0,00	662.394.407,00
Bangunan Tempat Olahraga	24.103.000,00	0,00	0,00	24.103.000,00
Bangunan Tempat Kesehatan	31.470.978.536,00	1.772.528.220,00	1.772.528.220,00	31.470.978.536,00
Bangunan Tempat Kerja Lainnya	7.491.470.387,80	0,00	0,00	7.491.470.387,80
<b>JUMLAH</b>	<b>899.205.878.959,68</b>	<b>36.457.788.919,00</b>	<b>8.776.983.619,35</b>	<b>926.886.684.259,33</b>

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 160**  
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	26.230.286.059,00	119.693.000,00	0,00	26.349.979.059,00
Sekretariat DPRD	5.133.756.317,00	0,00	0,00	5.133.756.317,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	305.737.662.195,92	15.792.587.941,00	1.123.972.000,00	320.406.278.136,92
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	159.667.697.536,00	7.533.337.620,00	1.772.528.220,00	165.428.506.936,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	205.663.536.265,29	7.307.734.878,00	2.852.721.576,35	210.118.549.566,94
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	419.986.000,00	0,00	0,00	419.986.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	8.202.265.692,00	1.630.652.619,00	0,00	9.832.918.311,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	86.745.946.009,47	4.073.782.861,00	3.027.761.823,00	87.791.967.047,47
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	382.836.000,00	0,00	0,00	382.836.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.286.891.731,00	0,00	0,00	7.286.891.731,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	54.396.333.088,00	0,00	0,00	54.396.333.088,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	16.601.563.541,00	0,00	0,00	16.601.563.541,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	784.399.000,00	0,00	0,00	784.399.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja	1.220.445.000,00	0,00	0,00	1.220.445.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	3.852.151.845,00	0,00	0,00	3.852.151.845,00
Kecamatan Palmatak	5.093.323.549,00	0,00	0,00	5.093.323.549,00
Kecamatan Siantan	4.402.524.502,00	0,00	0,00	4.402.524.502,00
Kecamatan Siantan Selatan	3.541.036.222,00	0,00	0,00	3.541.036.222,00
Kecamatan Siantan Tengah	1.449.850.033,00	0,00	0,00	1.449.850.033,00
Kecamatan Siantan Timur	2.393.388.374,00	0,00	0,00	2.393.388.374,00
Kecamatan Siantan Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jemaja Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kute Siantan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>899.205.878.959,68</b>	<b>36.457.788.919,00</b>	<b>8.776.983.619,35</b>	<b>926.886.684.259,33</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 161**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>899.205.878.959,68</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun 2023 pada: - Disdikpora sebesar Rp.15.715.732.941; - Dinkes PPKB sebesar Rp.6.837.450.520; - DPUPRPRKP sebesar Rp.7.032.351.438; - Dishub LH sebesar Rp.3.284.167.411; dan - DPPP sebesar Rp.1.630.652.619.	34.500.354.929,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Hibah dari Kementerian Keuangan berupa bangunan Jastipman pada Pengelola Barang	119.693.000,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi dari KIB B karena kesalahan kode rekening berupa teralis dan daun pintu pada Disdikpora	76.855.000,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi dari KIB D karena kesalahan kode rekening pada: - Dinkes PPKB berupa rumah pelindung IPAL PKM letung sebesar Rp.99.663.800 dan rumah	988.948.550,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
pelindung IPAL PKM Palmatak sebesar Rp.99.669.300; dan - Dishub LH sebesar Rp.789.615.450	
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinkes PPKB atas Reklasifikasi dari KDP berupa: - Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Palmatak (1 Paket) sebesar Rp.93.775.000; - Jreview DED Pembangunan Ruang Operasi RSUD Palmatak sebesar Rp.24.500.000; - Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Desa Belibak Kecamatan Palmatak sebesar Rp.5.720.000; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (satu paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (DAK) sebesar Rp.5.962.000; - Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (satu paket kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (DAK) sebesar Rp.5.962.000; - Perencanaan Poli Umum dan Administrasi RSUD Jemaja (Pelunasan Hutun 2021) sebesar Rp.216.381.000	352.300.000,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari selain belanja modal pada DPUPRPRKP berupa : - Uang Muka 20% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Penataan Mesjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.46.760.526; - Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Penataan Mesjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.187.042.104;	233.802.630,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pelunasan utang berupa perencanaan poli umum dan administrasi RSUD Jemaja (Pelunasan Hutang Tahun 2021) pada Dinkes PPKB	144.254.000,00
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Jurnal Koreksi karena kesalahan jurnal koreksi pada tahun 2022 pada DPUPRPRKP	41.580.810,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>36.457.788.919,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi ke B karena kesalahan kode rekening pada Dishub LH	378.320.500,00
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi ke KIB D karena kesalahan kode rekening pada: 1. Dinkes PPKB berupa pengawasan pemasangan paving blok RSUD Jemaja sebesar Rp.23.421.000 dan belanja paving blok rsud jemaja sebesar Rp.199.736.500 pada Dinkes PPKB; dan 2. Dishub LH sebesar Rp.328.960.273.	552.117.773,00
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi ke Persediaan karena kesalahan kode rekening pada DPUPRPRKP berupa: - Uang Muka 30% Rehabilitasi dan Pembangunan Menara mesjid batu ampar sebesar Rp. 281.191.581; - Termin 100% Rehabilitasi dan Pembangunan Menara mesjid batu ampar sebesar Rp.642.146.656; - Pembayaran Uang Muka 30% Lanjutan Pembangunan Masjid Gudang Tengah sebesar Rp.295.158.616; - Pembayaran Termin 100% Lanjutan Pembangunan Masjid Gudang Tengah sebesar Rp.688.703.437; - Pembayaran Termin 100% Renovasi Pemasangan Plafon Dan Pagar Masjid Al Baroqah Pasir Merah RT.004 / RW.001 Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan Rp.176.551.596; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Gapura Kampung Bebas Narkoba Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp.74.363.429; - Pembayaran Termin 100% Semenisasi Tempat Parkir Surau Al-Barokah Desa Tarempa Barat Daya Kec.Siantan sebesar Rp.89.992.684; - Pembayaran Termin 100% Rehabilitasi Masjid Mentalib Desa Air Putih sebesar Rp.99.658.313; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Lapangan Parkir Cabjari Natuna kab. Kep. Anambas sebesar Rp.66.163.049; - Pembayaran Termin 100% LANJUTAN PEMBANGUNAN TEMPAT WUDHU MASJID TELUK PERING DESA PUTIK KEC. PALMATAK sebesar Rp.99.473.194; - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Pagar Masjid As-salihin Tiangau Kec. Siantan Selatan sebesar Rp.115.139.616; dan - Pembayaran Termin 100% Pembangunan Teras Atas Tempat Parkir Jamik Tarempa sebesar Rp.149.178.669.	2.777.720.840,00
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi ke KIB F pada: 1. Dinkes PPKB berupa: - Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Jemaja Barat sebesar	5.063.364.160,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
<p>Rp.374.358.600;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Jemaja Barat sebesar Rp.48.684.600;</li> <li>- 100% DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara sebesar Rp.46.930.800;</li> <li>- Pematangan Lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting sebesar Rp.194.447.000;</li> <li>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pematangan Lahan Pustu Teluk Sunting sebesar Rp.17.937.600;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.373.071.000;</li> <li>- 100% DED Rehab Puskesmas Pembantu Air Bitu sebesar Rp.25.818.600;</li> <li>- 100% DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kute Siantan sebesar Rp.46.930.800;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Air Bersih RSUD Palmatak sebesar Rp.24.971.670;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Siantan Utara sebesar Rp.373.248.600;</li> <li>- 100% Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Batu Miring Pustu Teluk Sunting sebesar Rp. 22.971.450.</li> </ul> <p>2. Disdikpora berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultansi Perencanaan Kantin SD 001 Ladan Kecamatan Palmatak sebesar Rp.22.910.400;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk sebesar Rp.94.311.150;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp.40.370.700;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras sebesar Rp.53.424.300;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp.16.905.300;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp.98.257.200;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp.61.320.007;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp.34.919.046;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang sebesar Rp.48.129.600;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja sebesar Rp.38.046.970;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 004 Genting Pulur sebesar Rp.53.424.300;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja sebesar Rp.74.758.056;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp.41.980.200;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak sebesar Rp.37.111.129;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru sebesar Rp.55.660.950;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak sebesar Rp.65.987.169;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp.37.214.470;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung sebesar Rp.74.205.153;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya SDN 008 Air Biru sebesar Rp.13.408.800;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang (UKS) dengan Tingkat Kerusakannya Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras sebesar Rp.19.454.970;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya TK Negeri Pembina sebesar Rp.45.002.730;</li> <li>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block Pesantren Modern Khairul Ummah sebesar Rp.20.823.600;</li> <li>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Baru Miring dan Pagar Pesantren Modern Khairul Ummah sebesar Rp.21.073.350;</li> <li>- Pembangunan Batu Miring KB Kartini Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur sebesar Rp.198.578.959;</li> <li>- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Batu Miring KB Kartini Desa Genting Pulur Kec. Jemaja Timur sebesar Rp.23.559.750;</li> <li>- Uang Muka 30% Pemasangan Paving Block MTS Kelurahan Letung Kec. Jemaja sebesar Rp.59.730.509;</li> <li>- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Siantan sebesar Rp.26.989.650;</li> </ul>	

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
- Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 001 Kuala Maras sebesar Rp.23.520.900; - Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi SDN 002 Ulu Maras sebesar Rp.23.520.900; - Perencanaan Rehabilitasi SMPN 1 Palmatak sebesar Rp.23.137.950; - Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Anugrah Kec. Palmatak sebesar Rp.165.479.429; - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Anugrah Kec. Palmatak sebesar Rp.11.470.740; - Konsultansi Perencanaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Anugrah Kec. Palmatak sebesar Rp.11.280.375; - Jasa Konsultansi Pengawasan Pemasangan Paving Block SDN 007 Sedak Desa Tarempa Timur Kec. Siantan sebesar Rp.20.934.600. 3. DPUPRPRKP berupa: - Termin 100% Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Landak Kecamatan Jemaja sebesar Rp.69.540.390. 4. DishubLH sebesar Rp.2.320.481.050.	
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas kurang volume pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Penataan Mesjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Kepulauan Anambas (DAU SG) sebesar Rp.5.460.346,35	5.460.346,35
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>8.776.983.619,35</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>926.886.684.259,33</b>

#### 7.6.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi Jalan dan Jembatan. Bangunan Air. Instalasi. dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah. Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.294.517.038.574,14 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.206.459.143.728,28.

Tabel 162  
Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Jalan	798.568.471.481,76	110.868.843.180,00	39.045.727.991,14	870.391.586.670,62
Jembatan	48.356.525.839,97	3.689.804.950,00	789.615.450,00	51.256.715.339,97
Bangunan Air Irigasi	50.744.673.198,47	1.109.905.428,00	0,00	51.854.578.626,47
Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	36.567.092.376,00	0,00	0,00	36.567.092.376,00
Bangunan Air Bersih	293.562.500,00	228.823.464,00	0,00	522.385.964,00
Bangunan Air Kotor	5.244.449.010,00	0,00	0,00	5.244.449.010,00
Penerangan Jalan. Taman dan Hutan Kota	6.416.134.460,00	0,00	0,00	6.416.134.460,00
Pelabuhan Dermaga	21.091.934.286,08	0,00	0,00	21.091.934.286,08
Jaringan Irigasi/Waduk /Bendungan	24.687.165.181,00	0,00	0,00	24.687.165.181,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	317.488.342,00	141.871.603,00	0,00	459.359.945,00

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Bangunan Pengamanan Sungai/Penanggulangan Bencana Alam	9.337.235.770,00	9.762.743.020,00	0,00	19.099.978.790,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.767.067.086,00	795.246.642,00	0,00	3.562.313.728,00
Jaringan Gas Telepon	57.929.386.275,00	0,00	0,00	57.929.386.275,00
Jaringan Listrik	13.932.666.093,00	0,00	0,00	13.932.666.093,00
Jaringan Air Minum	5.537.912.191,00	0,00	0,00	5.537.912.191,00
Instalasi Air Kotor/Air Bersih	4.291.749.500,00	1.296.000.000,00	0,00	5.587.749.500,00
Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	199.333.100,00	199.333.100,00	0,00
Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Listrik dan Telephon	81.623.378.249,00	0,00	0,00	81.623.378.249,00
Instalasi Pengolahan	38.752.251.889,00	0,00	0,00	38.752.251.889,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.206.459.143.728,28</b>	<b>128.092.571.387,00</b>	<b>40.034.676.541,14</b>	<b>1.294.517.038.574,14</b>

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 163**  
**Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	20.583.510.900,00	0,00	0,00	20.583.510.900,00
Sekretariat DPRD	174.139.800,00	0,00	0,00	174.139.800,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.209.603.555,00	0,00	0,00	5.209.603.555,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.226.987.279,00	1.718.490.600,00	199.333.100,00	13.746.144.779,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.083.362.111.389,89	119.331.072.802,00	39.045.727.991,14	1.163.647.456.200,75
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.454.541.900,31	0,00	0,00	1.454.541.900,31
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	132.202.500,00	0,00	0,00	132.202.500,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	7.705.890.823,00	0,00	0,00	7.705.890.823,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	62.045.783.408,08	7.043.007.985,00	789.615.450,00	68.299.175.943,08
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.097.537.005,00	0,00	0,00	2.097.537.005,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.098.147.108,00	0,00	0,00	1.098.147.108,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.076.145.184,00	0,00	0,00	3.076.145.184,00

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Satuan Polisi Pamong Praja	19.755.500,00	0,00	0,00	19.755.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	330.896.720,00	0,00	0,00	330.896.720,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.478.000,00	0,00	0,00	41.478.000,00
Kecamatan Jemaja	3.086.582.856,00	0,00	0,00	3.086.582.856,00
Kecamatan Jemaja Timur	2.001.079.500,00	0,00	0,00	2.001.079.500,00
Kecamatan Siantan	1.812.750.300,00	0,00	0,00	1.812.750.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.206.459.143.728,28</b>	<b>128.092.571.387,00</b>	<b>40.034.676.541,14</b>	<b>1.294.517.038.574,14</b>

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 164**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
Saldo Per 31 Desember 2022	1.206.459.143.728,28
<b>Mutasi Tambah</b>	
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun 2023	96.909.592.427,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas hibah aset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Pelabuhan Apung di Pelabuhan Pemda Kec. Siantan pada DishubLH.	2.020.640.250,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi ke KIB D pada Dinkes PPKB berupa: - Termin 100% Belanja Barang Dan Jasa Pada Belanja Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Palmatak (DAK Fisik Kesehatan) sebesar Rp.998.000.000; dan - Termin 100% Belanja Modal Mesin Proses (DAU SG) sebesar Rp.298.000.000	1.296.000.000,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi dari KIB C karena kesalahan kode rekening pada: - Dinkes PPKB berupa Termin 100% Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemasangan Paving Blok RSUD Jemaja (DAU SG) sebesar Rp.23.421.000 dan Belanja Paving Blok RSUD Jemaja Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD 2023) sebesar Rp.199.736.500; dan - Dishub LH sebesar Rp. 328.960.273	552.117.773,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi ke KIB D pada: - DPUPRPRKP berupa aset yang sudah selesai pembayaran dan dikapitalisasikan sebesar Rp.21.879.459.557; dan - DishubLH berupa Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Rp. 2.505.094.671 karena sudah selesai pembayaran.	24.384.554.228,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari selain belanja modal pada DPUPRPRKP berupa: - kelebihan pembayaran utang pada Pembayaran Termin 100% Pengawasan Lanjutan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Impol-sunggak (Tahap2 ) (Tunda Bayar 2021) sebesar 40.000.000 - Belanja barjas sebesar Rp.2.217.650.789	2.257.650.789,00
Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas pelunasan hutang Tahun 2021 pada DPUPRPRKP	672.015.920,00
Total Mutasi Tambah	128.092.571.387,00
<b>Mutasi Kurang</b>	
Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi ke KIB C karena kesalahan kode rekening pada - Dinkes PPKB berupa Belanja Rumah Pelindung IPAL Puskesmas Letung sebesar	988.948.550,00

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
Rp.99.663.800 dan Termin 100% Pada Pekerjaan Belanja Rumah Pelindung IPAL Puskesmas Palmatak sebesar Rp.99.669.300; dan - Dishub LH sebesar Rp.789.615.450.	
Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas Reklasifikasi ke KIB F karena belum selesai pembayaran dan belum memiliki fisik (DED/Perencanaan) pada DPUPRPRKP	39.002.967.370,00
Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas Jurnal Koreksi karena kesalahan jurnal koreksi pada tahun 2022 pada DPUPRPRKP	41.580.810,00
Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan atas kurang volume pada pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Pesantren Assuniah sebesar Rp.1.179.811,14	1.179.811,14
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>40.034.676.541,14</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.294.517.038.574,14</b>

#### 7.6.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.202.632.592,16 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp14.700.612.035,16.

Tabel 165  
Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Buku dan Perpustakaan	9.901.996.608,00	1.266.644.487,00	61.950.000,00	11.106.691.095,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	4.404.542.300,00	475.042.650,00	177.716.580,00	4.701.868.370,00
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	11.991.000,00	0,00	0,00	11.991.000,00
Peralatan Olahraga	182.535.427,16	0,00	0,00	182.535.427,16
Aset Tetap Renovasi	199.546.700,00	0,00	0,00	199.546.700,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>14.700.612.035,16</b>	<b>1.741.687.137,00</b>	<b>239.666.580,00</b>	<b>16.202.632.592,16</b>

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun 2023. dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 166  
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	2.166.038.200,00	0,00	0,00	2.166.038.200,00
Sekretariat DPRD	486.916.181,00	0,00	0,00	486.916.181,00
Inspektorat Daerah	49.755.172,00	0,00	0,00	49.755.172,00

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.526.197.146,16	1.739.707.137,00	237.686.580,00	11.028.217.703,16
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.515.000,00	0,00	0,00	4.515.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	34.862.200,00	0,00	0,00	34.862.200,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.300.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	7.300.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	43.118.600,00	0,00	0,00	43.118.600,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	931.229.900,00	0,00	0,00	931.229.900,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	36.159.500,00	0,00	0,00	36.159.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	323.864.700,00	0,00	0,00	323.864.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.922.500,00	0,00	0,00	9.922.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	499.543.800,00	0,00	0,00	499.543.800,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.915.000,00	0,00	0,00	24.915.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	168.050.000,00	0,00	0,00	168.050.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Kecamatan Jemaja	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Palmatak	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Kecamatan Siantan	318.748.000,00	0,00	0,00	318.748.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	31.180.000,00	0,00	0,00	31.180.000,00
Kecamatan Siantan Timur	11.248.136,00	0,00	0,00	11.248.136,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.700.612.035,16</b>	<b>1.741.687.137,00</b>	<b>239.666.580,00</b>	<b>16.202.632.592,16</b>

Berdasarkan tabel di atas terdapat mutasi tambah dan kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 167**  
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2
Saldo Per 31 Desember 2022	<b>14.700.612.035,16</b>

<b>Mutasi Tambah:</b>	
Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2023 pada Disdikpora Sebesar Rp.1.690.921.437 dan DPMPPTSP sebesar Rp.1.980.000.	1.692.901.437,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya atas Reklasifikasi dari KIB B berupa Buku, Pakaian dan Alat Musik pada Disdikpora	48.785.700,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.741.687.137,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Pengurangan Aset Tetap Lainnya atas Reklasifikasi ke Beban Persediaan pada: - Disdikpora berupa Buku Mewarnai PAUD sebesar Rp.172.136.580 dan Karpet Lantai (Dana BOS) sebesar Rp.3.600.000; dan - DPMPPTSP berupa Umbul-Umbul berwarna Sebesar Rp.1.980.000	177.716.580,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya atas Reklasifikasi ke KIB B (dana BOS) karena kesalahan kode rekening pada Disdikpora berupa Stand Micropon, Sound System, Mesin Pompa Air, Kipas Angin, Papan Pengumuman/ Peraga/ Mading, Rak Galon, Speaker Mini, Loudspeker (tercentral), Papan Nama Ruangan, Stand Micropon, Microphone/Wireless Mic, dan Speaker mini/aktif portabel.	61.950.000,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>239.666.580,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>16.202.632.592,16</b>

#### 7.6.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp114.008.496.706,80 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp109.965.889.614,52.

**Tabel 168**  
**Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	23.421.000,00	0,00	0,00	23.421.000,00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.740.423.865,00	1.123.972.000,00	0,00	4.864.395.865,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.609.755.000,00	1.549.370.720,00	3.198.620.000,00	1.960.505.720,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	91.327.415.846,41	41.187.147.668,00	35.787.316.969,61	96.727.246.544,80
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96.855.000,00	0,00	0,00	96.855.000,00
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	815.425.250,00	0,00	0,00	815.425.250,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	9.682.975.876,11	2.320.481.050,00	3.152.427.376,11	8.851.029.550,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	495.277.777,00	0,00	0,00	495.277.777,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	174.340.000,00	0,00	0,00	174.340.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>109.965.889.614,52</b>	<b>46.180.971.438,00</b>	<b>42.138.364.345,72</b>	<b>114.008.496.706,80</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.008.496.706,80 pada sembilan SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 169**  
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	448.000.000,00	Kec. Siantan	2024	Reklas dari Dinas PU
2	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	2013	1.082.130.000,00	Kec. Siantan	2024	Reklas dari Dinas PU
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	41.635.000,00	Kec. Siantan	2024	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda
4	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	31.923.000,00	Kec. Palmatak	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Palmatak
5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	40.943.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja Timur
6	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	39.909.000,00	Kec. Jemaja	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Jemaja
7	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	9.934.000,00	Kec. Siantan	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Kecamatan Siantan
8	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	26.874.000,00	Kec. Palmatak	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Palmatak
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	24.894.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Selatan
10	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	11.859.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Tengah
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	20.879.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan Timur
12	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	36.884.000,00	Kec. Jemaja	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Siantan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
14	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	7.954.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kecamatan Jemaja Timur
15	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	38.864.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan Tengah
16	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	37.874.000,00	Kec. Siantan	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Siantan
17	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2017	49.864.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	41.779.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	16.941.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Tengah
20	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2017	20.356.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Perencanaan Pembnagunan Jamban Siswa / Guru Kecamatan Siantan Timur
21	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2018	3.905.000,00	Tarempa Kec. Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TK Negeri Pembina Tarempa Kec. Siantan
22	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018	7.909.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Gasing Dusun Muntai Desa Teluk Siantan Kec. Tengah
23	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2018	12.859.000,00	Kec. Kute Siantan dan Siantan Utara	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lapangan Bulu Tangkis Desa Langir, Batu Miring Lapangan Futsal Desa Piasan Kec. Palmatak
24	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2018	30.305.000,00	Kecamatan Jemaja	2024	Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan Sumber Pusat Inklusif Kecamatan Jemaja (DED DAK SMP 2019)
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	81.800.000,00	Kec. Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PGRI (DED)
26	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	21.659.000,00	Kec. Palmatak	2024	DED Pembangunan Ruang Inklusif SMP 4 Putik (DAK 2020)
27	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	6.897.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penimbunan TK Siantan Selatan Kec Siantan Selatan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
28	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	2019	13.420.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Kec.Jemaja Timur
29	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2019	15.884.000,00	Kec. Jemaja Barat	2024	DED Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 011 Air Biru (DAK 2020)
30	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	15.988.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	SDN 015 Teluk Durian
31	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	36.982.000,00	Kec. Siantan	2024	SMPN 4 Dusun Kec. Siantan
32	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.927.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
33	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SD 014 Batu Ampar) Tunda Bayar Tahap I
34	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pemasangan Paving Block dan Pembangunan Pagar SMPN 4 Genting) Tunda Bayar Tahap I
35	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.960.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
36	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.520.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 001 Ladan)
37	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	27.351.500,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural- Pembangunan Batu

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Miring SMPN 4 Arung Hijau Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I
38	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Siantan Utara	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN Bayat Kec. Siantan Utara) Tunda Bayar Tahap I
39	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.476.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Renovasi Atap dan Plafon SDN Batu Ampar Kec.Kute Siantan) Tunda Bayar Tahap I
40	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.487.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
41	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.204.500,00	Kec. Siantan	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehabilitas SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
42	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.210.000,00	Kec. Siantan	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab Sekolah SDN 003 Tarempa) Tunda Bayar Tahap I
43	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SDN 005 Candi) Tunda Bayar Tahap I
44	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.976.500,00	Kec. Jemaja	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar SDN Landak) Tunda Bayar Tahap I
45	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.664.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektural-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Rehab SD Munjan) Tunda Bayar Tahap I
46	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.133.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Batu Miring SDN 005 Antang Desa Tarempa Timur Tunda Bayar Tahap I
47	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja Timur) Tunda Bayar Tahap I
48	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.144.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desai Arsitektural-Perencanaan Pemasangan Paving Block SDN 007 Sedak Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
49	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.105.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Desa Pesisir Timur Tunda Bayar Tahap I
50	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.503.500,00	Kec. Palmatak	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan pagar SDN Tebang Kec. Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
51	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.653.000,00	Kec. Jemaja Barat	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Pagar

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						SDN Keramat) Tunda Bayar Tahap I
52	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.650.000,00	Kec. Palmatak	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dians Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec.Palmatak) Tunda Bayar Tahap I
53	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	23.248.500,00	Kec. Siantan	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehabilitas Rumah Guru SDN 003 Tarempa Kec. Siantan) Tunda Bayar Tahap I
54	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	56.595.000,00	Kec. Jemaja	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Jemaja) Tunda Bayar Tahap I
55	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	82.214.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga Sekolah (Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Kec. Siantan Selatan) Tunda Bayar Tahap I
56	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	26.625.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas (Perencanaan Rehabilitas Sekolah SDN 010 Luap Kec. Siantan Timur) Tunda Bayar Tahap I
57	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2021	25.498.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Paud (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Penimbungan TK Negeri 3 Putik) Tunda Bayar Tahap I
58	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.642.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran DED Revitalisasi Perpustakaan SMPN 3 Munjan
59	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.357.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran DED Rehab Plapon SMP 2 Mengkait
60	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.542.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembayaran DED Renovasi Atap SMP N 1 Desa Landan Kecamatan Palmatak
61	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.379.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran DED Rehab Sekolah SMPN 04 Genting Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
62	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.390.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran DED Rehab Ruang Belajar 2 Kelas SMPN 2 Satap Mengkait
63	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran DED Revitalisasi SDN 001 Air Asuk Kec. Siantan Tengah
64	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.307.500,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran DED Rehab Plapon SDN 001 Desa Telaga
65	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	27.362.500,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran DED Rehab Sekolah SDN 004 Genting Desa Air Bini
66	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	26.592.500,00	Kec. Jemaja Barat	2024	Pembayaran DED Rehabilitasi Perumahan Guru SDN 010 Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat
67	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.492.500,00	Kec. Palmatak	2024	Pembayaran DED Renovasi SDN 001 Desa Ladan
68	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	25.481.500,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran DED Rehab Atap Perumahan Guru dan RKB SD 004 Teluk Sunting kec. Siantan Tengah
69	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	34.804.000,00		2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Berserta Perabotnya (5 Paket) (DAK 2022)
70	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2021	76.642.500,00	Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Siantan Utara
71	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	23.177.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembayaran DED Rehab/Revitalisasi WC SMPN 1 Siantan
72	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	18.469.000,00		2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (2 Paket) (DAK 2022)
73	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2022	45.487.245,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Seluruh Pembangunan Ruang Laboratorium komputer Beserta perabotnya DAK 2023
74	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2022	20.987.325,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya (DAK 2023)
75	Bangunan Tmpt	2022	23.045.265,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Lain-lain (dst)					UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
76	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	22.995.315,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya (DAK 2023)
77	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2022	21.059.475,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya (DAK 2023)
78	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	2022	16.131.075,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK 2023)
79	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2022	22.978.665,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya DAK 2023
80	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2023	94.311.150,00	SMPN 2 Air Asuk, Kec. Siantan Tengah	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya SMPN 2 Air Asuk
81	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2023	74.758.056,00	SMPN 1 Jemaja, Kec. Jemaja	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja
82	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2023	65.987.169,00	SMPN 2 Lembah Rewak Kec. Jemaja	2024	Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak
83	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	2023	74.205.153,00	SMPN 2 Piabung	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung
84	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2023	98.257.200,00	SDN 007 Etang, Kec. Siantan Timur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SDN 007 Etang
85	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	22.910.400,00	SD 001 Ladan, Kec. Palmatak	2024	Belanja Konsultansi Perencanaan Kantin SD 001 Ladan Kecamatan Palmatak (DAU SG 2023)
86	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	34.919.046,00	SMPN 2 Piabung, Kec. Palmatak	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung
87	Bangunan Tmpt	2023	55.660.950,00	SDN 008 Air Biru	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Lain-lain (dst)					Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 008 Air Bairu
88	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	53.424.300,00	SDN 004 Genting Pulur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 004 Genting Pulur
89	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	40.370.700,00	SDN 007 Etang, Kec. Siantan Timur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SDN 007 Etang
90	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	53.424.300,00	SDN 002 Ulu Maras, Kec. Jemaja Timur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras
91	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	61.320.007,00	SMPN 2 Piabung	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung
92	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	45.002.730,00	TK Negeri Pembina	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya TK Negeri Pembina
93	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	16.905.300,00	SDN 008 Air Biru	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakannya Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru
94	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	13.408.800,00	SDN 008 Air Biru	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Denang Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasnya SDN 008 Air Biru
95	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	19.454.970,00	SDN 002 Ulu Maras	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang (UKS) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SDN 002 Ulu Maras
96	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	23.520.900,00	Sdn 001 Kuala Maras	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sdn 001 Kuala Maras
97	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	26.989.650,00	SMPN 1 Siantan	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Siantan (DAU SG 2023)
98	Bangunan Tmpt	2023	23.137.950,00	Smpn 1 Palmatak	2024	Perencanaan Rehabilitasi Smpn 1 Palmatak (Dau Sg 2023)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan Lain-lain (dst)					
99	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	2023	23.520.900,00	Sdn 002 Ulu Maras	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Sdn 002 Ulu Maras (Dau Sg 2023)
100	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	38.046.970,00	SMPN 1 Jemaja, Kec. Jemaja	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 1 Jemaja
101	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	48.129.600,00	SDN 007 Etang, Kec. Siantan Timur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 007 Etang
102	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	37.111.129,00	SMPN 2 Lembah Rewak Kec. Jemaja	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Lembah Rewak
103	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	41.980.200,00	SDN 008 Air Biru	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SDN 008 Air Biru
104	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	37.214.470,00	SMPN 2 Piabung	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Piabung
<b>J U M L A H</b>			<b>4.864.395.865,00</b>			

Tabel 170

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2018	11.902.000,00	Desa Air Sena. Kecamatan Siantan Tengah	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Parit Puskesmas Pembantu Air Sena (1 Paket)
2	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Timur	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
3	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	92.785.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Operasi RSUD Jemaja (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Prasarana Rumah Sakit (DAK)
4	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Selatan	2024	Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
5	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2019	5.962.000,00	Puskesmas Siantan Tengah		Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Bangunan Rumah Pelindung IPAL Puskesmas (1 Paket) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
6	Pagar Permanen	2020	13.887.000,00	Desa Pesisir Timur. Kec. Siantan	2024	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Semenisasi Pustu Desa Pesisir Timur (1 Paket)
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	39.710.000,00	Kecamatan Jemaja Barat	2024	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Jemaja Barat
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2021	32.835.000,00	Kecamatan Siantan Utara	2024	Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Balai Penyuluhan KB Siantan Utara
9	Pagar Permanen	2021	44.990.000,00	Jln. Soekarno-Hatta No.16 RT.IV RW.II Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2024	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk dan Pagar UPT Puskesmas tarempa
10	Pagar Permanen	2021	5.720.000,00	PIABUNG, RT 003 / RW 002 DESA PIABUNG, KEC. PALMATAK	2024	Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Pustu RT.003/002 Desa Piabung
11	Jalan Khusus Kompleks	2021	5.720.000,00	Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit, Kec. Jemaja	2024	Konsultan Perencanaan Jalan Masuk Ruang IGD RSUD Jemaja
12	Bangunan Rumah Sakit Umum	2022	24.900.000,00	Jl. Padang Melang, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja	2024	Jreview DED Pembangunan Ruang Operasi RSUD JEMAJA
13	Bangunan Klinik/Puskesmas	2022	97.600.000,00	Jl. Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Tarempa, kecamatan Siantan	2024	Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan Lahan Puskesmas Tarempa ( Gedung Baru Puskesmas Tarempa)
14	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.248.600,00	Kec. Siantan Utara	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Siantan Utara (DAU SG)
15	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	373.071.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Kute Siantan (DAU SG)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
16	Bangunan Klinik/Puskesmas	2023	374.358.600,00	Kec. Jemaja Barat	2024	Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Puskesmas Jemaja Barat (DAU SG)
17	Bangunan Puskesmas Pembantu	2023	25.818.600,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2024	100% Belanja Modal pada Pekerjaan Belanja DED Rehab Puskesmas Pembantu Air Biru (DAU SG)
18	Bangunan Puskesmas Pembantu	2023	235.584.600,00	Desa Belibak, Kec. Palmatak	2024	Belanja Pematangan Lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Teluk Sunting (194.447.000) + Pengawasan (17.937.600) + Konsultan Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Desa Belibak Kecamatan Palmatak (23.200.000)
19	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	48.684.600,00	Kec. Jemaja Barat	2024	100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Jemaja Barat (DAU SG)
20	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	46.930.800,00	Kec. Siantan Utara	2024	100% Belanja Modal pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Siantan Utara (DAU SG)
21	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2023	46.930.800,00	Kec. Kute Siantan	2024	100% Belanja Modal Pada Pekerjaan Belanja DED Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kute Siantan (DAU SG)
22	Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	2023	22.971.450,00	Desa Teluk Sunting, Kec. Siantan Tengah	2024	Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Batu Miring Pustu Teluk Sunting (DAU SG)
23	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	24.971.670,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Pembangunan Air Bersih RSUD Palmatak (DAU SG)
<b>J U M L A H</b>			<b>1.960.505.720,00</b>			

**Tabel 171**  
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	14.883.000,00	Kecamatan Palmatak	2024	
2	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2007	29.700.000,00	Desa Air Bini dan Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan	2024	

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	34.540.000,00	Desa Genting Kecamatan Siantan Selatan	2024	
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	49.060.000,00	Pelabuhan Pariwisata Manda Riau	2024	
5	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	49.500.000,00	Pulau Penjalin	2024	
6	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	44.220.000,00	Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan	2024	
7	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	48.565.000,00	Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan	2024	
8	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2017	49.544.000,00	Pelabuhan Pemda Letung	2024	
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	48.950.000,00	Kecamatan Siantan Selatan	2024	
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.800.000,00	Desa Air Bini dan Desa Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan	2024	
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.810.000,00	Umum Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur	2024	
12	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	14.850.000,00	Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan	2024	
13	Jalan Kabupaten Lain-lain	2017	29.920.000,00	Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah	2024	
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2018	9.910.000,00	RT.05/RW.03 Desa Kiabu Kec. Siantan Selatan	2024	
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	79.799.000,00	Tarempa	2024	
16	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.700.000,00	Kelurahan Letung di Kecamatan Jemaja	2024	
17	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.000.000,00	Kecamatan Jemaja	2024	
18	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.800.000,00	Pelabuhan Pemda Letung di Kecamatan Jemaja	2024	
19	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	99.528.000,00	Matak Kecil	2024	
20	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	79.766.000,00	Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara	2024	
21	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	29.826.000,00	Desa Temburun	2024	
22	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	64.064.000,00	Sri Tanjung Kecamatan Siantan	2024	
23	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2019	59.620.000,00	Desa Ladan	2024	

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2020	13.860.000,00	Kec. Siantan	2024	
25	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	10.653.000,00	Air Bandung Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	
26	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	88.671.000,00	Desa Air Asuk Kec. Siantan Tengah	2024	
27	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	99.715.000,00	Desa Serat Kec. Siantan Timur	2024	
28	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	49.868.000,00	Desa Teluk Mabai Desa Pesisir Timur Kec. Siantan	2024	
29	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	24.800.000,00	Kantor Camat Siantan Timur	2024	
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	45.226.000,00	Dusun Muntai Desa Teluk Siantan	2024	
31	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.882.000,00	Pulau Darak Kec. Jemaja	2024	
32	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2020	79.810.000,00	Tarempa	2024	
33	Rambu Jalan	2021	7.250.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu Wilayah Zona Selamat Sekolah di Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
34	Rambu Jalan	2021	30.415.000,00	Kec Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan marka dan rambu wilayah zona selamat sekolah
35	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	2021	15.900.000,00		2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Subkeg. Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
36	Guardrail	2021	10.935.000,00	Kec. Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
37	Guardrail	2021	19.745.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Jl.Raden Saleh RT.03 Gang Durian Kelurahan Tarempa Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
38	Guardrail	2021	39.270.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Desa Teluk Siantan Kec.Siantan tengah Sub keg.Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
39	Guardrail	2021	34.345.500,00	Kec. Jemaja	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) di Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
40	Guardrail	2021	21.939.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Desa Telaga Kecil Kec.Siantan Selatan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
41	Guardrail	2021	39.105.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Guadrail Kec.Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota
42	Guardrail	2021	49.665.000,00	Dusun Selambak	2024	Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Pekerjaan Perencanaan Pengadaan Pemasangan Guadrail Jl. Sudirman Dusun Selambak
43	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.373.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa Konsultansi perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya desa air biru kec.jemaja pada sub keg.Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
44	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.758.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa Konsultansi Perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya jalan puskesmas air asuk kec.siantan tengah pada sub keg.penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota
45	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	35.926.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Batu Ampar-Payalaman-Matak-Teluk Bayur Kec.Kute

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Siantan Sub Keg.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
46	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	21.340.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Temburun, Kec.Siantan Timur Sub Keg Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/Kota
47	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	2021	22.110.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan jalan Umum (PJU) RT.Kel.Letung Kec.Jemaja sub Keg.Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
48	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2021	49.890.000,00	RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.003/RW.002 Dusun 2 (DARMAWI) Desa Munjan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
49	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2021	88.864.000,00	Gang Tamban 1 RT.002/RW.001 Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja jasa konsultansi perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu gang Tamban 1 RT.002 RW.001 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
50	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2021	99.396.000,00	RT.002/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran terminj 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu RT.02/RW.02 Dusun2 (Herman) Desa Munjan Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
51	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2021	99.143.000,00	SMP 05 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Pelabuhan SMP 05 Desa Bayat Kec.Siantan UtaraSub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
52	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2021	99.495.000,00	RT.03/RW.02 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Pelabuhan RT.03 RW.02 Desa Bayat Kec.Siantan Utara Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
53	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Darurat	2021	19.745.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Batu RT.03 Desa Bayat Kec.Siantan Utara sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
54	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Darurat	2021	14.663.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Tangga Turun dari Pompong Desa Keramut Kec.jemaja barat sub keg.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
55	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Darurat	2021	50.303.000,00	Desa Batu Ampar	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Tunggu Pelabuhan Desa Batu Ampar Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
56	Bangunan Tempat Parkir	2021	45.650.000,00	Kecamatan Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaa Pembuatan Tempat Parkir Alat Berat/Excavator pada sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan,pendauran ulang dan pemanfaatan kembali
57	Bangunan Tempat Parkir	2021	48.466.000,00	Air Nangak Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Pelabuhan Air Nangak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
58	Bangunan Parkir lainnya (dst)	2021	49.511.000,00	Desa Candi	2024	Pekerjaan Perencanaan Pemasangan Batu Miring Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi Kec.Palmatak
59	Taman lainnya	2021	21.175.000,00	SMP N 2 Siantan Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SMP 2 Siantan pad sub keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
60	Taman lainnya	2021	24.975.000,00	SMP Arung Hijau Kec Siantan Selatan	2024	Pembayaran Terminj 100% belanja jasa konsultansi

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						perencanaan taman hijau di SMP Arung Hijau pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
61	Taman lainnya	2021	21.169.000,00	SMP N 1 Siantan Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SMP 1 Siantan pada sub Keg.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
62	Taman lainnya	2021	23.710.000,00	SD 08 Lembah Rewak	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 08 Lembah Rewak pada Sub Keg.pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
63	Bangunan Dermaga	2021	14.619.000,00	Desa Keramat Kec, Jemaja	2024	Pembayaran Terminj 100% pekerjaan perencanaan pembangunan pelantar beton tambatan perahu desa keramat kec.jemaja barat sub keg.pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
64	Bangunan Dermaga	2021	11.330.000,00	Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun 1 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
65	Bangunan Dermaga	2021	12.745.000,00	Desa Piabung Kecamatan Palmatak	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Piabung Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
66	Bangunan Dermaga	2021	50.237.000,00	Desa Payamaram	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu Dusun Sekubik Desa Payamaram Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
67	Bangunan Dermaga	2021	15.059.000,00		2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 RW.03 Desa Putik Kec.Palmatak Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan pengumpan Lokal
68	Bangunan Dermaga	2021	51.141.000,00	Batu Berapit Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu RT 7 RW 3 Air Ipe Desa Batu Berapit Kec.Jemaja Sub Keg.Pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan Pengumpan Lokal
69	Bangunan Dermaga	2021	44.709.000,00	RT.006/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT 006/RW 002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
70	Bangunan Dermaga	2021	41.998.000,00	RT.02/RW.02 Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW02 Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
71	Bangunan Dermaga	2021	49.142.000,00	RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Jl.Usman RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
72	Bangunan Dermaga	2021	49.313.000,00	RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec Kute Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.03 Teluk Durian Desa Teluk Bayur Kec.Kute Siantan Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
73	Bangunan Dermaga	2021	49.720.000,00	Kec. Jemaja Barat	2024	Pembayaran terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Tambatan Perahu Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
74	Bangunan Dermaga	2021	48.004.000,00	RT.02/RW.02 Dusun II Desa Munjan Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.002/RW.002 Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
75	Bangunan Dermaga	2021	98.393.000,00	RT.06 Desa Nyamuk Kec. Siantan timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 Nyamuk Sub Keg.Pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Pelabuhan Pengumpan Lokal
76	Bangunan Dermaga	2021	99.412.000,00	RT.004 Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Mayang Sari RT.04 Desa Bayat Kec.Siantan Utara
77	Bangunan Dermaga	2021	90.409.000,00	Desa Bayat Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Bayat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
78	Bangunan Dermaga	2021	90.420.000,00	Dusun Sedak Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sedak Kec.Siantan Sub Keg Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
79	Bangunan Dermaga	2021	99.863.000,00	Desa Keramut Kec. Jemaja Barat	2024	Pembayaran Terminj 100% belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Keramut Kec.Jemaja Barat Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
80	Bangunan Dermaga	2021	99.418.000,00	Desa Payalaman Kec. Kute Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Payalaman Sub Keg.Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
81	Bangunan Dermaga	2021	99.907.000,00	RT.05/RW.03/asban Desa Candi Kec. Palmatak	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.05 RW03 /asban desa candi kec.palmatak sub keg pembangunan pelabuhan pengumpan lokal
82	Bangunan Dermaga	2021	34.610.000,00	Desa Munjan	2024	Pekerjaan Perencanaan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.002/003 Dusun III Desa Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
83	Bangunan Dermaga	2021	35.525.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu Lapangan Bola Desa Munjan
84	Bangunan Dermaga	2021	28.750.000,00		2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbun Pelabuhan Desa Candi (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
85	Bangunan Dermaga	2021	32.650.000,00	Desa Putik	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.006/RW.03

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Desa Putik Kec. Palmatak (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
86	Bangunan Dermaga	2021	18.155.000,00	Desa Payalaman	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu Kp. Umbar Desa Payalaman Kec. Kute Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
87	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Sri Tanjung	2024	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sri Tanjung (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
88	Bangunan Dermaga	2021	29.120.000,00	Teluk Denung, Desa Pesisir Timur	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Pesisir Timur Kec. Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
89	Bangunan Dermaga	2021	33.480.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.001/RW.003 (Gang Zul) Desa Munjan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
90	Bangunan Dermaga	2021	35.260.000,00	Desa Teluk Siantan	2024	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Sandar Kapal Penyeberangan Desa Teluk Siantan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
91	Bangunan Dermaga	2021	33.750.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Tambatan Perahu RT,003/RW.002 Desa Munjan Kec. Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
92	Bangunan Dermaga	2021	34.400.000,00	Desa Nyamuk	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.001/RW.001 Teluk Denung Desa Nyamuk Kec. Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
93	Bangunan Dermaga	2021	7.160.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Saat Desa Munjan Kec. Siantan Timur (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
94	Bangunan Dermaga	2021	40.400.000,00	Kelurahan Letung	2024	Pekerjaan Perencanaan Pelabuhan Apung Berhala Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
95	Bangunan Dermaga	2021	33.490.000,00	Desa Air Biru	2024	Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Semeniasi Pelantar Beton Pelabuhan Nelayan Desa Air Biru Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
96	Bangunan Dermaga	2021	28.450.000,00	Desa Batu Berapit	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Air

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
97	Bangunan Dermaga	2021	30.340.000,00	Desa Air Bini	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
98	Bangunan Dermaga	2021	28.145.000,00	Desa Impol	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Desa Impol Kec. Jemaja Barat (Tunda Bayar LHR 14 April 2022)
99	Bangunan Dermaga	2021	99.500.000,00	Desa Air Bni	2024	Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.02/RW.04 Desa Air Bini Genting Kec. Siantan Selatan
100	Bangunan Dermaga	2021	99.896.000,00	Desa Batu Ampar	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Sambungan Tambatan Perahu Desa Batu Ampar
101	Bangunan Dermaga	2021	99.891.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Karman RT 02 RW 02 Desa Munjan Kec. Siantan
102	Bangunan Dermaga	2021	98.131.000,00	Desa Mengkakit	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Mengkakit Kecamatan Siantan Selatan
103	Bangunan Dermaga	2021	99.852.000,00	Desa Candi	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan RT.003/RW.002 Desa Candi Kec. Palmatak
104	Bangunan Dermaga	2021	99.401.000,00	Desa Pian Pasir	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pian Pasir Kecamatan Siantan Utara
105	Bangunan Dermaga	2021	99.880.000,00	Desa Langir	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Nur Arifin RT.04 RW.02 Desa Langir Kec. Palmatak
106	Bangunan Dermaga	2021	99.407.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/RW.002 Dusun II Desa Munjan (Harun)
107	Bangunan Dermaga	2021	99.975.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tangga dan Semenisasi Pelabuhan Puskesmas Pembantu Desa Munjan Kec. Siantan Timur
108	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Tarempa Timur	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Teluk Red Desa Tarempa Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
109	Bangunan Dermaga	2021	79.343.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Rakyat Dusun Teluk Rung Desa Munjan
110	Bangunan Dermaga	2021	99.935.000,00	Desa Air Sena	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Tanjung Mulia Desa Air Sena
111	Bangunan Dermaga	2021	80.844.000,00	Desa Payakmaram	2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sekubik Desa Payakmaram
112	Bangunan Dermaga	2021	99.440.000,00	Desa Nyamuk	2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Dam RT.10 Nyamuk Kec. Siantan Timur
113	Bangunan Dermaga	2021	98.406.000,00	Desa Munjan	2024	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.003/001 Dusun 1 Desa Munjan
114	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2021	19.316.000,00	Desa Nyamuk Kec, Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan WC Pelabuhan Desa Nyamuk Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal
115	Buku Umum Lain-lain	2021	99.858.000,00		2024	
116	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	8.750.000,00		2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Taman Hijau di SD 001
117	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Pada Sub Keg.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
118	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	2021	50.160.000,00		2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
119	Kapal Motor	2022	99.345.000,00		2024	Belanja jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan -pembangunan bus air ro-ro-DAK penugasan sub keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota TA 2022
120	Kapal Motor	2022	98.790.000,00		2024	Belanja Jasa konsultansi perencanaan pengadaan sarana (moda) transportasi perairan-pembangunan bus air Ro-Ro peninting-konjo (kecamatan siantan) Sub

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						keg penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dal
121	Bangunan Dermaga	2022	24.353.000,00		2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Dolpin Roro Pelabuhan di Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur
122	Bangunan Dermaga	2022	51.115.000,00		2024	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Kusik Kecamatan Jemaja
123	Bangunan Dermaga	2022	23.254.000,00		2024	Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan di Desa Lidi Kecamatan Siantan Tengah
124	Bangunan Dermaga	2022	52.591.000,00		2024	Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Air Putih Kecamatan Siantan Timur pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
125	Bangunan Dermaga	2022	45.660.000,00		2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Peningkatan Pelabuhan di Desa Pesisir Timur Kec. Siantan
126	Kapal Motor	2023	99.644.700,00		2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Cepat Mengkait-Air Bini Siantan Selatan
127	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan /Bandara Permanen	2023	99.239.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Ruang Tunggu Pelabuhan Pemda Kec. Siantan
128	Bangunan Dermaga	2023	99.463.770,00	Desa Rewak	2024	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Dermaga Desa Rewak Tahap II pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
129	Bangunan Dermaga	2023	99.119.670,00	Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Pelabuhan SMA Negeri 1 Siantan Timur pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
130	Bangunan Dermaga	2023	99.211.800,00	Desa Sunggak	2024	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Pelabuhan Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
131	Bangunan Dermaga	2023	99.567.000,00	Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2024	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Momong Kec. Siantan pada

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
						Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
132	Bangunan Dermaga	2023	99.235.110,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Terminj 100% Perencanaan Pelabuhan Nelayan Tunjuk RT.01/RW.01 Desa Landak, Kec. Jemaja pada Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
133	Bangunan Dermaga	2023	1.625.000.000,00	Pulau Siantan-Pulau Matak, Jemaja-Jemaja Barat	2024	Pembayaran Jasa Konsultansi Perencana SSID Pelabuhan Multipurpose Pulau Siantan-Pulau Matak dan SSID Penyeberangan Jemaja-Jemaja Barat
<b>J U M L A H</b>			<b>8.851.029.550,00</b>			

Tabel 172

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2017	98.230.000,00	Pasar Inpress	2024	
2	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2018	372.880.777,00	Jl. Hang Tuah Tarempa	2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pasir Loka
3	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2021	12.551.000,00	Jl. Batu Tambun Kec. Siantan	2024	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Ruang Rapat
4	Bangunan Tempat Parkir	2021	11.616.000,00	Tanjung Desa Tarempa Barat	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar dan Area Parkir
<b>J U M L A H</b>			<b>495.277.777,00</b>			

Tabel 173

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	2015	26.950.000,00	Desa Keramat. Kec. Jemaja Barat	2024	Perencanaan Pembangunan Pabrik Es
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2017	340.000.000,00	Desa Air Putih Kec. Siantan Timur	2024	

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2024	
4	Bangunan Rumah Sakit Hewan	2017	28.105.000,00	Kec. Palmatak	2024	
5	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.645.000,00	Kec. Siantan	2024	
6	Jalan Desa Lain-lain	2017	29.370.000,00	Kec. Siantan	2024	
7	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2018	9.950.000,00	Kec. Palmatak	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Keliling PUSKESWAN
8	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	24.667.500,00	Kec. Siantan	2024	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gudang Penyimpanan Rumput Laut
9	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2019	29.700.000,00	Kec. Siantan	2024	DED Renivasi Balai Penyuluhan Pertanian
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2020	29.892.500,00		2024	Penyusunan DED sarana dan Prasarana HSRT
11	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	2021	89.760.000,00	Kec. Siantan	2024	Pembangunan Pelantar Tempat Pendaratan Ikan (Tunda Bayar Tahun 2021)
12	Bangunan Untuk Kandang	2021	19.981.000,00	Kecamatan Siantan	2024	DED Pembuatan Kandang Penggemukan Sapi dan Pagar hijau Makan Ternak
13	Pagar Permanen	2021	19.992.000,00	Kecamatan Jemaja Timur	2024	DED Pembangunan Pagar Balai Benih Pertanian Terpadu Jemaja Timur
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kecamatan Palmatak	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Palmatak
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	6.021.750,00	Kec. Siantan Timur	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2022	5.772.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pelantar Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Siantan Tengah
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.696.400,00	Kec. Jemaja Timur	2024	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Jemaja Timur
18	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	11.754.900,00	Kec. Siantan Selatan	2024	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Siantan Selatan
19	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2022	14.663.100,00	Kec. Palmatak	2024	DED Ruang Multifungsi BPP Kecamatan Palmatak
20	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	2022	50.627.100,00	Kec. Jemaja Timur	2024	DED Pembangunan Jaringan Irigasi di Kecamatan Jemaja Timur
<b>J U M L A H</b>			<b>815.425.250,00</b>			

Tabel 174

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Teluk Denung Pesisir Timur RT.001/RW.001 Kec. Siantan	2024	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Balai Kesenian RT.001 RW,001 Teluk Denung Pesisir Timur Kec. Siantan
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2020	35.145.000,00	Jl. Pasir Merah SP	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjut Pembangunan Destinasi Wisata Batu Tompak Tiga
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	10.340.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2024	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo di Pulau Kuku Desa Air biru Kec. Jemaja
4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	2020	9.845.000,00	Desa Batu Ampar, Kec. Palmatak	2024	Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Gazebo Desa Batu Ampar Kec. Palmatak
5	Jembatan penyeberangan Kendaraan	2020	9.900.000,00	Tanjung Momong, Kec. Siantan	2024	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Dive Center Tanjung Momong

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
6	Bangunan Gedung Musium Permanen	2022	98.770.000,00	Kab. Kepulauan Anambas	2024	DED Pembangunan Musium Kab. Kep. Anambas
<b>J U M L A H</b>			<b>174.340.000,00</b>			

**Tabel 175**  
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan**  
**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	30.793.636.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2024	Pembangunan dan Penimbunan Water Front City Kota Tarempa (Tahap I) Kec. Siantan Lanjutan TA 2013 + Realisasi 2013
2	Jalan Kabupaten Lokal	2014	269.225.000,00	Jl. Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak	2024	Perencanaan Pembangunan Jalan Piabung - Muntai dan Langir - Muntai Kec. Palmatak
3	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	2014	28.633.000,00	Dusun Teluk Pering, Desa Putik, Kec. Palmatak	2024	Perencanaan Pembuatan Pagar atau Wiremesh Dusun Teluk Pering Desa Putik Kec. Palmatak
4	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	2017	48.785.000,00	Tarempa, Kec. Siantan	2024	DED PEMBANGUNAN ASTAKA
5	tugu lainnya (dst)	2017	48.730.000,00		2024	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
6	Jalan Kabupaten Lokal	2017	49.225.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2024	DED PEMBANGUNAN JALAN PADANG MELANG JALUR II KECAMATAN JEMAJA
7	Jalan Kabupaten Lokal	2017	190.135.000,00	Jl. Bayat - Mubur Kecil - Piasan - Pian Pasir - Palah, Kec. Palmatak	2024	DED PEMBANGUNAN JALAN BAYAT-MUBUR KECIL-PIASAN-PIAN PASIR-PALAH KECAMATAN PALMATAK
8	Jalan Kabupaten Lokal	2017	89.265.000,00	Jl. Pasir Merah - Cengkareng, Kec. Siantan	2024	DED PEMBANGUNAN JALAN PASIR MERAH-CENKARENG KEC. SIANTAN
9	Jalan Kabupaten Lokal	2017	270.105.000,00	Jl. Genting Pulur - Besuh, Kec. Jemaja Timur	2024	SSID JALAN GNETING PULUR-BESUH
10	Jalan Kabupaten Lokal	2017	284.625.000,00	Jl. Lingkar Desa Tiangau - Teluk Rambut -	2024	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Desan, Kec. Siantan Selatan		DESA TIANGAU-TELUK RAMBUT-DESAN
11	Jalan Kabupaten Lokal	2017	239.085.000,00	Jl. Lingkar Matak Kecil - Teluk Durian - Nuan - Buton - Sedak	2024	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MATAK KECIL-TELUK DURIAN-NUAN-BUTON-SEDAK
12	Jalan Kabupaten Lokal	2017	266.805.000,00	Jl. Lingkar Muntai - Kampung Baru	2024	SSID PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MUNTAI-KAMPUNG BARU
13	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	169.345.000,00	Jl. Padang Melang, Kec. Jemaja	2024	DED PEMBANGUNAN PADANG MELANG JALUR II
14	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	2017	302.005.000,00	Desa Belibak - Tebang, Kec. Palmatak	2024	SSID JALAN PELANTAR BETON PENGHUBUNG ANTAR DESA BELIBAK-DESA TEBANG
15	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	49.225.000,00	Desa Payalaman - Batu Ampar, Kec. Kute Siantan	2024	DED PELANTAR BETON PAYALAMAN-BATU AMPAR
16	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	125.125.000,00	Jl. Pelantar Serkah dan Lorong Sempit, Kec. Siantan	2024	DED JALAN PELANTAR SERKAH DESA TAREMPA BARAT DAN DED LORONG SEMPIIT KELURAHAN TAREMPA
17	Jembatan Pada Jalan Desa	2017	286.935.000,00	Antang, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2024	SSID PEMBANGUNAN PELANTAR BETON ANTANG DESA TAREMPA TIMUR
18	Jalan Kabupaten Arteri	2018	48.565.000,00	Kec. Siantan	2024	DED Pembangunan Jalan Menuju TPA Siantan Kec. Siantan
19	Jalan Kabupaten Lokal	2018	5.461.767.906,00	Jl, Genting - Desan, Kec. Siantan Selatan	2024	Peningkatan jalan Genting-Desan kec. Siantan Selatan
20	Jalan Kabupaten Lokal	2018	97.075.000,00		2024	
21	Jalan Kabupaten Lokal	2018	449.625.000,00	Jl. Sri Tanjung Luwe, Desa Tarempa Barat Daya, Kec. Siantan	2024	DED Jalan Sri Tanjung - Luwe Desa Tarempa Barat Daya Kec. Siantan
22	Jalan Kabupaten Lokal	2018	48.565.000,00	Jl. Putik - Teluk Pering, Kec. Palmatak	2024	DED Pembangunan Jalan Putik - Teluk Pring Kecamatan Palmatak
23	Bangunan Pengambilan Bebas	2018	97.515.000,00	Desa Dapit, Kec. Jemaja Timur	2024	DED Normalisasi Bendung Dapit Kecamatan Jemaja Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
24	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	11.935.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2024	Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tempal Pemakaman Umum Kelurahan Letung Kec. Jemaja
25	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	22.110.000,00	Desa Air Sena dan Desa Air Asuk, Kec. Siantan Tengah	2024	Perencanaan Lanjutan Penimbunan tanah gereja santa Desa Air Sena, Perencanaan lanjutan pemasangan batu miring Gg.Nangka Desa Air Asuk
26	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2018	36.080.000,00	Desa Telaga Besar, Kec. Siantan Selatan	2024	perencanaan pemasangan batu miring Abrasi Pantai Desa Telaga Besar Dusun 1 Panjang, Perencanaan penimbunan dan pemabngunan Batu Miring
27	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00		2024	Perencanaan Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi 2019
28	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	DED Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja Timur
29	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	98.890.000,00		2024	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Matan
30	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2018	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2024	DED Peningkatan Jaringan Daerah Irigasi (DI) Jemaja
31	Bangunan Waduk	2018	96.085.000,00	Gunung Lintang, Kec. Siantan	2024	DED Normalisasi Gunung Lintang Kecamatan Siantan
32	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	2018	10.340.000,00	Jl. Abdul Rahman - Kp. Baru	2024	Perencanaan Pembuatan Drainase/Gorong-gorong jalan Abdul Rahman ke Jalan Kp. Baru RT 02 RW 03
33	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2019	434.914.000,00	Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2024	Pematangan lahan perumahan khusus di Tarempa Selatan + Perencanaan dan Pengawasan
34	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.495.000,00	Jl. SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil, Kec. Siantan Timur	2024	DED Peningkatan Jalan SP. Serat - Teluk Rung - SP. Tinggil Kec. Siantan Timur
35	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Air Bayo - Mampok, Kec. Jemaja	2024	DED Jalan Air Bayo - Mampok Kec. Jemaja
36	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.601.005,00	Jl. Bukit Padi - Air Biru, Kec. Jemaja	2024	DED Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja
37	Jalan Kabupaten Lokal	2019	98.601.000,00	Jl. SP. Letung - SP. Pelabuhan Letung - SP. Rewak, Kec. Jemaja	2024	DED Peningkatan Jalan Sp.Letung - Sp.Pelabuhan Letung - Sp. Rewak

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
38	Jalan Kabupaten Lokal	2019	99.044.000,00	Jl. Rewak - Sedanau, Kec. Jemaja	2024	ded peningkatan jalan rewak-sedanau (hutang)
39	Jalan Khusus Lain-lain	2019	449.095.500,00	Jl. Pasir Peti, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2024	Pembangunan Jalan Masuk Menuju Kantor Bupati KKA
40	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.000.000,00	Kec. Jemaja	2024	Perencanaan Peningkatan/rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Jemaja
41	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	2019	99.110.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2024	DED Jaringan Sekunder Daerah Irigasi Jemaja Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur
42	Bangunan Waduk Lain-lain	2019	73.870.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2024	pembangunan penampung air desa payalaman kec palmatak (lanjutan) Hutang
43	Bangunan Waduk	2019	192.995.000,00	Kec. Siantan	2024	Review Desain Pembangunan Embung Batu Tabir Kecamatan Siantan
44	Saluran Drainage	2019	266.750.000,00	Kec. Siantan	2024	Penyusunan Masterplan Drainase Kec. Siantan
45	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	13.750.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2024	Perencanaan Pembangunan Pemecah Ombak Desa Landak Kecamatan Jemaja
46	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2019	790.597.214,00	Desa Mengkai, Kec. Siantan Selatan	2024	Renovasi Talud Pemecah Ombak Desa Mengkai Dusun I dan Dusun II Desa Mengkai Kecamatan Siantan Selatan
47	Bangunan Pemecah Gelombang	2019	98.010.000,00	Desa Dapit - Kuala Maras, Kec. Jemaja Timur	2024	Review DED Pengerukan Normalisasi Sungai Dapit menuju Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur
48	Sumur Resapan	2019	381.257.710,00	Kec. Siantan	2024	Pembangunan Reservoir dan Jaringan SPAM IKK. Siantan
49	Sumur Resapan	2019	97.790.000,00	Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2024	Penyusunan DED Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Jaringan SPAM Kelurahan Letung Kec. Jemaja
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Desa Ladan, Kec. Palmatak	2024	Belanja jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Palmatak (LUNAS TAHUN 2022)
51	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	97.462.200,00	Kec. Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% DED Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
52	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.220.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Kute Siantan
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	35.846.800,00	Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Utara
54	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	82.914.700,00	Kec. Siantan	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Di Kecamatan Siantan
55	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.330.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Siantan Selatan
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.776.160,00	Kec. Siantan Timur	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan Timur
57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	99.350.240,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pembangunan gedung kantor di Kecamatan Siantan Tengah
58	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	2021	23.155.000,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2024	Pembayaran 100% Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kec. Siantan
59	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	98.945.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute siantan
60	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	95.106.000,00	Kec. Palmatak	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pengembangan infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak (Sisa 40% Hutang Tahun 2021)
61	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	176.735.000,00	Kec. Jemaja	2024	Belanja jasa Konsultan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan jemaja No. 303/SPP-SPM-LS/1.03.1.1 Tunda

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
						Bayar Tahap I (- 72.000.000 JK BPK)
62	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	59.508.900,00		2024	Belanja Modal Jalan Bangunan terbuka - DED sarana prasarana dan utilitas rumah khusus (Sudah dibayarkan tahun 2022)
63	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	2021	142.659.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembayaran Termin 60% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pengembangan Infrastruktur kawasan Permukiman di Kecamatan palamatak
64	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.405.000,00	Jl. Kampung Baru - Payalaman - Batu Ampar	2024	DED Lanjutan jalan kampung baru kelurahan pelantar beton nyondong - Payalaman Desa Batu Ampar
65	Jalan Kabupaten Lokal	2021	109.802.220,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2024	Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung-Landak (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
66	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.386.500,00	Jl. Balau Kuning - Bak Air Antang, Desa Pesisir Timur, Kec. Siantan	2024	DED Pembangunan Jalan Balau Kuning-Bak Air Antang
67	Jalan Kabupaten Lokal	2021	52.580.000,00	Jl. Kampung Baru, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2024	DED lanjutan jalan kampung baru Kelurahan Tarempa
68	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.041.000,00	Jl. Pasir Peti - Konjo, Kec. Siantan	2024	DED Pembangunan Jalan Pasir Peti - Konjo
69	Jalan Kabupaten Lokal	2021	1.189.353.529,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2024	Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak
70	Jalan Kabupaten Lokal	2021	160.098.180,00	Jl. SP. Letung - Landak, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran 60% (Termin 57%) Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak (Lunas 60%)
71	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. Pasir Peti, Kec. Siantan	2024	DED Jalan Komplek Pasir Peti
72	Jalan Kabupaten Lokal	2021	746.816.820,00		2024	Pembangunan Jalan Lingkungan (Sudah dibayarkan tahun 2022 termin 60%)
73	Jalan Kabupaten Lokal	2021	49.907.000,00		2024	Pembayaran 100 % Pengawasan Jalan lingkungan se Kabupaten Kepulauan Anambas
74	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.680.000,00	Jl. SP. SMA 1 Letung - Padang Melang, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan SP SMA 1 Letung - Padang Melang

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
75	Jalan Kabupaten Lokal	2021	94.831.000,00	Jl. SP - Air Padang - Antang, Kec. Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Konsultasi Perencanaan Rekayasa DED Pembangunan Jalan SP - Air Padang - Antang
76	Jalan Kabupaten Lokal	2021	95.073.000,00	Jl. Gudang Tengah - Lokasi TPU, Kec. Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Lokasi TPU
77	Jalan Kabupaten Lokal	2021	96.277.500,00	Kec. Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Reservasi Jalan Kecamatan Siantan
78	Jalan Kabupaten Lokal	2021	232.650.000,00	Jl. Peninting - Payalaman	2024	Pembayaran Termin 100% Fisibility Study (FS) Pembangunan Jalan Peninting Payalaman
79	Jalan Kabupaten Lokal	2021	22.954.800,00	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kec. Siantan	2024	Pembayaran 100% Perencanaan Semenisasi Jalan Imam Bonjol RT 01 RW 01 Kelurahan tarempa Kec.Siantan
80	Jalan Kabupaten Lokal	2021	97.347.800,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Tengah
81	Jalan Kabupaten Lokal	2021	99.275.000,00	Kec. Jemaja, Jemaja Timur dan Jemaja Barat	2024	Pembayaran 100% Belanja Perencanaan pengembangan infrastuktur kawasan permukiman jemaja, jemaja timur dan jemaja Barat
82	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.340.500,00	Kec. Siantan Utara	2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Siantan Utara
83	Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.565.500,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultan perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan permukiman di Kecamatan Siantan Selatan
84	Jalan Kabupaten Lokal	2021	123.288.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Pembayaran 60% Belanja Konsultan Pengawasan pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan
85	Jalan Kabupaten Lokal	2021	82.192.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Belanja Konsultan Pengawasan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
						pengembang Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kecamatan Kute Siantan (Sisa Hutang 40% Tahun 2021)
86	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	98.230.000,00	Kec. Siantan	2024	DED Jalan Lingkungan dan dinding penahan tanah polres kabupaten
87	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	24.920.500,00	Gg. Musliadi, Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah	2024	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Gg. Musliadi RT 02 RW 01 Air Sena Kec. Siantan Tengah
88	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	96.305.000,00	Jl. Pelantar Loka, Kelurahan Letung, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran 100% DED Jalan Pelantar Loka Letung
89	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	22.899.800,00	Gg. Angrek Antang Tengah, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2024	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan lanjutan Pembangunan gang Angrek RT02/RW 01 Antang Tengah Desa Tarempa Timur Kec. Siantan
90	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	47.298.900,00	Gg. Mabai, Desa Lingai, Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran 100 % DED gang Mabai RT.03.Rw.01 Lingai siantan Selatan
91	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	49.478.000,00	Gunung. Kuatang	2024	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Jalan Menuju Gunung Kuatang
92	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	94.996.000,00	Jl. Gudang Tengah - Arung Hijau, Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Arung Hijau
93	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	58.300.000,00	Matan	2024	Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultansi Penguatan data Base dan survey kondisi jaringan irigasi aplikasi e-paksi di matan
94	Jalan Kabupaten Lain-lain	2021	95.562.500,00	Jl. Laut Sri Tanjung	2024	Pembayaran 100% DED Jalan Laut Sri Tanjung
95	Jalan Desa	2021	57.088.900,00	Jl. Lingkar Batu Belah, Kec. Siantan Timur	2024	Jalan Lingkar Batu Belah
96	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	98.406.000,00	Desa Payalaman, Kec. Kute Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jembatan Gantung Sekubit Payalaman
97	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting -	2024	Pembayaran Termin 100% Review Perencanaan Pembangunan

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Penebung - Lidi		Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi
98	Jembatan Fly Over	2021	835.389.500,00	Kampung Baru - Air Asuk - Genting - Penebung - Lidi	2024	Pembayaran Termin 50% Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk, Genting - Penebung, Air Asuk - Lidi
99	Jembatan Fly Over	2021	718.238.400,00		2024	Pembayaran Termin 40% Kajian Lingkungan Pembangunan Jembatan ( Swakelola )
100	Bangunan Got Miring	2021	98.827.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2024	Pemeliharaan Batu Miring Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
101	Saluran Drainage	2021	36.286.000,00	Kec. Jemaja Timur	2024	Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung kantor di Kecamatan Jemaja Timur
102	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	22.000.000,00	Kec. Jemaja	2024	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing di Kecamatan Jemaja
103	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	97.350.000,00	Desa Telaga Kecil, Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran 100% DED Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan
104	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	21.725.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Bangunan perkuat Tebing di Kecamatan Siantan Selatan
105	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2021	98.175.000,00		2024	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Se Kabupaten Kepulauan Anambas
106	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	96.745.000,00	Desa Air Biru, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Termin 100% Perencanaan Pemecah Ombak Desa Air Biru
107	Bangunan Pemecah Gelombang	2021	78.100.000,00	Desa Landak, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran 100% DED Pemecah Ombak Desa Landak
108	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	84.824.300,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
109	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	57.255.000,00	Kec. Siantan Timur	2024	Belanja Konsultansi Perencanaan SPAM di Kawasan Siantan Timur
110	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	56.100.000,00	Kec. Siantan Selatan	2024	Belanja Jasa Konsultasi perencanaan SPAM Siantan Selatan
111	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2021	49.808.000,00	Kec. Siantan Tengah	2024	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Siantan Tengah
112	Bangunan penampung sampah	2021	44.594.000,00	Desa Candi, Kec. Palmatak	2024	Belanja jasa Konsultans ipembangunan gedung tempat sampah (TPS) desa Candi
113	Jaringan air minum lainnya	2021	27.390.000,00	Kec. Kute Siantan	2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Kute Siantan
114	Jaringan air minum lainnya	2021	44.055.000,00	Kec. Palmatak	2024	Pembayaran Termin 100% Belanja Jasa Konsultan Perencanaan SPAM di Kecamatan Palmatak
115	Jalan Kabupaten Lokal	2022	466.777.200,00	Kampung Baru - Air Asuk	2024	Manajemen Konstruksi Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk (Multi Years)
116	Jalan Kabupaten Lokal	2022	49.533.750,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pembangunan Jalan Menuju Perkebunan Masyarakat RT 002 / RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
117	Jalan Desa	2022	49.550.400,00	Desa Mampok, Kec. Jemaja	2024	Pembayaran Termin 100% DED Pelebaran Jalan RT.002/RW.001 Desa Mampok Kec. Jemaja
118	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2022	2.176.560.999,41	Desa Putik, Kec. Palmatak	2024	Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring)
119	Jalan Kabupaten Kolektor	2023	98.912.100,00	Jalan Payalaman-Langir	2024	DED Peningkatan Jalan Payalaman-Langir (DAU SG)
120	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jl. Mampok - Teluk Kaut, Kecamatan Jemaja	2024	Reviu DED Peningkatan Mampok - Teluk Kaut Kecamatan Jemaja (DAU SG)
121	Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.845.500,00	Jl. Arung Hijau - Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan	2024	Reviu DED Peningkatan Jalan Arung Hijau - Tiangau Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
122	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jl. Rekam - Takari, Kecamatan Siantan	2024	Peningkatan Jalan Rekam - Takari Kecamatan Siantan (DAU SG)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
123	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.039.750,00	Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur	2024	100% DED Peningkatan Jalan Bandara - Pikuk Kec Jemaja Timur (DAU SG)
124	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.123.000,00	Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)	2024	Reviu DED peningkatan Jalan Putik - Langir Kecamatan Palmatak (DAU SG)
125	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	Jalan Air Asuk Tanjung Lidi Kecamatan Siantan Tengah	2024	DED Rekonstruksi Jalan Air Asuk Tanjung Lidi (DAU SG)
126	Jalan Kabupaten Lokal	2023	13.438.425.132,90	Jalan Bukit Padi - Air biru	2024	Penganaganan Long Segment Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (DAK)
127	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.012.000,00	Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur	2024	Reviu DED peningkatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (DAU SG)
128	Jalan Kabupaten Lokal	2023	8.374.192.409,00	Jl. Genting - Air Bini, Kec. Siantan Selatan	2024	Penanganan Long Segment Jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAK)
129	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.234.000,00	jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan	2024	Reviu DED peningkatan jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAU SG)
130	Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.984.250,00	Jalan Impul - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat	2024	Reviu DED Peningkatan Jalan Impul - Sunggak Kecamatan Jemaja Barat (DAU SG)
131	Jalan Kabupaten Lokal	2023	4.096.072.308,00	Jl. SP 1, Kec. Siantan	2024	Pembayaran Uang Muka 30% Rekonstruksi Jalan Selayang Pandang (SP) 1 Kecamatan Siantan (DAU SG)
132	Jalan Kabupaten Lokal	2023	99.178.500,00	Jl. SP 1, Kec. Siantan	2024	Reviu DED Rekonstruksi Jalan Selayang Pandang (SP) 1 Kecamatan Siantan (DAU SG)
133	Jalan Kabupaten Lokal	2023	279.047.340,00	Jl. Lingkar Pulau Bajau	2024	Reviu DED Jalan Lingkar Pulau Bajau (DAU SG)
134	Jalan Desa	2023	98.956.500,00	Desa Genting, Kec. Siantan Selatan	2024	DED jalan menuju pelabuhan bongkar muat genting kec siantan selatan (DAU SG)
135	Jalan Desa	2023	497.877.880,00		2024	Pembayaran Termin 100% Pembangunan Jalan Lingkungan (Tunda Bayar 2021)
136	Jalan Khusus Kompleks	2023	9.758.255.562,49	Jl. Pasir Peti, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan	2024	Peningkatan Jalan Lingkar Perkantoran Pasir Peti Kecamatan Siantan (DAU SG) (Fisik s.d 93% + Pengawasan)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
137	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	2023	98.912.100,00	Desa Tebang-Belibak, Kecamatan Palmatak	2024	Reviu DED Jembatan Tebang - Belibak Kecamatan Palmatak (DAU SG)
138	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	2023	32.387.580,00	Jl. Raden Saleh, Kel. Tarempa, Kec. Siantan	2024	Perencanaan Perkuatan Tebing Pemakaman Raden Saleh
139	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.289.500,00	KECAMATAN SIANTAN UTARA	2024	DED SPAM IKK SIANTAN UTARA
140	Bangunan Waduk Lain-lain	2023	99.012.000,00	Desa Ulu Maras, Kec. Jemaja Timur	2024	Perencanaan Pengaman Tebing Bendung Jemaja Timur
141	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	2023	55.389.000,00	Desa Bukit Padi, Kec. Jemaja Timur	2024	DED Saluran Pembuang DI Jemaja
142	Bangunan Waduk	2023	98.790.000,00	Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan	2024	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Samak Kecamatan Siantan
143	Bangunan Waduk	2023	99.234.000,00	Jl. Soekarno Hatta, Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan	2024	Perencanaan Penataan Kawasan Embung Gunung Lintang Kecamatan Siantan (Jalan menuju temburun)
144	Saluran Drainage	2023	99.123.000,00	Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur	2024	Perencanaan Rehab Saluran Primer DAM Jelis Kecamatan Jemaja Timur
145	Saluran Drainage	2023	49.373.910,00	Kec. Jemaja	2024	Jasa Perencanaan Drainase Kecamatan Jemaja
146	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.256.200,00	Jalan Raden Saleh Kecamatan Siantan	2024	Perencanaan Tanggul Sungai Raden Saleh
147	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.269.520,00	Tanggul Sungai Tarempa Selatan	2024	Perencanaan Tanggul Sungai Tarempa Selatan
148	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	99.178.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2024	Perencanaan Tanggul Sungai Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
149	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.956.500,00	Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur	2024	Perencanaan Tanggul Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat dan Jemaja Timur
150	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	161.438.319,00	RT.12/RW.04 Rintis Desa Tarempa Selatan	2024	Pemasangan Batu Miring Sungai RT.12/RW.04 Rintis Desa Tarempa Selatan (Dekat Rumah Sis Panjang)
151	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	98.790.000,00	Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur	2024	Perencanaan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Neraja Desa Ulu Maras Kecamatan Jemaja Timur

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
152	Krib Pengaman Sungai/Pantai	2023	1.573.082.460,00	Desa Putik, Kec. Palmatak	2024	Pembayaran Termin 41,70% Penanganan Bencana Kawasan Permukiman Desa Putik (Pembangunan Bronjong dan Batu Miring) (Tunda Bayar Tahun 2021)
153	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	49.783.500,00	Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur	2024	DED optimalisasi IPA SPAM Dapit Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur
154	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2023	70.818.000,00	Kec. Jemaja	2024	DED Optimalisasi IKK SPAM Jemaja
155	Bangunan penampung sampah	2023	69.540.390,00	Desa Landak Kecamatan Jemaja	2024	Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Landak Kecamatan Jemaja
156	Jaringan air minum lainnya	2023	99.012.000,00	DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur	2024	Perencanaan Dinding Penahan Tanah IPA DAM Dapit Kecamatan Jemaja Timur
157	Jaringan air minum lainnya	2023	49.672.500,00	instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja	2024	DED pembangunan instalasi jaringan Spam ke Bandara Letung Kec. Jemaja
<b>J U M L A H</b>			<b>96.727.246.544,80</b>			

Tabel 176

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Desa	2022	96.855.000,00		2024	Perencanaan Jalan Strategis Desa
<b>J U M L A H</b>			<b>96.855.000,00</b>			

Tabel 177

## Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat Daerah-Bagian Umum Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai	Lokasi	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2022	23.421.000,00		2024	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Perlengkapan
<b>J U M L A H</b>			<b>23.421.000,00</b>			

### 7.6.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.011.315.974.652,85.

Tabel 178  
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan	(1.011.315.974.652,85)	(139.492.672.560,91)	(236.687.216,16)	(1.150.571.959.997,60)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.011.315.974.652,85)</b>	<b>(139.492.672.560,91)</b>	<b>(236.687.216,16)</b>	<b>(1.150.571.959.997,60)</b>

Rincian perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60 sebagai berikut

Tabel 179  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5= 2 - 3 + 4
Peralatan Dan Mesin	(320.884.733.303,89)	(236.687.216,16)	(34.564.855.382,34)	(355.212.901.470,07)
Gedung dan Bangunan	(65.457.849.047,07)	-	(18.549.187.795,00)	(84.007.036.842,07)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(624.973.392.301,89)	-	(86.378.629.383,57)	(711.352.021.685,46)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.011.315.974.652,85)</b>	<b>(236.687.216,16)</b>	<b>(139.492.672.560,91)</b>	<b>(1.150.571.959.997,60)</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.011.315.974.652,85 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 180  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022	Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5= 2 - 3 + 4
Sekretariat DPRD	(10.978.761.579,00)	(24.593.821,00)	(553.740.691,00)	(11.507.908.449,00)
Sekretariat Daerah	(82.257.970.550,00)	(380.784.859,00)	(4.769.145.860,00)	(86.646.331.551,00)
Inspektora Daerah	(1.769.050.272,00)	(2.165.164,00)	(153.190.716,00)	(1.920.075.824,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(584.606.216.749,32)	2.723.358,34	(83.218.243.339,57)	(667.827.183.447,23)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(46.905.786.787,21)	81.438.495,00	(7.317.355.057,29)	(54.304.580.339,50)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022	Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5= 2 - 3 + 4
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(100.158.102.368,32)	1.205.605.564,50	(20.402.519.222,05)	(121.766.227.154,87)
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	(18.317.726,00)	(18.317.726,00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(92.635.612.376,00)	(482.233.071,00)	(12.980.753.294,00)	(105.134.132.599,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.180.169.297,00)	(4.076.875,00)	(285.188.234,00)	(2.461.280.656,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.978.019.902,00)	412.734,00	(291.696.705,00)	(2.270.129.341,00)
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	(15.260.151.788,00)	(582.812,00)	(885.397.383,00)	(16.144.966.359,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	(11.731.414.085,00)	(286.243.456,00)	(1.891.180.890,00)	(13.336.351.519,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.426.067.693,00)	(3.703.413,00)	(188.835.440,00)	(2.611.199.720,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(7.834.853.517,00)	(271.292.322,00)	(948.126.453,00)	(8.511.687.648,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(6.429.223.927,00)	14.731.518,00	(1.277.462.655,00)	(7.721.418.100,00)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	(34.621.860,00)	(34.621.860,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(11.135.019.651,00)	332.709.159,00	(750.704.989,00)	(12.218.433.799,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(6.042.321.381,00)	(21.651.331,00)	(441.673.720,00)	(6.462.343.770,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.223.483.975,00)	13.497.045,00	(182.690.373,00)	(4.419.671.393,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(2.011.392.460,00)	(19.919.601,00)	(295.452.490,00)	(2.286.925.349,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.052.148.348,00)	(2.361.700,00)	(18.282.503,00)	(1.068.069.151,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(851.344.912,00)	(329.379.422,00)	(768.550.888,00)	(1.290.516.378,00)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(15.314.300,00)	0,00	(48.031.366,00)	(63.345.666,00)
Kecamatan Siantan	(3.908.760.305,00)	24.806.032,00	(378.741.428,00)	(4.312.307.765,00)
Kecamatan Siantan Selatan	(2.171.429.027,00)	(3.245.002,00)	(196.011.542,00)	(2.364.195.567,00)
Kecamatan Siantan Timur	(1.008.042.202,00)	(508.749,00)	(104.540.338,00)	(1.112.073.791,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(2.062.626.420,00)	(39.669.722,00)	(170.172.296,00)	(2.193.128.994,00)
Kecamatan Palmatak	(2.923.638.335,00)	(1.394.823,00)	(182.354.150,00)	(3.104.597.662,00)
Kecamatan Jemaja	(2.815.776.314,00)	(18.820.933,00)	(226.894.768,00)	(3.023.850.149,00)
Kecamatan Jemaja Timur	(3.225.942.097,00)	(1,00)	(173.359.180,00)	(3.399.301.276,00)
Kecamatan Siantan Utara	(123.794.205,00)	(3.659.063,00)	(49.987.265,00)	(170.122.407,00)
Kecamatan Jemaja Barat	(293.271.411,00)	(996.941,00)	(117.864.509,00)	(410.138.979,00)
Kecamatan Kute Siantan	(300.268.419,00)	(15.328.041,00)	(171.585.230,00)	(456.525.608,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.011.315.974.652,85)</b>	<b>(236.687.216,16)</b>	<b>(139.492.672.560,91)</b>	<b>(1.150.571.959.997,60)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.150.571.959.997,60 tidak termasuk aset ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 181**  
**Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomptabel) Per SKPD**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	2	3	4 = 2 + 3
Sekretariat Daerah	1.186.066.962,00	0,00	1.186.066.962,00
Sekretariat DPRD	354.215.400,00	0,00	354.215.400,00
Inspektorat Daerah	132.372.000,00	0,00	132.372.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.568.720.251,00	721.166.276,00	4.289.886.527,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.136.611.627,26	403.862.477,00	1.540.474.104,26
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	182.900.495,00	0,00	182.900.495,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104.046.200,00	0,00	104.046.200,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121.146.000,00	23.769.000,00	97.377.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	457.618.105,00	20.517.150,00	478.135.255,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	258.011.000,00	982.350,00	258.993.350,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.478.300,00	13.000.000,00	204.478.300,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	86.228.000,00	0,00	86.228.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	148.761.718,00	0,00	148.761.718,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	64.052.100,00	0,00	64.052.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	5.640.000,00	5.640.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	551.934.450,00	35.105.970,00	587.040.420,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.743.223,00	0,00	68.743.223,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	58.909.000,00	0,00	58.909.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.438.200,00	0,00	100.438.200,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.512.500,00	0,00	100.512.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.428.000,00	0,00	10.428.000,00
Kecamatan Jemaja	97.735.000,00	0,00	97.735.000,00
Kecamatan Jemaja Timur	182.496.500,00	0,00	182.496.500,00
Kecamatan Palmatak	223.121.000,00	0,00	223.121.000,00
Kecamatan Siantan	291.310.400,00	0,00	291.310.400,00
Kecamatan Siantan Selatan	170.326.000,00	0,00	170.326.000,00
Kecamatan Siantan Tengah	86.022.000,00	0,00	86.022.000,00
Kecamatan Siantan Timur	119.474.800,00	0,00	119.474.800,00
Kecamatan Siantan Utara	23.409.500,00	0,00	23.409.500,00
Kecamatan Jemaja Barat	3.492.500,00	0,00	3.492.500,00
Kecamatan Kute Siantan	24.002.000,00	56.241.500,00	80.243.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.104.583.231,26</b>	<b>1.280.284.723,00</b>	<b>11.337.329.954,26</b>

#### 7.6.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan

Jangka Panjang (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (3) Aset Tak Berwujud dan (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp32.527.099.632,70 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp28.347.021.833,27.

Tabel 182  
Rincian Aset Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Keterangan	2023	2022
1	2	3	4
1	Tuntutan Ganti Rugi	300.055.779,93	705.579.539,17
2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi Netto (1+2)	300.055.779,93	705.579.539,17
4	Aset Tak Berwujud	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(45.499.679.364,00)	(42.461.747.920,67)
6	Aset Tak Berwujud Netto (4+5)	1.839.758.280,00	4.877.689.723,33
7	Aset Lain-lain	66.785.086.747,71	67.393.051.007,71
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(57.951.009.224,94)	(57.951.009.224,94)
9	Aset Lain-lain Netto (7+8)	8.834.077.522,77	9.442.041.782,77
10	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	21.553.208.050,00	13.321.710.788,00
11	Jumlah Aset Lainnya (3+6+9)	32.527.099.632,70	28.347.021.833,27

#### 7.6.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.055.779,93, terdiri dari Piutang TGR berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) bulan Maret 2019 dan penambahan atas sisa temuan BPK Tahun Anggaran 2023. Rincian saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

##### TGR PUPR

- CV CNB	Rp118.133.968,45
- CV MAB	Rp55.535.765,48
- CV ANJ	Rp31.580.810,68
- CV AT	Rp19.638.121,90
- CV BCR	Rp30.228.563,42

**Rp255.117.229,93**

##### TGR BPKPD

- RP	Rp44.938.550,00
------	-----------------

**Rp44.938.550,00**

**Jumlah Rp300.055.779,93**

#### 7.6.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan

*franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.339.437.644,00 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp47.339.437.644,00. Tidak terdapat mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud pada masing-masing SKPD Tahun 2023. Rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

**Tabel 183**  
**Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2023
1	5
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00
Sekretariat DPRD	39.600.000,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	69.410.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>47.339.437.644,00</b>

#### 7.6.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif ke rusak berat karena pemakaian dan aset yang belum diserahkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023. Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.785.086.747,71 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp67.393.051.007,71 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 184**  
**Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo 31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Des-23
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah	6.296.351.124,00	0,00	0,00	6.296.351.124,00
Sekretariat DPRD	261.434.000,00	0,00	0,00	261.434.000,00
Inspektorat	329.659.100,00	0,00	0,00	329.659.100,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5.908.738.778,00	0,00	0,00	5.908.738.778,00
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.319.775.715,23	0,00	0,00	8.319.775.715,23
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.856.509.920,00	0,00	0,00	3.856.509.920,00
Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.847.808.065,00	0,00	0,00	2.847.808.065,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.297.865.170,00	0,00	905.482.260,00	392.382.910,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.172.511.316,00	0,00	0,00	1.172.511.316,00
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	13.298.438.380,48	0,00	0,00	13.298.438.380,48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.770.853.370,00	0,00	0,00	1.770.853.370,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	5.302.579.150,00	0,00	0,00	5.302.579.150,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	1.441.153.700,00	0,00	0,00	1.441.153.700,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.840.041.444,00	297.518.000,00	0,00	5.137.559.444,00
Satuan Polisi Pamong Praja	665.194.500,00	0,00	0,00	665.194.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.604.158.258,00	0,00	0,00	1.604.158.258,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	720.708.530,00	0,00	0,00	720.708.530,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	936.628.000,00	0,00	0,00	936.628.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	973.474.002,00	0,00	0,00	973.474.002,00
Kecamatan Jemaja	2.064.367.184,00	0,00	0,00	2.064.367.184,00
Kecamatan Jemaja Timur	371.964.800,00	0,00	0,00	371.964.800,00
Kecamatan Palmatak	844.072.801,00	0,00	0,00	844.072.801,00
Kecamatan Siantan	674.586.000,00	0,00	0,00	674.586.000,00
Kecamatan Siantan Selatan	530.554.300,00	0,00	0,00	530.554.300,00
Kecamatan Siantan Tengah	185.599.000,00	0,00	0,00	185.599.000,00
Kecamatan Siantan Timur	878.024.400,00	0,00	0,00	878.024.400,00
<b>JUMLAH</b>	<b>67.393.051.007,71</b>	<b>297.518.000,00</b>	<b>905.482.260,00</b>	<b>66.785.086.747,71</b>

#### 7.6.3.1.4.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan terhadap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yang dibatasi berdasarkan umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.499.679.364,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 185**  
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Amortisasi Per 31 Des 2022	Penambahan Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023
1	3	4	5
Sekretariat Daerah	(1.789.496.383,33)	(110.090.500,00)	(1.899.586.883,33)
Sekretariat DPRD	(39.600.000,00)	0,00	(39.600.000,00)
Inspektorat Daerah	(186.500.000,00)	0,00	(186.500.000,00)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	(1.872.777.166,67)	(4.483.233,33)	(1.877.260.400,00)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.583.333,33)	(39.500.000,00)	(46.083.333,33)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(22.524.725.736,68)	(2.356.404.696,65)	(24.881.130.433,33)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(77.640.000,00)	0,00	(77.640.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(216.797.933,33)	(24.380.066,67)	(241.178.000,00)
Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	(1.221.787.499,67)	(146.342.167,00)	(1.368.129.666,67)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(2.094.508.500,00)	(11.649.820,00)	(2.106.158.320,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(16.491.440,00)	(1.177.960,00)	(17.669.400,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(69.410.000,00)	0,00	(69.410.000,00)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	(259.824.644,00)	(20.023.600,00)	(279.848.244,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(6.241.465.100,33)	(224.265.199,67)	(6.465.730.300,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(531.685.000,00)	0,00	(531.685.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(868.356.183,33)	(99.614.200,00)	(967.970.383,33)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.444.099.000,00)	0,00	(4.444.099.000,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>(42.461.747.920,68)</b>	<b>(3.037.931.443,32)</b>	<b>(45.499.679.364,00)</b>

Nilai buku Aset Tak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp1.839.758.280,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 186**  
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

SKPD	Aset Tak Berwujud 31-Des-22	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir/Nilai Buku Tahun 2023
1	3	4	5
Sekretariat Daerah	2.044.245.500,00	(1.899.586.883,33)	144.658.616,67
Sekretariat DPRD	39.600.000,00	(39.600.000,00)	0,00
Inspektorat Daerah	186.500.000,00	(186.500.000,00)	0,00
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.877.260.400,00	(1.877.260.400,00)	0,00

SKPD	Aset Tak Berwujud 31-Des-22	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2023
1	3	4	5
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	197.500.000,00	(46.083.333,33)	151.416.666,67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.228.907.600,00	(24.881.130.433,33)	347.777.166,67
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	77.640.000,00	(77.640.000,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	247.828.000,00	(241.178.000,00)	6.650.000,00
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	1.567.380.000,00	(1.368.129.666,67)	199.250.333,33
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	2.194.364.100,00	(2.106.158.320,00)	88.205.780,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.669.400,00	(17.669.400,00)	0,00
Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik	69.410.000,00	(69.410.000,00)	0,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	331.833.144,00	(279.848.244,00)	51.984.900,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.147.404.500,00	(6.465.730.300,00)	681.674.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	531.685.000,00	(531.685.000,00)	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.136.111.000,00	(967.970.383,33)	168.140.616,67
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.444.099.000,00	(4.444.099.000,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>47.339.437.644,00</b>	<b>(45.499.679.364,00)</b>	<b>1.839.758.280,00</b>

#### 7.6.3.1.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.951.009.224,94 sama dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp57.951.009.224,94 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 187**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Saldo Akhir Per 31 Des 2023
1	2
Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	(2.232.983.418,00)
Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.088.916.196,18)
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas)	(19.158.402,08)

SKPD	Saldo Akhir Per 31 Des 2023
1	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.806.559.920,00)
Kantor Satuan Pamong Praja	(665.194.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(973.474.002,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.839.935.562,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.766.869.751,00)
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	(10.750.372.501,00)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	(5.302.579.150,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	(1.441.153.700,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.291.640.073,79)
Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan	(1.172.511.316,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(2.511.477.174,39)
Setda Bagian Pemerintahan Umum	(209.675.000,00)
Setda Bagian Hukum	(43.780.000,00)
Setda Bagian Bina Ekonomi Infrastruktur	(24.580.000,00)
Setda Bagian Administrasi Pembangunan. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	(161.194.000,00)
Setda Bagian Umum	(5.376.097.124,00)
Setda Bagian Humas dan Protokol	(281.452.000,00)
Setda Pengelola	(199.573.000,00)
Sekretariat DPRD	(261.434.000,00)
Kecamatan Siantan	(674.586.000,00)
Kecamatan Jemaja	(2.057.577.184,00)
Kecamatan Palmatak	(844.072.801,00)
Kecamatan Siantan Timur	(875.651.837,50)
Kecamatan Siantan Selatan	(530.554.300,00)
Kecamatan Jemaja Timur	(256.318.500,00)
Kecamatan Siantan Tengah	(185.599.000,00)
Inspektorat Daerah	(329.659.100,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(936.628.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	(1.263.055.389,00)
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1.576.696.323,00)
<b>Total</b>	<b>(57.951.009.224,94)</b>

#### 7.6.3.1.4.6. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah Fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan DBH/DAU yang disalurkan secara non tunai dari RKUN pada masing-masing Rekening *Deposit Facility* milik Pemerintah Daerah yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia. Jumlah saldo rekening TDF atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember sebesar Rp21.553.208.050,00. TDF tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil yang disalurkan pada Tahun 2023 sebesar Rp10.347.188.050,00 dan dana bagi hasil Tahun 2023 sebesar Rp1.206.020.000,00.

### 7.6.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.026.794.345,36.

#### 7.6.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.026.794.345,36 terdiri dari.

Tabel 188  
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3
Pendapatan diterima dimuka	34.125.000,00	35.625.000,00
Utang Belanja	2.893.625.345,36	5.002.008.905,90
Utang Jangka Pendek Lainnya	99.044.000,00	14.981.626.740,11
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>3.026.794.345,36</b>	<b>20.019.260.646,01</b>

#### 7.6.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.125.000,00 merupakan pendapatan yang diterima dari hasil perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT Telkom Indonesia, Tbk selama 25 tahun terhitung sejak Tahun 2022 dengan perjanjian sewa Rp1.500.000,00 setiap tahunnya dan telah dibayarkan ke Kasda pada Tahun 2022 sebesar Rp37.500.000,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189  
Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Pendapatan diterima dimuka	35.625.000,00	0,00	1.500.000,00	34.125.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>34.125.000,00</b>

#### 7.6.3.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir periode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah Utang Belanja yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.893.625.345,36 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 190**  
**Mutasi Utang Belanja Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Utang Belanja	5.002.008.905,90	2.531.782.740,36	4.640.166.300,90	2.893.625.345,36
<b>Jumlah</b>	<b>5.002.008.905,90</b>	<b>2.531.782.740,36</b>	<b>4.640.166.300,90</b>	<b>2.893.625.345,36</b>

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.893.625.345,36 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

**Tabel 191**  
**Utang Belanja per SKPD Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

SKPD	Nama Pekerjaan	Nilai Utang Beban Per 31 Des 2023
1	2	3
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Tahun 2022	137.070.955,00
	Utang Beban dana Non Kapitasi dan INA CBG'S Tahun 2022	29.907.250,00
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Tahun 2023	162.638.474,00
	Utang Beban dana Non Kapitasi dan INA CBG'S Tahun 2023	1.183.976.770,73
<b>Jumlah</b>		<b>1.513.593.449,73</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembayaran Termin 99,94% Lanjutan Revitalisasi Masjid Nurul Ihsan Desa Tarempa Barat Kec. Siantan (Tunda Bayar 2021)	593.400,00
	Belanja Termin 100% DED Pembangunan Mesjid Pasir Panjang Desa Telaga (Tunda Bayar Tahun 2021)	95.865.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan ke pihak lain berupa kekurangan pembayaran pada CV Saruga Enginerring Consultant	24.753.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa berupa kekurangan pembayaran Rehabilitasi dan pembangunan Menara Mesjid Batu Ampar	13.967.034,63
<b>Jumlah</b>		<b>135.178.434,63</b>
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah TW IV	209.250.000,00
	BPJS 4% PTT Tahun Anggaran 2023	178.396.185,00
<b>Jumlah</b>		<b>387.646.185,00</b>
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan BA Rekon BPKPD dengan DPMD	178.070.363,00
	Utang Bantuan Keuangan kepada Desa	580.730.913,00
<b>Jumlah</b>		<b>758.801.276,00</b>
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.03 Rw.01 Dusun 1 Desa Munjan	98.406.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>98.406.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>2.893.625.345,36</b>

### 7.6.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang belanja modal tahun anggaran berkenaan, bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga

(*Account Payable*), utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga dan uang muka. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.044.000,00 merupakan sisa utang tahun 2022 dengan mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 192**  
**Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.981.626.740,11	0,00	14.882.582.740,11	99.044.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.981.626.740,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.882.582.740,11</b>	<b>99.044.000,00</b>

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2023 yang belum dilakukan pelunasan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atas Pembayaran Termin 100% DED Peningkatan Jalan Rewak – Sedanau, maka pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penganggaran kembali dan melakukan pelunasan atas utang jangka pendek lainnya. Apabila ada kewajiban Pihak Ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka akan dilakukan pemotongan dari SP2D Pelunasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2024.

#### 7.6.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023 tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang.

#### 7.6.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.938.981.680.414,64 dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.861.703.346.979,38. Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.938.981.680.414,64 dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.861.703.346.979,38 mengalami kenaikan sebesar Rp77.278.333.435,26 atau 4,15%.

## 7.6.4. LAPORAN OPERASIONAL

### 7.6.4.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan - LO digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Akun Pendapatan Daerah - LO diklasifikasikan menurut kelompok yaitu Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO, serta Surplus Non Operasional - LO. Realisasi Pendapatan Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 193  
Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	29.413.046.087,65	30.103.928.675,59	(690.882.587,94)	(2,29)
2	Pendapatan Transfer-LO	937.673.160.793,00	770.119.044.166,00	167.554.116.627,00	21,76
3	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah-LO	55.976.134,00	11.552.146.713,00	(11.496.170.579,00)	(99,52)
<b>JUMLAH</b>		<b>967.142.183.014,65</b>	<b>811.775.119.554,59</b>	<b>155.367.063.460,06</b>	<b>19,14</b>

Saldo Pendapatan Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp967.142.183.014,65. Mengalami kenaikan sebesar Rp155.367.063.460,06 atau sebesar 19,14% dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar Rp811.775.119.554,59. Akun-akun yang terdapat pada Pendapatan Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 7.6.4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp29.413.046.087,65 dan mengalami penurunan sebesar Rp690.882.587,94 atau sebesar 2,29% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp30.103.928.675,59, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 194  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	16.409.048.498,92	16.111.883.398,97	297.165.099,95	1,84
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	6.997.096.274,00	4.112.229.571,00	2.884.866.703,00	70,15
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	1.596.888.717,00	1.623.626.298,00	(26.737.581,00)	(1,65)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	4.410.012.597,73	8.256.189.407,62	(3.846.176.809,89)	(46,59)
<b>JUMLAH</b>		<b>29.413.046.087,65</b>	<b>30.103.928.675,59</b>	<b>(690.882.587,94)</b>	<b>(2,295)</b>

#### 7.6.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.409.048.498,92. Mengalami kenaikan sebesar Rp297.165.099,95 atau sebesar 1,84% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp16.111.883.398,97, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 195**  
**Saldo Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel – LO	4.176.976.544,00	1.517.413.293,97	2.658.543.250,03	175,20
2	Pajak Restoran – LO	986.743.320,92	794.295.248,00	178.809.172,92	22,51
3	Rumah Makan – LO	214.060.885,00	171.749.508,00	42.011.377,00	24,46
4	Kantin – LO	556.500,00	1.659.100,00	(1.102.600,00)	(66,46)
5	Pajak Warung – LO	74.622.980,00	64.818.986,00	8.849.994,00	13,65
6	Katering – LO	7.069.797.499,00	9.718.580.099,00	(2.619.142.823,00)	(26,95)
7	Pajak Kontes Kecantikan. Binaraga – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Diskotik. Karaoke. Club Malam. dan Sejenisnya – LO	59.872.450,00	53.579.530,00	6.292.920,00	11,75
9	Pajak Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Centre)-LO	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
10	Pajak Reklame – LO	13.692.300,00	16.586.200,00	(2.893.900,00)	(17,45)
11	Pajak Penerangan Jalan PLN – LO	0,00	2.351.609.249,00	(1.391.154.266,00)	(59,16)
12	Pajak Penerangan Jalan Non PLN – LO	2.551.351.688,00	145.046.751,00	1.445.849.954,00	996,82
13	Pajak Sarang Burung Walet	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
14	Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan – LO	155.490.397,00	88.368.889,00	53.320.083,00	60,34
15	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	509.367.116,00	619.432.184,00	(110.065.068,00)	(17,77)
16	Pajak Pertandingan Olahraga- LO	8.278.000,00	7.864.000,00	414.000,00	5,26
17	PBBP2-LO	583.738.819,00	554.380.361,00	29.358.458,00	5,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.409.048.498,92</b>	<b>16.111.883.398,97</b>	<b>297.165.099,95</b>	<b>1,84</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 196  
Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.409.048.498,92	16.310.773.757,00	98.274.741,92
	<b>Jumlah</b>	<b>16.409.048.498,92</b>	<b>16.310.773.757,00</b>	<b>98.274.741,92</b>

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp98.274.741,92. Selisih tersebut merupakan penambahan Piutang Pokok PBBP2 Tahun 2023, Pelunasan atas Piutang TGR atas temuan BPK TA 2022 Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebesar Rp53.158.378,08, Pelunasan Pajak Hiburan sebesar Rp194.800,00, Pajak Reklame sebesar Rp817.000,00 dan Penambahan Piutang PBBP2 sebesar Rp152.250.115,00.

#### 7.6.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 4 (empat) SKPD penghasil yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp6.997.096.274,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.884.866.703,00 atau sebesar 70,15% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp4.112.229.571,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 197  
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO	162.739.052,00	409.219.900,00	(246.480.848,00)	(60,23)
2	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah – LO	6.150.770.400,00	3.158.403.400,00	2.992.367.000,00	94,74
3	Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum – LO	54.408.000,00	75.755.000,00	(21.347.000,00)	(28,18)
4	Retribusi Los – LO	77.282.820,00	80.598.760,00	(3.315.940,00)	(4,11)
5	Retribusi Kios – LO	240.387.800,00	244.509.840,00	(4.122.040,00)	(1,69)
6	Pelayanan Jasa Pelabuhan – LO	15.419.000,00	11.368.000,00	4.051.000,00	35,64
7	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO	296.089.202,00	132.374.671,00	163.714.531,00	123,68
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.997.096.274,00</b>	<b>4.112.229.571,00</b>	<b>2.884.866.703,00</b>	<b>70,15</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 198  
Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Retribusi Daerah	6.997.096.274,00	7.134.834.674,00	137.738.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.997.096.274,00</b>	<b>7.134.834.674,00</b>	<b>137.738.400,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp137.738.400,00. Selisih tersebut merupakan pelunasan Utang BPJS sebesar Rp136.657.400,00 dan Pelunasan Piutang Retribusi Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp1.081.000,00.

#### 7.6.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.596.888.717,00. Mengalami penurunan sebesar Rp26.737.581,00 atau sebesar 1,65% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.623.626.298,00. Tidak terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dengan LO. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 199  
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	1.596.888.717,00	1.623.626.298,00	(26.737.581,00)	(1,65)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.596.888.717,00</b>	<b>1.623.626.298,00</b>	<b>(26.737.581,00)</b>	<b>(1,65)</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 200  
Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.596.888.717,00	1.596.888.717,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.596.888.717,00</b>	<b>1.596.888.717,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2023.

#### 7.6.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.410.012.597,73. Mengalami penurunan sebesar Rp3.846.176.809,89 atau sebesar 46,59% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp8.256.189.407,62. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 201**  
**Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sewa BMD-LO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro Daerah - LO	393.602.509,00	1.100.396.935,34	(706.794.426,34)	(64,23)
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	284.238.838,59	245.820.341,00	38.418.497,59	15,63
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LO	53.922.580,00	4.190.180,00	49.732.400,00	1.186,88
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	103.331.811,10	157.256.503,08	(53.924.691,98)	(34,29)
6	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LO	152.910,00	167.528,00	(14.618,00)	(8,73)
7	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO – LO	0,00	194.800,00	(194.800,00)	(100,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	90.917.572,00	108.213.974	(17.296.402,00)	(15,98)
9	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	137.002.086,04	62.650.400,00	74.351.686,04	118,68
11	Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen-LO	0,00	2.109.533,00	(2.109.533,00)	(100,00)
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO	0,00	284.127.395,00	(284.127.395,00)	(100,00)
13	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	81.307.000,00	0,00	81.307.000,00	0,00
14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat – LO	43.873.135,00	43.596.804,75	276.330,25	0,63
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	2.358.793.628,00	2.517.109.173,00	(158.315.545,00)	(6,29)
16	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	269.675.674,00	3.700.401.137,45	(3.430.725.463,45)	(92,71)
17	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO	98.976,00	63.620,00	35.356,00	55,57
18	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO	22.344,00	0,00	22.344,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS-LO	0,00	24.412.873,00	(24.412.873,00)	(100,00)
20	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	296.754.908,00	3.230.920,00	293.523.988,00	9.084,84
21	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan /Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
22	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	#DIV/0!
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya-LO	292.167.200,00	0,00	292.167.200,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	131.226,00	0,00	131.226,00	0,00
28	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	747.290,00	(747.290,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>4.410.012.597,73</b>	<b>8.256.189.407,62</b>	<b>(3.846.176.809,89)</b>	<b>(46,59)</b>

Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

Tabel 202  
Perbedaan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Lain-Lain PAD Yang Sah	4.410.012.597,73	4.319.744.945,73	90.267.652,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.410.012.597,73</b>	<b>4.319.744.945,73</b>	<b>90.267.652,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara saldo Lain-lain PAD Yang Sah -LRA dengan saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 yaitu sebesar Rp90.267.652,00. Selisih tersebut terdiri dari Penambahan Denda Pajak Daerah sebesar Rp90.917.572,00, Pelunasan Piutang Remunisasi atas TDF sebesar Rp3.230.920,00 serta Pengurangan Penyesuaian Pendapatan Yang Di Terima di Muka atas Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan PT. Telkom untuk Lahan *Hand Hole* sebesar Rp1.500.000,00.

#### 7.6.4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer - LO ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD. Saldo Pendapatan Transfer - LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp937.673.160.793,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp167.554.116.627,00 atau sebesar 21,76% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp770.119.044.166,00. Terdapat 2 (dua) sumber Pendapatan

Transfer-LO yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 203**  
**Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) – LO	859.814.761.237,00	696.897.488.948,00	162.917.272.289,00	23,38
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO)	16.356.155.000,00	6.072.979.000,00	10.283.176.000,00	169,33
3	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO)	61.502.244.556,00	67.148.576.218,00	(5.646.331.662,00)	(8,41)
<b>JUMLAH</b>		<b>937.673.160.793,00</b>	<b>770.119.044.166,00</b>	<b>167.554.116.627,00</b>	<b>21,76</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer - LRA diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 204**  
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer	937.673.160.793,00	969.008.038.949,00	(31.334.878.156,00)
<b>Jumlah</b>		<b>937.673.160.793,00</b>	<b>969.008.038.949,00</b>	<b>(31.334.878.156,00)</b>

Pengakuan Pendapatan Transfer dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer dalam LRA TA 2023. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer dalam LO. Atas Perbedaan Pendapatan Transfer – LO dan Pendapatan Transfer – LRA Pada Tahun 2023 sebesar Rp43.789.294.827,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Penerimaan Pendapatan Pokok DBH yang di (TDF) kan pada Tahun 2022 yang telah disalurkan ke Kasda Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 sebesar Rp13.321.710.788,00 dimana Tahun 2022 sudah diakui sebagai Pendapatan - LO;
2. Terdapat Pengakuan Pendapatan DBH yang disalurkan melalui TDF pada Tahun 2023 sebesar Rp21.553.208.050,00 yang telah diakui sebagai Pendapatan – LO namun belum pada Pendapatan - LRA;
3. Terdapat Pendapatan Dana Desa Tahun 2023 tidak dicatat dan diakui sebagai Pendapatan - LO sedangkan pada Pendapatan – LRA diakui sebagai Pendapatan sebesar Rp39.126.062.000,00 ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Terdapat Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp12.894.730.089,00.
5. Terdapat Penambahan Piutang atas Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 250 Tahun 2024 tentang Besaran Tunda

Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp12.454.416.671,00.

#### 7.6.4.1.2.1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp859.814.761.237,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp162.917.272.289,00 atau sebesar 23,38% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp696.897.488.948,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 205  
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO	47.698.074.070,00	55.740.956.367,00	(8.042.882.297,00)	(14,43)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO	282.137.285.000,00	208.750.581.108,00	73.386.703.892,00	35,16
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	383.849.195.981,00	368.244.672.250,00	15.604.523.731,00	4,24
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	146.130.206.186,00	64.161.279.223,00	81.968.926.963,00	127,75
<b>JUMLAH</b>		<b>859.814.761.237,00</b>	<b>696.897.488.948,00</b>	<b>162.917.272.289,00</b>	<b>23,38</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 206  
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapat Transfer Pemerintah Pusat	859.814.761.237,00	851.583.263.975,00	8.231.497.262,00
<b>Jumlah</b>		<b>859.814.761.237,00</b>	<b>851.583.263.975,00</b>	<b>8.231.497.262,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun 2023. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan tunda salaur TDF 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023 sebesar Rp13.321.710.788,00, Penambahan Pencatatan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil (TDF) yang sudah disalurkan RKUN ke Rekening penampung Bank Indonesia atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dimana per 31 Desember 2023 belum dilakukan penyaluran ke RKUD sebesar Rp21.553.208.050,00.

##### 7.6.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO

Saldo Dana Bagi Hasil Pajak – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.698.074.070,00. Mengalami penurunan sebesar Rp8.042.882.297,00 atau sebesar

14,43%. Dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp55.740.956.367,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 207**  
**Dana Bagi Hasil Pajak - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DBH PBB-LO	30.984.207.000,00	39.822.659.937,00	(8.838.452.937,00)	(22,19)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	16.098.419.000,00	15.244.794.000,00	853.625.000,00	5,60
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	611.744.000,00	663.916.000,00	(52.172.000,00)	(7,86)
4	DBH CHT-LO	3.704.070,00	9.586.430,00	(5.882.360,00)	(61,36)
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.698.074.070,00</b>	<b>55.740.956.367,00</b>	<b>(8.042.882.297,00)</b>	<b>(14,43)</b>

Penjelasan Perbedaan Dana Bagi Hasil Pajak – LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 208**  
**Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.698.074.070,00	70.647.320.020,00	(22.949.245.950,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>47.698.074.070,00</b>	<b>70.647.320.020,00</b>	<b>(22.949.245.950,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak - LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun 2023. Selisih tersebut merupakan reklasifikasi pencairan TDF DBH SDA Minyak Bumi yang merupakan TDF 2023 dari penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak, terdiri dari DBH Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp17.388.293.950,00, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp5.147.105.000,00 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Rp413.847.000,00.

#### 7.6.4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO

Saldo Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.137.285.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp73.386.703.892,00 atau sebesar 35,16% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp208.750.581.108,00. Rincian Realiasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 209**  
**Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	212.096.529.738,00	44.248.139.812,00	167.848.389.926,00	379,33
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	62.397.545.262,00	159.009.827.011,00	(96.612.281.749,00)	(60,76)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	884.582.000,00	3.479.622.285,00	(2.595.040.285,00)	(74,58)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	20.186.000,00	54.681.000,00	(34.495.000,00)	(63,08)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
6	DBH SDA Perikanan-LO	6.738.442.000,00	1.958.311.000,00	4.780.131.000,00	244,09
<b>JUMLAH</b>		<b>282.137.285.000,00</b>	<b>208.750.581.108,00</b>	<b>73.386.703.892,00</b>	<b>35,16</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 210**  
**Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	282.137.285.000,00	250.956.541.788,00	31.180.743.212,00
<b>Jumlah</b>		<b>282.137.285.000,00</b>	<b>250.956.541.788,00</b>	<b>31.180.743.212,00</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LRA Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat Penerimaan Pendapatan tunda salur TDF 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023 sebesar Rp13.321.710.788,00;
2. Penambahan Pencatatan Pendapatan atas Dana Bagi Hasil (TDF) yang sudah disalurkan RKUN ke Rekening penampung Bank Indonesia atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dimana per 31 Desember 2023 belum dilakukan penyaluran ke RKUD sebesar Rp21.553.208.050,00;
3. Reklasifikasi atas Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah berupa Pendapatan Remunerasi TDF tahun 2023 yang diakui sebagai Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO pada akun Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp299.985.828,00;
4. Reklasifikasi Pencairan TDF 2023 dari penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan sisa TDF Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 yang belum dicairkan diakui sebagai Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp44.502.454.000,00;
5. Reklasifikasi Pendapatan DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO yang diakui Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum sebesar Rp884.582.000,00.

#### 7.6.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.849.195.981,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp15.604.523.731,00 atau sebesar 4,24% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp368.244.672.250,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 211**  
**Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Alokasi Umum-LO	383.849.195.981,00	368.244.672.250,00	15.604.523.731,00	4,24
<b>JUMLAH</b>		<b>383.849.195.981,00</b>	<b>368.244.672.250,00</b>	<b>15.604.523.731,00</b>	<b>4,24</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 212**  
Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Umum-LO	383.849.195.981,00	383.849.195.981,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>383.849.195.981,00</b>	<b>383.849.195.981,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA Tahun 2023.

#### 7.6.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Saldo Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp146.130.206.186,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp81.968.926.963,00 atau sebesar 127,75%. dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp64.161.279.223,00. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 213**  
Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	100.946.353.790,00	43.623.225.788,00	57.323.128.002,00	131,41
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	45.183.852.396,00	20.538.053.435,00	24.645.798.961,00	120,00
<b>JUMLAH</b>		<b>146.130.206.186,00</b>	<b>64.161.279.223,00</b>	<b>81.968.926.963,00</b>	<b>127,75</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 214**  
Perbedaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	146.130.206.186,00	146.130.206.186,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>146.130.206.186,00</b>	<b>146.130.206.186,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Tahun 2023.

#### 7.6.4.1.2.2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO

Saldo Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.356.155.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp10.283.176.000,00 atau sebesar 169,33% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp6.072.979.000,00. Rincian

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 215**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	10.659.002.000,00	6.072.979.000,00	4.586.023.000,00	75,52
2	Insentif Fiskal - LO	5.697.153.000,00	0,00	5.697.153.000,00	100,00
JUMLAH		<b>16.356.155.000,00</b>	<b>6.072.979.000,00</b>	<b>10.283.176.000,00</b>	<b>169,33</b>

Penjelasan Perbedaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 216**  
**Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	16.356.155.000,00	55.482.217.000,00	(39.126.062.000,00)
Jumlah		<b>16.356.155.000,00</b>	<b>55.482.217.000,00</b>	<b>(39.126.062.000,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Dana Desa Tahun 2023 yang tidak dicatat pada LO dan hanya diakui sebagai Pendapatan - LRA sebesar Rp39.126.062.000,00, ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### 7.6.4.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Saldo Dana Insentif Daerah (DID) - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.659.002.000. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.586.023.000,00 atau sebesar 75,52% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp6.072.979.000,00. Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 217**  
**Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	10.659.002.000,00	6.072.979.000,00	4.586.023.000,00	75,52
JUMLAH		<b>10.659.002.000,00</b>	<b>6.072.979.000,00</b>	<b>4.586.023.000,00</b>	<b>75,52</b>

Penjelasan Perbedaan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 218**  
**Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) antara LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	10.659.002.000,00	10.659.002.000,00	0,00
Jumlah		<b>10.659.002.000,00</b>	<b>10.659.002.000,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LRA.

#### 7.6.4.1.2.2. Insentif Fiskal – LO

Saldo Insentif Fiskal - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.697.153.000. Mengalami peningkatan sebesar Rp5.697.153.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Rincian Insentif Fiskal – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 219**  
Pendapatan Insentif Fiskal - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Insentif Fiskal - LO	5.697.153.000,00	0,00	5.697.153.000,00	100,00
JUMLAH		<b>5.697.153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.153.000,00</b>	<b>100,00</b>

Penjelasan Perbedaan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) - LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 220**  
Perbedaan Pendapatan Dana Insentif Fiskal antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Insentif Fiskal	5.697.153.000,00	5.697.153.000,00	0,00
Jumlah		<b>5.697.153.000,00</b>	<b>5.697.153.000,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LO dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) – LRA.

#### 7.6.4.1.2.3. TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA - LO

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.047.827.885,00. Mengalami penurunan sebesar Rp18.100.748.333,00 atau sebesar 26,96% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp67.148.576.218,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 221**  
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	56.317.662.642	66.428.576.218,00	(10.110.913.576,00)	(15,22)
2	Bantuan Keuangan - LO	5.184.581.914	720.000.000,00	4.464.581.914,00	620,08
JUMLAH		<b>61.502.244.556,00</b>	<b>67.148.576.218,00</b>	<b>(5.646.331.662,00)</b>	<b>(8,41)</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 222**  
**Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	61.502.244.556,00	61.942.557.974,00	(440.313.418,00)
<b>Jumlah</b>		<b>61.502.244.556,00</b>	<b>61.942.557.974,00</b>	<b>(440.313.418,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO dengan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LRA sebesar Rp440.313.418,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan atas Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 dan Penambahan Piutang atas Tunda Salur atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp 12.454.416.671,00.

#### 7.6.4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp56.317.662.642. Mengalami penurunan sebesar Rp10.110.913.576,00 atau sebesar 15,22% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp66.428.576.218,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 223

Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	11.562.299.851,00	13.454.473.073,00	(1.892.173.222,00)	(14,06)
2	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	9.591.371.336,00	9.130.525.208,00	460.846.128,00	5,05
3	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	25.883.447.233,00	34.523.476.154,00	(8.640.028.921,00)	(25,03)
4	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan – LO	35.911.012,00	44.795.642,00	(8.884.630,00)	(19,83)
5	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	9.244.633.210,00	9.275.306.141,00	(30.672.931,00)	(0,33)
<b>JUMLAH</b>		<b>56.317.662.642,00</b>	<b>66.428.576.218,00</b>	<b>(10.110.913.576,00)</b>	<b>(15,22)</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bagi Hasil – LO dengan Pendapatan Bagi Hasil - LRA Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 224

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	56.317.662.642	56.757.976.060,00	(440.313.418,00)
<b>Jumlah</b>		<b>56.317.662.642</b>	<b>56.757.976.060</b>	<b>(440.313.418)</b>

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO dengan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LRA sebesar Rp12.894.730.089,00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air

Permukaan dan Penambahan Putang Tunda Salur sesuai dengan SK Gubernur Nomor 250 Tahun 2022 sebesar Rp12.454.416.671,00.

#### 7.6.4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan – LO

Saldo Pendapatan Bantuan Keuangan - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.184.581.914. Mengalami kenaikan sebesar Rp4.464.581.914,00 atau sebesar 620,08% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp720.000.000,00. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 225**  
Pendapatan Bagi Hasil- LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	6	7
1	Bantuan Keuangan - LO	5.184.581.914	720.000.000,00	4.464.581.914,00	620,08
<b>JUMLAH</b>		<b>5.184.581.914</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4.464.581.914,00</b>	<b>620,08</b>

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Bantuan Keuangan– LO dengan Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 226**  
Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Bantuan Keuangan	5.184.581.914	5.184.581.914	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.184.581.914</b>	<b>5.184.581.914</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Bantuan Keuangan – LO dengan Bantuan Keuangan – LRA.

#### 7.6.4.1.3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp11.552.146.713,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.552.146.713,00. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022 yang dicatat pada Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun Tahun 2023 dicatat pada DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO. Rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 227**  
Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Lainnya – LO	55.976.134,00	11.552.146.713,00	(11.496.170.579,00)	(99,52)
<b>JUMLAH</b>		<b>55.976.134,00</b>	<b>11.552.146.713,00</b>	<b>(11.496.170.579,00)</b>	<b>(99,52)</b>

**Tabel 228**  
Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara LO dan LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
----	--------	----	-----	---------

1	Pendapatan Lainnya – LO	55.976.134,00	0,00	55.976.134,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.976.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.976.134,00</b>

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2023 terdapat selisih antara Pendapatan Lainnya -LO dan LRA. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Hibah atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Pendapatan dari Kementerian Kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp55.976.134,00.

#### 7.6.4.2. BEBAN – LO

##### 7.6.4.2.1. BEBAN OPERASI – LO

Beban adalah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (*diskonto*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Beban Operasi merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 (satu) Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Saldo Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp825.887.028.530,96. Mengalami peningkatan sebesar Rp72.280.555.857,38 atau sebesar 9,59% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp753.606.472.673,58. Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 229**  
**Beban Operasi SKPKD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Beban Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai - LO	334.517.144.489,73	307.576.216.584,00	26.178.838.656,00	8,51
2	Beban Persediaan - LO	85.994.032.217,74	56.653.018.530,96	28.701.203.300,68	50,66
3	Beban Jasa - LO	191.310.121.160,00	193.971.026.750,00	350.134.913,00	0,18
4	Beban Pemeliharaan - LO	5.109.736.048,00	5.172.738.675,38	250.964,62	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas - LO	47.617.887.044,00	41.376.934.280,00	6.237.894.664,00	15,08
6	Beban Hibah - LO	17.149.119.101,00	9.528.194.577,00	7.620.924.524,00	79,98
7	Beban Bantuan Sosial - LO	161.614.000,00	2.556.981.500,00	(2.395.367.500,00)	(93,68)
8	Beban Penyisihan - LO	177.056.125,80	300.379.733,53	(123.323.607,73)	(41,05 )
9	Beban Penyusutan- LO	142.530.604.004,24	136.470.982.042,71	5.793.010.057,44	4,24
<b>Jumlah</b>		<b>824.486.064.401,88</b>	<b>753.606.472.673,58</b>	<b>70.960.841.516,93</b>	<b>9,42</b>

##### 7.6.4.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Saldo Beban Pegawai-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp333.755.055.240,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp26.178.838.656,00 atau sebesar 8,51% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp307.576.216.584,00. Rincian Beban Pegawai-LO Per SKPD Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 230**  
**Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	17.603.356.232,00	15.351.199.335,00	2.252.156.897,00	14,67
2	Sekretariat DPRD	12.843.317.578,00	13.686.931.957,00	(843.614.379,00)	(6,16)
3	Inspektorat	7.772.144.312,00	7.563.840.857,00	208.303.455,00	2,75
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	117.617.078.763,00	97.654.959.256,00	19.962.119.507,00	20,44
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.627.371.085,00	58.712.683.936,00	7.914.687.149,00	13,48
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.695.716.718,00	7.780.291.801,00	915.424.917,00	11,77
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.161.533.135,00	5.094.609.762,00	(933.076.627,00)	(18,31)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.828.216.763,00	5.139.925.769,00	(1.311.709.006,00)	(25,52)
9	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	7.626.490.640,00	7.277.917.294,00	348.573.346,00	4,79
10	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	5.376.411.982,00	5.352.452.774,00	23.959.208,00	0,45
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.504.281.975,00	4.020.122.848,00	1.484.159.127,00	36,92
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.315.969.388,00	3.805.499.980,00	510.469.408,00	13,41
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	5.146.383.341,00	4.202.812.736,00	943.570.605,00	22,45
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.311.086.807,00	3.494.300.618,00	(183.213.811,00)	(5,24)
15	Satuan Polisi Pamong Praja	4.680.803.256,00	5.614.502.653,00	(933.699.397,00)	(16,63)
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.900.028.328,00	4.135.628.458,00	764.399.870,00	18,48
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	16.984.539.993,00	26.669.786.571,00	(9.685.246.578,00)	(36,32)
18	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	5.439.435.584,00	5.015.120.598,00	424.314.986,00	8,46
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2.746.758.013,00	2.777.521.420,00	(30.763.407,00)	(1,11)
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.438.560.767,00	3.988.332.853,00	450.227.914,00	11,29
21	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.926.636.752,00	54.000.000,00	1.872.636.752,00	3467,85
22	Kecamatan Jemaja	3.601.024.703,00	3.477.746.950,00	123.277.753,00	3,54
23	Kecamatan Jemaja Timur	1.813.397.944,00	1.787.710.595,00	25.687.349,00	1,44
24	Kecamatan Palmatak	2.681.341.138,00	2.776.955.388,00	(95.614.250,00)	(3,44)
25	Kecamatan Siantan	2.797.666.959,00	2.483.494.217,00	314.172.742,00	12,65
26	Kecamatan Siantan Selatan	1.701.746.408,00	1.726.377.329,00	(24.630.921,00)	(1,43)
27	Kecamatan Siantan Tengah	1.784.013.433,00	1.860.454.012,00	(76.440.579,00)	(4,11)
28	Kecamatan Siantan Timur	1.637.451.453,00	1.354.113.456,00	283.337.997,00	20,92
29	Kecamatan Siantan Utara	1.504.523.042,00	1.319.429.056,00	185.093.986,00	14,03
30	Kecamatan Jemaja Barat	1.448.141.201,00	1.503.782.652,00	(55.641.451,00)	(3,70)

No	SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
31	Kecamatan Kute Siantan	2.094.104.999,00	1.893.711.453,00	200.393.546,00	10,58
32	Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46.080.000,00	0,00	46.080.000,00	100,00
33	Dinas Perpustakaan dan Arsipan Daerah	1.007.535.548,00	0,00	1.007.535.548,00	100,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91.907.000,00	0,00	91.907.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>333.755.055.240,00</b>	<b>307.576.216.584,00</b>	<b>26.178.838.656,00</b>	<b>8,51</b>

**Tabel 231**  
**Perbedaan Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Pegawai	333.755.055.240,00	333.755.055.240,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>333.755.055.240,00</b>	<b>333.755.055.240,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2023 tidak terdapat selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini sama dengan saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023.

#### 7.6.4.2.1.2. Beban Barang – LO

Mengacu dengan peraturan terbaru, bahwasanya akun Beban Persediaan pada tahun anggaran sebelumnya untuk mengakomodir barang habis pakai dan barang material lainnya, tapi pada saat ini akun tersebut tidak dipergunakan lagi, sehingga menjadi akun Beban Barang untuk mengakomodir seluruh barang yang habis pakai dan barang tidak habis pakai yang dikeluarkan oleh SKPD selama 1 (satu) tahun laporan.

Beban barang habis pakai dan/atau barang tidak habis pakai dicatat sebesar pemakaian barang persediaan tersebut (*use of goods inventory*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian beban barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Beban Barang-LO adalah sebesar Rp85.354.221.831,64. Sedangkan Beban Barang-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp56.653.018.530,96 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp28.701.203.300,68 atau sebesar 50,66%.

**Tabel 232**  
**Realisasi Beban Barang Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Persediaan Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	613.238.375,00	231.037.354,00	382.201.021,00	165,43
2	Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia	165.111.378,00	79.128.250,00	85.983.128,00	108,66
3	Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.968.293.966,00	4.090.652.058,00	(122.358.092,00)	(2,99)
4	Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku	31.391.540,00	36.644.840,00	(5.253.300,00)	(14,34)
5	Beban Persediaan Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	18.961.600,00	141.815.000,00	(122.853.400,00)	(86,63)
6	Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	47.734.600,00	40.928.196,00	6.806.404,00	16,63

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
7	Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	372.859.178,00	83.017.500,00	289.841.678,00	349,13
8	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	118.127.438,00	38.791.000,00	79.336.438,00	204,52
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	100,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	54.668.500,00	0,00	54.668.500,00	100,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
12	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	93.242.000,00	(93.242.000,00)	(100,00)
13	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	11.569.500,00	(11.569.500,00)	(100,00)
14	Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.923.729,00	62.693.250,00	(52.769.521,00)	(84,17)
15	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.351.904.618,00	4.688.310.919,27	(3.336.406.301,27)	(71,16)
16	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.942.343.571,00	1.945.071.162,00	(2.727.591,00)	(0,14)
17	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.797.275.121,00	2.744.163.144,00	53.111.977,00	1,94
18	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	616.451.588,00	502.821.000,00	113.630.588,00	22,60
19	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
20	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.680.633.063,00	1.354.737.452,00	325.895.611,00	24,06
21	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	750.494.897,00	965.820.667,00	(215.325.770,00)	(22,29)
22	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.070.701.471,00	468.026.295,00	602.675.176,00	128,77
23	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	599.795.440,00	609.531.833,00	(9.736.393,00)	(1,60)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	477.320.056,00	1.655.798.579,00	(1.178.478.523,00)	(71,17)
25	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	444.199.351,00	209.642.960,00	234.556.391,00	111,88
26	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.777.357.470,00	737.363.786,00	1.039.993.684,00	141,04
27	Beban Persediaan Obat-Obatan	12.241.420.045,00	8.027.262.999,00	4.214.157.046,00	52,50
28	Beban Persediaan Obat-Obatan Lainnya	2.295.684.759,00	4.419.446.265,06	(2.123.761.506,06)	(8,05)
29	Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.740.969.729,00	2.232.371.237,36	21.508.598.491,64	963,49
30	Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.125.559.464,00	1.567.505.616,32	3.558.053.847,68	226,99
31	Beban Persediaan Natura dan Pakan-Natura	2.239.065.296,00	1.874.149.869,00	364.915.427,00	19,47
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	75.774.689,00	0,00	75.774.689,00	100,00
33	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	3.503.018.316,00	3.098.455.892,00	404.562.424,00	13,06
34	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.429.843.197,00	1.341.315.300,00	88.527.897,00	6,60

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
35	Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	74.526.000,00	33.750.000,00	40.776.000,00	120,82
36	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.392.382.570,00	4.129.089.290,00	263.293.280,00	6,38
37	Beban Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	271.868.970,00	(271.868.970,00)	(100,00)
38	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	305.111.200,00	0,00	305.111.200,00	100,00
39	Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	346.405.020,00	89.252.000,00	257.153.020,00	288,12
40	Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	829.485.560,00	113.820.700,00	715.664.860,00	628,77
42	Beban Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1.800.000,00	44.974.980,00	(43.174.980,00)	(96,00)
43	Beban Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja	63.592.566,00	69.176.390,00	(5.583.824,00)	(8,07)
34	Beban Pakaian Paskibraka	166.644.500,00	0,00	166.644.500,00	100,00
45	Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah	919.152.680,00	585.418.000,00	333.734.680,00	57,01
46	Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	135.895.000,00	81.794.291,00	54.100.709,00	66,14
47	Beban Persediaan Pakaian Olahraga	355.471.270,00	326.894.410,00	28.576.860,00	8,74
48	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	521.896.740,00	49.550.000,00	472.346.740,00	953,27
49	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.603.000,00	0,00	8.603.000,00	100,00
49	Beban Barang dan Jasa BOS	7.666.383.280,64	7501115575,95	165.267.704,69	2,20
	<b>Jumlah</b>	<b>85.354.221.831,64</b>	<b>56.653.018.530,96</b>	<b>28.701.203.300,68</b>	<b>50,66</b>

Rincian Beban Barang pada masing-masing SKPD pada Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 233**  
**Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	6.792.735.237,00	7.065.713.480,00	(272.978.243,00)	(3,86)
2	Sekretariat DPRD	2.341.389.053,00	2.379.824.260,00	(38.435.207,00)	(1,62)
3	Inspektorat	211.327.000,00	364.424.237,00	(153.097.237,00)	(42,01)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15.413.373.427,64	11.255.361.136,95	4.158.012.290,69	36,94
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.120.177.087,00	18.345.466.173,33	3.774.710.913,67	20,58
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.407.149.984,00	6.128.940.799,68	1.278.209.184,32	20,86
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa	1.416.067.885,00	376.444.249,00	1.039.623.636,00	276,17
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	279.235.793,00	71.023.601,00	208.212.192,00	293,16

No.	SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	497.342.185,00	71.175.097,00	426.167.088,00	598,76
10	Dinas Perikanan. Pertanian Dan Pangan	11.464.013.991,00	854.722.709,00	10.609.291.282,00	1.241,26
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	2.035.814.789,00	1.169.748.621,00	866.066.168,00	74,04
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	336.726.984,00	304.797.048,00	31.929.936,00	10,48
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	124.379.700,00	20.535.800,00	103.843.900,00	505,67
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	306.179.412,00	403.824.620,00	(97.645.208,00)	(24,18)
15	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	1.245.955.528,00	1.167.195.903,00	78.759.625,00	6,75
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.835.091.023,00	975.909.824,00	1.859.181.199,00	190,51
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1.516.904.326,00	474.874.402,00	1.042.029.924,00	219,43
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	302.235.340,00	546.961.092,00	(244.725.752,00)	(44,74)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	617.439.965,00	763.113.072,00	(145.673.107,00)	(19,09)
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	773.655.338,00	724.800.360,00	48.854.978,00	6,74
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	422.959.750,00	217.309.600,00	205.650.150,00	94,63
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	533.319.690,00	102.649.630,00	430.670.060,00	419,55
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	477.913.160,00	7.628.400,00	470.284.760,00	6.164,92
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	153.005.799,00	95.059.700,00	57.946.099,00	60,96
25	Kecamatan Jemaja	413.585.240,00	362.918.055,00	50.667.185,00	13,96
26	Kecamatan Jemaja Timur	258.032.510,00	219.673.990,00	38.358.520,00	17,46
27	Kecamatan Palmatak	942.355.120,00	315.531.040,00	626.824.080,00	198,66
28	Kecamatan Siantan	1.730.300.335,00	576.758.315,00	1.153.542.020,00	200,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	444.955.506,00	223.171.591,00	221.783.915,00	99,38
30	Kecamatan Siantan Tengah	399.178.825,00	204.535.307,00	194.643.518,00	95,16
31	Kecamatan Siantan Timur	863.074.273,00	311.715.416,00	551.358.857,00	176,88
32	Kecamatan Siantan Utara	170.461.800,00	194.016.973,00	(23.555.173,00)	(12,14)
33	Kecamatan Jemaja Barat	342.230.976,00	181.131.279,00	161.099.697,00	88,94
34	Kecamatan Kute Siantan	165.654.800,00	176.062.750,00	(10.407.950,00)	(5,91)
	<b>Jumlah</b>	<b>85.354.221.831,64</b>	<b>56.653.018.530,96</b>	<b>28.701.203.300,68</b>	<b>50,66</b>

Perbandingan perbedaan Beban Barang-LO dengan Belanja Barang (Persediaan)-LRA yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 234  
Perbedaan Realisasi Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang (Persediaan)-LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Persediaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Persediaan	85.354.221.831,64	77.989.158.662,00	7.365.063.169,64

Tabel di atas menunjukkan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Barang (Persediaan) - LRA pada Tahun 2023 sebesar Rp7.365.063.169,64 terdiri dari penggunaan barang habis pakai dan tak habis pakai pada masing-masing SKPD.

#### 7.6.4.2.1.3. Beban Jasa – LO

Saldo Beban Jasa-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp194.321.161.663,00. Mengalami penurunan sebesar Rp350.134.913,00 atau sebesar 0,18 % dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp193.971.026.750,00.

Tabel 235  
Beban Jasa-LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Jasa Kantor	150.457.694.753,00	140.638.608.023,00	9.819.086.730,00	6,98
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.419.830.506,00	19.179.680.173,00	(759.849.667,00)	(3,96)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.476.019.518,00	5.304.006.875,00	(2.827.987.357,00)	(53,32)
4	Beban Cetak Dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.721.302.916,00	7.177.769.869,00	(1.456.466.953,00)	(20,29)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	205.447.000,00	358.666.200,00	(153.219.200,00)	(42,72)
8	Beban Makanan Dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	13.493.784.370,00	16.131.547.890,00	(2.637.763.520,00)	(16,35)
13	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	944.054.000,00	(944.054.000,00)	(100)
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	177.500.000,00	245.000.000,00	(67.500.000,00)	(27,55)
15	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.113.150.600,00	851.203.920,00	261.946.680,00	30,77
18	Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO	2.256.432.000,00	3.140.489.800,00	(884057800,00)	0,00
	JUMLAH	194.321.161.663,00	193.971.026.750,00	350.134.913,00	0,18

Rincian Beban Jasa-LO Tahun 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 236  
Beban Jasa Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	15.029.233.448,00	15.372.129.687,00	-342.896.239,00	(2,23)
2	Sekretariat DPRD	5.477.278.111,00	4.777.608.069,00	699.670.042,00	14,64

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
3	Inspektorat	2.251.835.761,00	2.022.416.707,00	229.419.054,00	11,34
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	46.065.115.811,00	47.576.383.671,00	(1.511.267.860,00)	(3,18)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.934.508.016,00	43.005.872.035,00	(1.071.364.019,00)	(2,49)
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.682.439.233,00	14.276.329.145,00	3.406.110.088,00	23,86
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.416.067.885,00	3.095.643.117,00	(1.679.575.232,00)	(54,26)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.031.680.972,00	2.763.865.041,00	(1.732.184.069,00)	(62,67)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	702.993.649,00	10.815.000,00	692.178.649,00	6.400,17
10	Dinas Perikanan, Pertanian Dan Pangan	4.305.657.035,00	4.004.791.576,00	300.865.459,00	7,51
11	Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup	7.235.807.456,00	11.760.951.985,00	(4.525.144.529,00)	(38,48)
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.367.737.616,00	1.468.688.931,00	899.048.685,00	61,21
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.138.578.560,00	140.895.568,00	997.682.992,00	708,10
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.561.247.993,00	7.466.968.494,00	(905.720.501,00)	(12,13)
15	Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian	2.860.863.343,00	1.412.094.680,00	1.448.768.663,00	102,60
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.388.835.607,00	2.333.661.024,00	55.174.583,00	2,36
17	Satuan Polisi Pamong Praja	6.765.477.256,00	8.307.057.852,00	(1.541.580.596,00)	(18,56)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.649.962.624,00	1.706.177.300,00	(56.214.676,00)	(3,29)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	8.790.588.591,00	5.066.928.173,00	3.723.660.418,00	73,49
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	2.991.059.049,00	2.645.272.588,00	345.786.461,00	13,07
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	949.614.598,00	981.373.933,00	(31.759.335,00)	(3,24)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.754.484.688,00	4.352.118.039,00	402.366.649,00	9,25
23	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	356.967.592,00	118.849.500,00	238.118.092,00	200,35
24	Kecamatan Jemaja	1.619.985.409,00	1.444.665.579,00	175.319.830,00	12,14
25	Kecamatan Jemaja Timur	683.570.890,00	725.056.640,00	(41.485.750,00)	(5,72)
26	Kecamatan Palmatak	1.372.238.505,00	1.347.224.073,00	25.014.432,00	1,86
27	Kecamatan Siantan	1.528.091.666,00	1.527.826.791,00	264.875,00	0,02
28	Kecamatan Siantan Selatan	356.761.046,00	459.363.956,00	(102.602.910,00)	(22,34)
29	Kecamatan Siantan Tengah	961.401.247,00	792.518.111,00	168.883.136,00	21,31
30	Kecamatan Siantan Timur	704.220.680,00	721.114.806,00	(16.894.126,00)	(2,34)
31	Kecamatan Siantan Utara	590.965.896,00	638.540.439,00	(47.574.543,00)	(7,45)
32	Kecamatan Jemaja Barat	467.205.320,00	451.621.688,00	15.583.632,00	3,45

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
33	Kecamatan Kute Siantan	1.328.686.110,00	1.196.202.552,00	132.483.558,00	11,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>194.321.161.663,00</b>	<b>193.971.026.750,00</b>	<b>350.134.913,00</b>	<b>0,18</b>

**Tabel 237**  
**Perbedaan Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Jasa		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Jasa	194.321.161.663,00	194.321.161.663,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>194.321.161.663,00</b>	<b>194.321.161.663,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa – LRA pada Tahun 2023.

#### 7.6.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan – LO

Saldo Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.172.989.640,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp250.964,62,00 atau sebesar 0,00%. Dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp5.172.738.675,38. Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 238**  
**Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.419.249.260,00	2.552.066.101,00	867.183.159,00	33,98
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.537.567.880,00	1.645.944.150,38	(108.376.270,38)	(6,58)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	216.172.500,00	974.728.424,00	(758.555.924,00)	(77,82)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.172.989.640,00</b>	<b>5.172.738.675,38</b>	<b>250.964,62</b>	<b>0,00</b>

Rincian Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 239**  
**Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	1.037.375.404,00	834.380.950,00	202.994.454,00	24,33
2	Sekretariat DPRD	21.011.750,00	36.130.000,00	(15.118.250,00)	(41,84)
3	Inspektorat	32.550.800,00	53.787.726,00	(21.236.926,00)	(39,48)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	61.128.000,00	176.952.600,00	(115.824.600,00)	(65,46)

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.235.171.967,00	877.495.549,00	1.357.676.418,00	154,72
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	478.494.403,00	1.582.372.677,38	(1.103.878.274,38)	(69,76)
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.531.250,00	46.486.400,00	(13.955.150,00)	(30,02)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.544.700,00	72.762.100,00	(55.217.400,00)	(75,89)
9	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	22.830.000,00	13.820.000,00	9.010.000,00	65,20
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	320.119.330,00	561.952.110,00	(241.832.780,00)	(43,03)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100.774.080,00	13.655.000,00	87.119.080,00	638,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.224.400,00	0,00	7.224.400,00	100,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	225.424.350,00	84.762.750,00	140.661.600,00	165,95
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	131.225.900,00	202.675.000,00	(71.449.100,00)	(35,25)
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.000.000,00	117.027.000,00	(112.027.000,00)	(95,73)
17	Satuan Polisi Pamong Praja	73.407.300,00	127.524.150,00	(54.116.850,00)	(42,44)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.850.000,00	18.044.000,00	(11.194.000,00)	(62,04)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	106.954.750,00	93.393.600,00	13.561.150,00	14,52
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.704.000,00	46.365.000,00	(30.661.000,00)	(66,13)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.951.216,00	8.682.000,00	(4.730.784,00)	(54,49)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.025.520,00	68.519.860,00	(58.494.340,00)	(85,37)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.025.520,00	0,00	10.025.520,00	100,00
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	25.450.000,00	0,00	25.450.000,00	100,00
25	Kecamatan Jemaja	25.450.000,00	13.440.000,00	12.010.000,00	89,36
26	Kecamatan Jemaja Timur	0,00	3.552.000,00	(3.552.000,00)	(100,00)
27	Kecamatan Palmatak	25.450.000,00	0,00	25.450.000,00	100,00
28	Kecamatan Siantan	25.450.000,00	47.129.400,00	(21.679.400,00)	(46,00)
29	Kecamatan Siantan Selatan	25.450.000,00	44.919.300,00	(19.469.300,00)	(43,34)
30	Kecamatan Siantan Tengah	18.083.000,00	5.000.000,00	13.083.000,00	261,66
31	Kecamatan Siantan Timur	18.083.000,00	0,00	18.083.000,00	100,00
32	Kecamatan Siantan Utara	18.083.000,00	6.925.000,00	11.158.000,00	161,13
33	Kecamatan Jemaja Barat	18.083.000,00	6.484.503,00	11.598.497,00	178,86
34	Kecamatan Kute Siantan	18.083.000,00	8.500.000,00	9.583.000,00	112,74
	<b>Jumlah</b>	<b>5.172.989.640,00</b>	<b>5.172.738.675,38</b>	<b>250.964,62</b>	<b>0,00</b>

Tabel 240  
Perbedaan Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Pemeliharaan		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4
Beban/Belanja Pemeliharaan	5.172.989.640,00	5.172.989.640,00	0,00
Jumlah	5.172.989.640,00	5.172.989.640,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA pada Tahun 2023.

#### 7.6.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Saldo Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp47.614.828.944,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp6.237.894.664,00 atau sebesar 15,08% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp41.376.934.280,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 241  
Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.998.291.522,00	30.436.963.289,00	2.561.328.233,00	8,42
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.567.115.522,00	10.939.970.991,00	3.627.144.531,00	33,15
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	100,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.480.000,00	0,00	30.480.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>47.617.887.044,00</b>	<b>41.376.934.280,00</b>	<b>6.240.952.764,00</b>	<b>15,08</b>

Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2023 dan 2022 pada masing-masing SKPD diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 242  
Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	7.318.724.006,00	7.540.106.092,00	(221.382.086,00)	(2,94)
2	Sekretariat DPRD	9.614.663.233,00	10.833.423.711,00	(1.218.760.478,00)	(11,25)
3	Inspektorat	1.357.641.844,00	1.147.332.222,00	210.309.622,00	18,33
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.352.934.694,00	2.661.870.651,00	(308.935.957,00)	(11,61)
5	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.935.619.560,00	2.557.919.161,00	3.374.642.299,00	132,05
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.479.858.148,00	1.781.423.708,00	698.434.440,00	39,21
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.308.000.053,00	1.375.444.132,00	(67.444.079,00)	(4,90)

No.	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	662.812.397,00	756.736.944,00	(93.924.547,00)	(12,41)
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	657.575.351,00	97.404.968,00	560.170.383,00	575,09
10	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	884.903.192,00	619.179.182,00	265.724.010,00	42,92
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	723.762.312,00	513.435.698,00	210.326.614,00	40,96
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	909.537.548,00	691.142.209,00	218.395.339,00	31,60
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Des	708.741.315,00	44.550.500,00	664.190.815,00	1.490,87
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.151.390.249,00	853.886.886,00	297.503.363,00	34,84
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.151.585.116,00	726.320.833,00	425.264.283,00	58,55
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.713.234.536,00	1.313.798.844,00	399.435.692,00	30,40
17	Satuan Polisi Pamong Praja	709.789.926,00	590.664.381,00	119.125.545,00	20,17
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	595.563.222,00	709.655.708,00	(114.092.486,00)	(16,08)
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.195.807.856,00	2.710.459.990,00	485.347.866,00	17,91
20	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	1.442.898.272,00	1.223.047.535,00	219.850.737,00	17,98
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	657.517.678,00	375.134.765,00	282.382.913,00	75,28
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	613.423.318,00	804.494.804,00	(191.071.486,00)	(23,75)
23	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	140.324.296,00	18.470.400,00	121.853.896,00	659,73
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	291.299.708,00	306.278.402,00	(14.978.694,00)	(4,89)
25	Kecamatan Jemaja	191.456.881,00	222.464.730,00	(31.007.849,00)	(13,94)
26	Kecamatan Jemaja Timur	103.743.000,00	140.404.200,00	36.661.200,00	(26,11)
27	Kecamatan Palmatak	118.048.600,00	126.647.114,00	(8.598.514,00)	(6,79)
28	Kecamatan Siantan	48.558.400,00	28.508.900,00	20.049.500,00	70,33
29	Kecamatan Siantan Selatan	122.109.403,00	116.336.400,00	5.773.003,00	4,96
30	Kecamatan Siantan Tengah	85.589.899,00	85.775.000,00	(185.101,00)	(0,22)
31	Kecamatan Siantan Timur	58.275.000,00	35.918.100,00	22.356.900,00	62,24
32	Kecamatan Siantan Utara	46.061.200,00	77.473.412,00	(31.412.212,00)	(40,55)
33	Kecamatan Jemaja Barat	166.914.600,00	195.824.698,00	(28.910.098,00)	(14,76)
34	Kecamatan Kute Siantan	99.522.231,00	95.400.000,00	4.122.231,00	4,32
<b>JUMLAH</b>		<b>47.617.887.044,00</b>	<b>41.376.934.280,00</b>	<b>6.240.952.764,00</b>	<b>15,08</b>

Tabel 243  
Perbedaan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Beban/Belanja Perjalanan Dinas		Selisih
	LO	LRA	
1	2	3	4

Beban/Belanja Perjalanan Dinas	47.614.828.944,00	47.614.828.944,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	------

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas – LO dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2023.

#### 7.6.4.2.1.6. Beban Hibah – LO

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5888 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Beban Hibah digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban Hibah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Beban Hibah-LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun 2023 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Saldo Beban Hibah-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.149.119.101,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp7.620.924.524,00 atau sebesar 79,98% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp9.528.194.577,00. Rincian Beban Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 244  
Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.954.870.000,00	3.072.607.199,00	9.882.262.801,00	321,62
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	127.756.920,00	23.382.150,00	104.374.770,00	446,39
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	170.000.000,00	(170.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	239.990.000,00	5.307.213.000,00	(5.067.223.000,00)	(95,48)
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.802.404.650,00	120.469.924,00	1.681.934.726,00	1.396,14
7	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.166.185.714,00	0,00	1.166.185.714,00	100,00
8	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	397.127.718,00	397.127.718,00	0,00	100,00
10	Beban Hibah Kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
11	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota	460.784.099,00	437.394.586,00	23.389.513,00	5,35
<b>JUMLAH</b>		<b>17.149.119.101,00</b>	<b>9.528.194.577,00</b>	<b>7.620.924.524,00</b>	<b>79,98</b>

Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 245**  
Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Hibah	17.149.119.101,00	17.149.119.101,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.149.119.101,00</b>	<b>17.149.119.101,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel diatas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA pada Tahun 2023.

**Tabel 246**  
Beban Hibah Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	1.130.000.000,00	2.280.192.700,00	(1.150.192.700,00)	(50,44)
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.627.654.099,00	680.776.736,00	1.946.877.363,00	285,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.486.902.064,00	5.307.213.000,00	(2.820.310.936,00)	(53,14)
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	338.100.000,00	572.414.499,00	(234.314.499,00)	(40,93)
5	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan		120.469.924,00	(120.469.924,00)	(100,00)
6	Kecamatan Jemaja	127.756.920,00	0,00	127.756.920,00	100,00
7	Kecamatan Kute Siantan	383.578.300,00	0,00	383.578.300,00	100,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.805.127.718,00	567.127.718,00	9.238.000.000,00	1.628,91
<b>JUMLAH</b>		<b>17.149.119.101,00</b>	<b>9.528.194.577,00</b>	<b>7.620.924.524,00</b>	<b>79,98</b>

**Tabel 247**  
Beban Hibah Uang dan Barang Kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17.149.119.101,00	9.528.194.577,00	7.620.924.524,00	79,98

<b>JUMLAH</b>	<b>17.149.119.101,00</b>	<b>9.528.194.577,00</b>	<b>7.620.924.524,00</b>	<b>79,98</b>
---------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

**Tabel 248**  
**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	2.166.870.000,00	220.000.000,00	1.946.870.000,00	884,94
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	572.414.499,00	(572.414.499,00)	(100,00)
3	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
4	Sekretariat Daerah	1.130.000.000,00	2.280.192.700,00	(1.150.192.700,00)	(50,44)
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.408.000.000,00	0,00	9.408.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.954.870.000,00</b>	<b>3.072.607.199,00</b>	<b>9.882.262.801,00</b>	<b>321,62</b>

**Tabel 249**  
**Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Siantan	127.756.920,00	23.382.150,00	104.374.770,00	446,39
<b>Jumlah</b>		<b>127.756.920,00</b>	<b>23.382.150,00</b>	<b>104.374.770,00</b>	<b>446,39</b>

**Tabel 250**  
**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Terdaftar Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	239.990.000,00	5.307.213.000,00	(5.067.223.000,00)	(95,48)
<b>Jumlah</b>		<b>239.990.000,00</b>	<b>5.307.213.000,00</b>	<b>(5.067.223.000,00)</b>	<b>(95,48)</b>

**Tabel 251**  
**Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.418.826.350,00	5.307.213.000,00	(3.888.386.650,00)	(73,27)
2	Kecamatan Kute Siantan	383.578.300,00	0,00	383.578.300,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.802.404.650,00</b>	<b>5.307.213.000,00</b>	<b>(3.504.808.350,00)</b>	<b>(66,04)</b>

**Tabel 252**  
**Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**  
**Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	338.100.000,00	0,00	338.100.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	828.085.714,00	85.074.000,00	743.011.714,00	873,37
3	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.166.185.714,00</b>	<b>85.074.000,00</b>	<b>1.081.111.714,00</b>	<b>1.270,79</b>

**Tabel 253**  
**Beban Hibah Dana BOS**  
**Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	460.784.099,00	437.394.586,00	23.389.513,00	5,35
	<b>Jumlah</b>	<b>460.784.099,00</b>	<b>437.394.586,00</b>	<b>23.389.513,00</b>	<b>5,35</b>

**Tabel 254**  
**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**  
**Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	397.127.718,00	397.127.718,00	0,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.127.718,00</b>	<b>397.127.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

#### 7.6.4.2.1.7. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Saldo Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp161.614.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp2.395.367.500,00 atau sebesar 93,68% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp2.556.981.500,00. Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 255**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	161.614.000,00	2.476.989.500,00	(2.315.375.500,00)	(93,48)
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	79.992.000,00	(79.992.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>161.614.000,00</b>	<b>2.556.981.500,00</b>	<b>(2.395.367.500,00)</b>	<b>(93,68)</b>

Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 256**  
Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2023  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	2	3	4	5
1	Beban/Belanja Bantuan Sosial	161.614.000,00	161.614.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>161.614.000,00</b>	<b>161.614.000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabel di atas menunjukkan tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA pada Tahun 2023.

#### 7.6.4.2.1.8. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang - LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp177.056.125,80. Mengalami penurunan sebesar Rp123.323.607,73 atau sebesar 41,05% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp300.379.733,53. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 257**  
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang	177.056.125,80	300.379.733,53	(123.323.607,73)	(41,05)
	<b>JUMLAH</b>	<b>177.056.125,80</b>	<b>300.379.733,53</b>	<b>(123.323.607,73)</b>	<b>(41,05)</b>

**Tabel 258**  
Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Saldo 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
Penyisihan Piutang	300.379.733,53	0,00	123.323.607,73	177.056.125,80
<b>Jumlah</b>	<b>300.379.733,53</b>	<b>0,00</b>	<b>123.323.607,73</b>	<b>177.056.125,80</b>

Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 259**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyisihan Piutang s.d 31 Desember 2023
1	2	3
1	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	136.598.250,40
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	39.023.312,00
3	Beban Penyisihan Pitang Pajak Restoran	1.434.563,40
<b>JUMLAH</b>		<b>177.056.125,80</b>

#### 7.6.4.2.1.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp142.530.604.004,23. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 260**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2023	Beban Amortisasi Tahun 2023	Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2023
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	12.980.753.294,00	4.483.233,33	12.985.236.527,33
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20.402.519.222,05	39.500.000,00	20.442.019.222,05
3	Dinas PUPRPRKP	83.218.243.339,57	2.356.404.696,65	85.574.648.036,22
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	285.188.234,00	0,00	285.188.234,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.621.860,00	0,00	34.621.860,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	291.696.705,00	1.177.960,00	292.874.665,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	7.317.355.057,29	11.649.820,00	7.329.004.877,29
9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	1.277.462.655,00	0,00	1.277.462.655,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	1.891.180.890,00	20.023.600,00	1.911.204.490,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	188.835.440,00	24.380.066,67	213.215.506,67
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	18.317.726,00	0,00	18.317.726,00
13	Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	885.397.383,00	146.342.167,00	1.031.739.550,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	948.126.453,00	224.265.199,67	1.172.391.652,67
15	Sekretariat Daerah	4.769.145.860,00	110.090.500,00	4.879.236.360,00
16	Sekretariat DPRD	553.740.691,00	0,00	553.740.691,00
17	Inspektorat Daerah	153.190.716,00	0,00	153.190.716,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	750.704.989,00	0,00	750.704.989,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182.690.373,00	0,00	182.690.373,00

No	Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2023	Beban Amortisasi Tahun 2023	Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2023
1	2	3	4	5
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	441.673.720,00	99.614.200,00	541.287.920,00
21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	295.452.490,00	0,00	295.452.490,00
22	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	48.031.366,00	0,00	48.031.366,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	768.550.888,00	0,00	768.550.888,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.282.503,00	0,00	18.282.503,00
25	Kecamatan Siantan	378.741.428,00	0,00	378.741.428,00
26	Kecamatan Jemaja	226.894.768,00	0,00	226.894.768,00
27	Kecamatan Palmatak	182.354.150,00	0,00	182.354.150,00
28	Kecamatan Siantan Timur	104.540.338,00	0,00	104.540.338,00
29	Kecamatan Siantan Selatan	196.011.542,00	0,00	196.011.542,00
30	Kecamatan Jemaja Timur	173.359.180,00	0,00	173.359.180,00
31	Kecamatan Siantan Tengah	170.172.296,00	0,00	170.172.296,00
32	Kecamatan Siantan Utara	49.987.265,00	0,00	49.987.265,00
33	Kecamatan Jemaja Barat	117.864.509,00	0,00	117.864.509,00
34	Kecamatan Kute Siantan	171.585.230,00	0,00	171.585.230,00
<b>JUMLAH</b>		<b>139.492.672.560,91</b>	<b>3.037.931.443,32</b>	<b>142.530.604.004,23</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp142.530.604.004,23 yang terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp139.492.672.560,91 dan Amortisasi sebesar Rp3.037.931.443,32.

**a. Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 261**  
**Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	34.564.855.382,34	34.701.782.234,53	(136.926.852,19)	(0,39)
<b>JUMLAH</b>		<b>34.564.855.382,34</b>	<b>34.701.782.234,53</b>	<b>(136.926.852,19)</b>	<b>(0,39)</b>

**b. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan**

Beban penyusutan Gedung dan bangunan Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 262**  
**Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	18.549.187.795,00	18.478.974.592,07	70.213.202,93	0,38
<b>JUMLAH</b>		<b>18.549.187.795,00</b>	<b>18.478.974.592,07</b>	<b>70.213.202,93</b>	<b>0,38</b>

**c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 263**  
**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.378.629.383,57	81.984.005.934,75	4.394.623.448,82	5,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>86.378.629.383,57</b>	<b>81.984.005.934,75</b>	<b>4.394.623.448,82</b>	<b>5,36</b>

**d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya).

**e. Beban Penyusutan Aset Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya).

**f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp3.037.931.443,33. Mengalami penurunan sebesar Rp555.141.089,04 dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp3.593.072.532,37. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 264**  
**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.037.931.443,33	3.593.072.532,37	(555.141.089,04)	(15,45)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.037.931.443,33</b>	<b>3.593.072.532,37</b>	<b>(555.141.089,04)</b>	<b>(15,45)</b>

**7.6.4.2.2. BEBAN TRANSFER – LO**

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah kepada suatu entitas pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Saldo Beban Transfer - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp73.778.011.595,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp10.600.402.229,00 atau sebesar 16,78% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp63.177.609.366,00. Rincian Beban Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 265**  
**Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil – LO	2.298.647.561,00	1.816.890.385,00	481.757.176,00	26,52
2	Beban Bantuan Keuangan - LO	71.479.364.034,00	61.360.718.981,00	10.118.645.053,00	16,49

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	73.778.011.595,00	63.177.609.366,00	10.600.402.229,00	16,78

#### 7.6.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil - LO

Saldo Beban Bagi Hasil – LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 266  
Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	2.298.647.561,00	1.816.890.385,00	481.757.176,00	26,52
	Jumlah	2.298.647.561,00	1.816.890.385,00	481.757.176,00	26,52

Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp2.298.647.561,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp481.757.176,00 atau 26,52% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.816.890.385,00.

#### 7.6.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan – LO

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 267  
Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	71.479.364.034,00	61.360.718.981,00	10.118.645.053,00	16,49
	JUMLAH	71.479.364.034,00	61.360.718.981,00	10.118.645.053,00	16,49

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp71.479.364.034,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp10.118.645.053,00 atau 16,49% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp61.360.718.981,00.

#### Surplus/Defisit dari Operasi - LO

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Saldo Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp68.796.857.229,14. Mengalami peningkatan sebesar Rp73.805.819.714,13 atau sebesar 1.473,48% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar minus Rp5.008.962.484,99. Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 268  
Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan – LO	967.142.183.014,65	811.775.119.554,59	155.367.063.460,06	19,14
2	Beban – LO	898.345.325.785,51	816.784.082.039,58	81.561.243.745,93	9,99

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>68.796.857.229,14</b>	<b>(5.008.962.484,99)</b>	<b>73.805.819.714,13</b>	<b>1.473,48</b>

#### 7.6.4.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan/penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional).

#### 7.6.4.4. POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa).

#### 7.6.4.5. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp68.796.857.229,14. Mengalami kenaikan sebesar Rp73.805.819.714,13 atau sebesar 1.473,48% dibandingkan saldo Tahun 2022 minus sebesar Rp5.008.962.484,99.

Tabel 269  
Surplus/Defisit - LO Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	68.796.857.229,14	(5.008.962.484,99)	73.805.819.714,13	1.473,48
2	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>68.796.857.229,14</b>	<b>(5.008.962.484,99)</b>	<b>73.805.819.714,13</b>	<b>1.473,48</b>

### 7.6.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 270  
Realisasi Arus Kas Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	202.391.640.093,09	79.187.947.698,31
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(184.291.542.980,00)	(120.401.935.455,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(1.134.954.983,98)	107.568.801,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>16.965.142.129,11</b>	<b>(41.106.418.955,69)</b>

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun 2023 sebesar Rp16.965.142.129,11 mengalami Peningkatan bersih kas sebesar Rp24.141.276.826,58.

#### 7.6.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 271  
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	998.370.281.042,73	824.553.991.952,51
2	Arus Kas Keluar	795.978.640.949,64	745.366.044.254,20
	<b>Jumlah (1 – 2)</b>	<b>202.391.640.093,09</b>	<b>79.187.947.698,31</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp202.391.640.093,09 mengalami peningkatan sebesar Rp123.203.692.394,78 atau sebesar 155,58% dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar Rp79.187.947.698,31. Arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

##### 7.6.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus Masuk Kas Tahun 2023 sebesar Rp998.370.281.042,73 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

**a. Penerimaan Pajak Daerah**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp16.310.773.757,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp345.203.443,03 atau sebesar 2,16% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp15.965.570.313,97.

**b. Penerimaan Retribusi Daerah**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.134.834.674,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp3.150.802.503,00 atau sebesar 79,09% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp3.984.032.171,00.

**c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 yang berasal dividen PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp1.596.888.717,00. Mengalami penurunan sebesar Rp26.737.581,00 atau sebesar 1,65% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.623.626.298,00.

**d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.319.744.945,73. Mengalami penurunan sebesar Rp3.793.685.121,81 atau sebesar 46,76% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp8.113.430.067,54.

**e. Penerimaan Dana Bagi Hasil**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp321.603.861.808,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp70.434.035.121,00 atau sebesar 28,04% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp251.169.826.687,00.

**f. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 adalah sebesar Rp383.849.195.981,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp15.604.523.731,00 atau sebesar 4,24% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp368.244.672.250,00.

**g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 adalah sebesar Rp100.946.353.790,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp55.527.096.861,00 atau sebesar 122,25% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp45.419.256.929,00.

**h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp45.183.852.396,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp23.883.903.502,00 atau sebesar 112,13% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp21.299.948.894,00.

**i. Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.659.002.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp4.586.023.000,00 atau sebesar 75,52% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp6.072.979.000,00.

**j. Penerimaan Dana Desa**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp39.126.062.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.271.405.500,00 atau sebesar 6,16% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp36.854.656.500,00.

**k. Penerimaan Insentif Fiskal**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.697.153.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp5.697.153.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

**l. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebesar Rp56.757.976.060,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp3.224.129.931,00 atau sebesar 6,02% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp53.533.846.129,00.

**m. Penerimaan Bantuan Keuangan**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.184.581.914,00 Mengalami peningkatan sebesar Rp4.464.581.914,00 atau sebesar 620,08% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp720.000.000,00.

**n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah (Penerimaan Hibah Dana BOS) Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.552.146.713,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp11.552.146.713,00.

**7.6.5.1.2. Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas Tahun 2023 sebesar Rp795.978.640.949,64 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

**a. Pembayaran Pegawai**

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp333.755.055.240,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp25.404.398.227,00 atau sebesar 8,24% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp308.350.657.013,00.

**b. Pembayaran Barang dan Jasa**

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Barang Tahun 2023 adalah sebesar Rp332.767.580.289,64. Mengalami peningkatan sebesar Rp13.107.407.420,44 atau sebesar 4,10% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp319.660.172.869,20.

**c. Pembayaran Belanja Hibah**

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.149.119.101,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp6.914.971.524,00 atau sebesar 67,57% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp10.234.147.577,00.

**d. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**

Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp161.614.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp2.395.367.500,00 atau sebesar 93,68% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.556.981.500,00.

**e. Pembayaran Tak Terduga**

Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga di Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dibandingkan realisasi di Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat Arus Keluar Kas dari Pembayaran Tak Terduga).

**f. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan**

Realisasi Arus Keluar Kas dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp112.145.272.319,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp7.581.187.024,00 atau sebesar 7,25% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp104.564.085.295,00.

**7.6.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 272**  
**Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	184.291.542.980,00	120.401.935.455,00
Jumlah (1 – 2)		(184.291.542.980,00)	(120.401.935.455,00)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar (Rp184.291.542.980,00). Mengalami penurunan sebesar Rp63.889.607525,00 atau sebesar 53,06% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar (Rp120.401.935.455,00).

**7.6.5.2.1. Arus Masuk Kas**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi).

**7.6.5.2.2. Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan perolehan aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**a. Perolehan Tanah**

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan tanah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp80.343.000,00.

**b. Perolehan Peralatan dan Mesin**

Arus Keluar Kas dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp51.188.694.187,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp22.352.303.379,00 atau sebesar 77,51% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp28.836.390.808,00.

**c. Perolehan Gedung dan Bangunan**

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp34.500.354.929,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.244.866.531,00 atau sebesar 3,48% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp35.745.221.460,00.

**d. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp96.909.592.427,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp41.948.189.140,00 atau sebesar 76,32% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp54.961.403.287,00.

**e. Perolehan Aset Tetap Lainnya**

Arus Keluar Kas dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.692.901.437,00, mengalami kenaikan sebesar Rp914.324.537,00 atau sebesar 117,44% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp778.576.900,00.

**7.6.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

**Tabel 273**  
**Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	865.045.016,02	1.107.568.801,00
2	Arus Kas Keluar	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>Jumlah (1 – 2)</b>		<b>(1.134.954.983,98)</b>	<b>107.568.801,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 defisit sebesar Rp1.134.954.983,98 yang merupakan pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun 2023 dengan pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (penyaluran dana bergulir) pada Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00.

**7.6.5.3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada pokok dana bergulir di Tahun 2023 sebesar Rp865.045.016,02. Mengalami penurunan sebesar Rp242.523.784,98 atau sebesar 21,90% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.107.568.801,00.

**7.6.5.3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan penyaluran pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir pada Tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000.000,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

#### 7.6.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 274  
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk	73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
2	Arus Kas Keluar	73.763.342.623,00	60.580.876.537,00
	<b>Jumlah (1 – 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara dan tidak terdapat selisih karena Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyeter selurunya atas potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

##### 7.6.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp73.763.342.623,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp13.182.466.086,00 atau sebesar 21,76% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp60.580.876.537,00.

##### 7.6.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp73.763.342.623,00. Mengalami penurunan sebesar Rp13.182.466.086,00 atau sebesar 21,76% dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp60.580.876.537,00.

##### 7.6.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2023 sebesar Rp6.984.586.830,57 merupakan Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2022. Saldo awal di BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp41.106.418.955,69 atau sebesar 85,48% dibandingkan dengan realisasi saldo awal di BUD Tahun 2022 sebesar Rp48.091.005.786,26.

Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.949.728.959,68 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp22.327.961.923,56, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp15.369.994,00, Kas di Dana BOS sebesar Rp1,12 dan Kas di Kas Lainnya Sebesar Rp1.606.397.041,00.

### 7.6.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp1.861.703.346.979,38 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022, sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (*audited*) Tahun 2023;
2. Surplus/defisit - LO sebesar Rp68.796.857.229,14 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2023;
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp8.481.476.206,12 merupakan penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut.
  - a. Koreksi atas Nilai Persediaan sebesar Rp2.088.453.017,53 yang terdiri dari penyesuaian Saldo Awal Tahun 2022 dan Reklasifikasi Persediaan pada Tahun berjalan Tahun 2023.
  - b. Koreksi Ekuitas Atas Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp1.550.630.304,25 yang terdiri dari:
    - 1) Koreksi tambah berupa:
      - a. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp684.192.000,00;
      - b. Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp119.693.000,00;
      - c. Bangunan Gedung Tempat Ibadah atas Reklasi pencatatan ke Persediaan sebesar Rp381.713.460,00; dan
      - d. Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari Pengadaan Bus Air Ro-ro yang belum disusutkan per Des 2023 sebesar Rp626.303.112,00.
    - 2) Koreksi kurang berupa:
      - a. Alat Besar Apung Lainnya atas kekurangan Volume Kapal Roro sebesar Rp6.000.000,00;
      - b. Jalan Kabupaten atas Koreksi kurang atas kelebihan pembayaran Pembangunan Jalan Menuju Pesantren Assuniah sebesar Rp 1.179.811,14; dan
      - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten atas Koreksi kurang atas kelebihan pembayaran berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Fisik pada Dinas PUPRPRKP sebesar Rp254.091.456,61.
  - c. Koreksi Lain-lain sebesar Rp9.019.298.919,40 terdiri dari:
    - 1) Koreksi tambah berupa:
      - a. Koreksi atas Kas lainnya sebesar Rp. 1.042.000,00;
      - b. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp626.303.112,00;
      - c. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp12.218.674.912,02, yaitu:
      - d. Alat Besar Apung Lainnya sebesar Rp2.950.000.000,00
        - Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp64.000.000,00

- Komputer Unit Lainnya sebesar Rp106.755.000,00
- Bangunan Kesehatan sebesar Rp144.254.000,00
- Jalan Desa sebesar Rp3.793.669.725,02
- Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal sebesar Rp2.020.640.250,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp3.139.355.937,00

2) Koreksi kurang berupa:

- a. Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp235.840.008,19 atas penyesuaian perhitungan NRV dana bergulir pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena perubahan kondisi menjadi pemusnahan sebesar Rp905.482.260,00 dan telah dilakukan Pemusnahan pada Tahun 2023;
- c. Penyesuaian Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp389.615.895,84;
- d. Pengurangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atas temuan BPK Tahun 2022 sebesar Rp405.523.759,24;
- e. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp1.263.956.069,35, yaitu:
  - Alat Kantor Lainnya Rp757.254.596,00
  - Meja Kerja Pejabat Rp56.241.500,00
  - Kursi Kerja Pejabat Rp13.000.000,00
  - Alat Kedokteran Lainnya Rp424.379.627,00
  - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp5.640.000,00
  - Peralatan Komputer Lainnya Rp5.460.346,35
  - Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya Rp1.980.000,00

**7.6.7. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS. UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH**

Bermula di Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2023 seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penganggaran telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri, dimana salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan dan mengaplikasikan sistem SIPD mulai dari Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan.

Seiringan berjalannya penggunaan Aplikasi SIPD Kemendagri masih terdapat kekurangan dalam penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, dikarenakan jaringan serta sumber daya manusia yang masih baru terhadap aplikasi tersebut sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan secara beringan Aplikasi dari Tim Pengembangan Simda BMD BPKP dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta besar harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat memperoleh capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian dan pengungkapan neraca pada pos-pos aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, antara lain terdapat pengelompokan piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Pada pos aset tetap dicatat akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selama 1 (satu) tahun akuntansi pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat beberapa hal yang dapat Kami ungkapkan antara lain pada pos kewajiban dalam penerapan akuntansi basis akrual terdapat pengungkapan pengakuan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya yang tidak terbayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan dan dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya pada program dan kegiatan serta rekening obyek belanja yang sama dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya pada APBD Perubahan.

Untuk pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2023 yang berbasis *accrual* direklasifikasikan menjadi ekuitas.

#### 7.6.7.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah - LRA / Pendapatan Asli Daerah LAK

Tabel 275  
Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	16.310.773.757,00	16.310.773.757,00	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.134.834.674,00	7.134.834.674,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.596.888.717,00	1.596.888.717,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	4.319.744.945,73	4.319.744.945,73	0,00
	Jumlah	29.362.242.093,73	29.362.242.093,73	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Asli Daerah - LRA dengan Pendapatan Asli Daerah – LAK.

#### 7.6.7.2. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer - LRA / Pendapatan Transfer - LAK

Tabel 276  
Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	851.583.263.975,00	851.583.263.975,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	55.482.217.000,00	55.482.217.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	56.757.976.060,00	56.757.976.060,00	0,00
4	Bantuan Keuangan	5.184.581.914,00	5.184.581.914,00	0,00
	Jumlah	969.008.038.949,00	969.008.038.949,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer – LAK.

#### 7.6.7.3. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA / Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK

Tabel 277  
Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK.

#### 7.6.7.4. Pengungkapan Perbedaan Belanja Operasi - LRA/ Belanja Operasi - LAK

Tabel 278  
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	333.755.055.240,00	333.755.055.240,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	332.767.580.289,64	332.767.580.289,64	0,00
3	Belanja Hibah	17.149.119.101,00	17.149.119.101,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	161.614.000,00	161.614.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>683.833.368.630,64</b>	<b>683.833.368.630,64</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Belanja Operasi - LRA dengan Belanja Operasi - LAK.

#### 7.6.7.5. Pengungkapan Perbedaan Belanja Tidak Terduga - LRA/ Belanja Tidak Terduga - LAK

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Belanja Tidak Terduga - LRA dengan Belanja Tidak Terduga - LAK. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp0,00.

#### 7.6.7.6. Pengungkapan Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

Pengungkapan Belanja Transfer – LRA yaitu akun belanja bagi hasil dan akun belanja bantuan keuangan dengan Transfer Bantuan Keuangan Keuangan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 279  
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)	112.145.272.319,00	112.145.272.319,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.145.272.319,00</b>	<b>112.145.272.319,00</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

### 7.6.7.7. Pengungkapan Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK

Tabel 280  
Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.188.694.187,00	51.188.694.187,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.500.354.929,00	34.500.354.929,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.909.592.427,00	96.909.592.427,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.692.901.437,00	1.692.901.437,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>184.291.542.980,00</b>	<b>184.291.542.980,00</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK.

### 7.6.7.8. Pengungkapan Perbedaan antara Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 281  
Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	865.045.016,02	865.045.016,02	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>865.045.016,02</b>	<b>865.045.016,02</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

### 7.6.7.9. Pengungkapan Perbedaan antara Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

Tabel 282  
Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sampai dengan Per 31 Desember 2023 tidak terdapat selisih antara Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

## 7.7. **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari peraturan yang legal dan formal, serta semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, maka muncul berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Tuntutan yang datang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah untuk mengatur sendiri pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai otonomi daerah, yang terus di gaungkan di masing-masing daerah. Salah satunya daerah kepulauan yang turut menggaungkan pemekaran perubahan untuk mengelola pemerintahan sendiri yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas agar daerahnya dibentuk menjadi kabupaten pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut yang sebelumnya di bawah wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain: Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran daerah ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Kepulauan Anambas kepada Pemerintah atas ketidakmerataan pembangunan dan minimnya fasilitas publik di Daerah yang kaya sumber daya alam dan migas tersebut. Beranjak dari hal tersebut muncul suatu keinginan untuk membentuk kabupaten baru dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak terikat lagi dengan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2008 melalui proses pemekaran wilayah. Proses pemekaran menjadikan Kepulauan Anambas sebagai sebuah kabupaten melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai ketika Kepulauan Riau dibentuk menjadi sebuah Propinsi pada Tahun 2002. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi dinamika politik dan proses tarik ulur kepentingan antara elit-elit politik lokal daerah Anambas dengan kabupaten induk sehingga perjalanan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sempat terhenti karena terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota kabupaten dan akhirnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi kandungan laut dan migas ini ditetapkan menjadi kabupaten. Pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dimaksud untuk mendekatkan rentang kendali dan memperpendek jalur birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mengingat kondisi Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari Kabupaten Natuna yaitu sekitar 15 jam perjalanan kapal laut dan lebih dekat dengan Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Di samping sarana transportasi yang terbatas yang dikelilingi oleh lautan yang luas, dimana pada musim-musim tertentu sulit

ditempuh dengan menggunakan kapal laut dan belum tersedianya transportasi udara sampai saat ini untuk menuju ibukota Kabupaten Natuna dalam rangka mengakses pelayanan publik. Dukungan untuk keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri merupakan hal usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kaum intelektual, ulama, para pengusaha dan wakil rakyat serta masyarakat awam melalui Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat anambas dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Akhirnya setelah lebih dari lima Tahun cita-cita untuk memiliki, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan yang didasarkan pada kearifan lokal terwujud sudah dengan ditetapkannya Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 24 Juli 2008. Terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur, dua kelurahan dan 34 desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bapak H. Abdul Haris. S.H.,MH sebagai Bupati Kepulauan Anambas dan Bapak Wan Zuhendra sebagai Wakil Bupati untuk Periode ke II Masa Bhakti 2021-2024. Pada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, maka bertambah 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat. Pada Tahun 2019 dilakukan pemekaran lagi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan sehingga Jumlah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan.

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2°10'0"-3°40'0" LU s/d 105°15'0"-106°45'0" BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur.

Sebagai wilayah Kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna Utara. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.664.15 km<sup>2</sup> hanya 607.72 km<sup>2</sup> (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya ± 46.056.43 km<sup>2</sup> (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam sepuluh kecamatan, dua kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa meliputi:

- Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Barat Daya dan Desa Sri Tanjung;
- Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, terdiri dari Desa Tiangau, Desa Mengkai, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil dan Desa Air Bini;

- Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, terdiri atas Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Munjan, Desa Temburun, Desa Serat dan Desa Air Putih;
- Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, terdiri atas Desa Teluk Siantan, Desa Air Asuk, Desa Air Sena, Desa Lidi, Desa Teluk Sunting dan Desa Liuk;
- Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, terdiri dari Desa Piabung, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Langir, Desa Putik, Desa Candi dan Desa Belibak;
- Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, terdiri dari satu Kelurahan, Desa Rewak, Desa Mampok, Desa Air Biru, Desa Batu Berapit dan Desa Landak dan;
- Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, terdiri dari Desa Ulu Maras, Desa Kuala Maras, Desa Genting Pulus dan Desa Bukit Padi.
- Kecamatan Jemaja Barat ibu kota Impol terdiri dari Desa Impol, Desa Sunggak dan Desa Keramat;
- Kecamatan Siantan Utara ibu kota Mubur terdiri dari Desa Mubur, Desa Bayat dan Desa Piasan;
- Kecamatan Kute Siantan ibu kota Payalaman terdiri dari Desa Payalaman, Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak  $\pm 38.70$  mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak  $\pm 37.37$  mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak ( $\pm 208.41$  mil) dan Siantan Tengah ( $\pm 205.16$  mil). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut. Untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah  $\pm 202.29$  mil, ke Johor (Malaysia)  $\pm 205.97$  mil dan Kuching (Malaysia)  $\pm 318.91$  mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta  $\pm 640.72$  mil.

#### **7.7.1. Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah**

Aplikasi pendukung dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 antara lain:

##### **a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**

Tahun 2023 merupakan Tahun dimulainya dalam mengimplementasikan SIPD secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu dari proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Peranggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem SIPD masih terdapat beberapa kekurangan dan perbaikan kedepan dalam rangka penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang terjadi dilapangan.

##### **b. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah**

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas mulai akhir Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk kebijakan penyusutan dan umur aset tetap, kebijakan akuntansi dan pelaporan aset tetap.

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke *database server* yang ada di ruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan *export* dan *import* data dari *client* ke server atau sebaliknya. Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara update data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung pencatatan dan pelaporan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

### c. Aplikasi SIMGAJI TASPEN

Aplikasi SIMGAJI TASPEN yang dikeluarkan oleh PT TASPEN. Tbk. dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Agustus 2015 sampai sekarang. Aplikasi SIMGAJI Taspem yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk pelaporan ke Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pemotongan PPh 21, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Aplikasi SIMGAJI TASPEN dipergunakan secara terpusat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penginputan dan pencetakan daftar gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pangkat dan golongan yang ada dimasing-masing organisasi/SKPD. Penginputan data perubahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilakukan setiap awal bulan berjalan dan pencetakan daftar gaji bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan, daftar gaji yang telah dicetak dapat diambil oleh bendahara pengeluaran SKPD di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pengajuan pembayaran gaji PNSD diawal bulan dengan batas pengajuan pada tanggal 5 bulan berjalan, sehingga mempermudah staf gaji untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

### d. Aplikasi Anambas *Single Information System*

Aplikasi Anambas *Single Information System* dirancang oleh Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Memenuhi tantangan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi. Aplikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan, mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai dan SP2D *Online* yang terintegrasi ke Aplikasi *Payment system* pada perbankan (Bank Riau Kepri) yang bermanfaat untuk memastikan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, informasi posisi kas secara real time dan proses tutup buku lebih cepat dan handal serta kedisiplinan pengelolaan keuangan meningkat.

### e. Cast Management System (CMS)

Aplikasi Monitoring Transaksi dari Bank Riau Kepri Syariah digunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melakukan monitoring Keluar dan Masuk Dana pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

### 7.7.2. Peristiwa-Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 belum diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 283**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	DBH Provinsi T.A. 2023	Alokasi Pergub No. 164	Realisasi RKUD	Yang Akan Di Salur
1	2	3	4	5
1	PKB	11.562.299.851,00	8.010.915.610,00	3.551.384.241,00
2	BBN – KB	9.591.371.336,00	7.125.523.442,00	2.465.847.894,00
3	PBB – KB	25.883.447.233,00	19.456.172.187,00	6.427.275.046,00
4	Pajak Air Permukaan	35.911.012,00	26.001.522,00	9.909.490,00
<b>Jumlah</b>		<b>47.073.029.432,00</b>	<b>34.618.612.761,00</b>	<b>12.454.416.671,00</b>

## 7.8. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

  
H. ABDUL HARIS, SH., M.H